

**EVALUASI PROGRAM BUDIDAYA
MINAPOLITAN BERDASARKAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN MALANG**

**(Studi Pada Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kecamatan Wajak Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ARI HARDIANSYAH
125030107111015**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

“Untuk mendapatkan yang Anda inginkan, Anda harus bersabar melalui yang tidak anda inginkan. Maka tabahilah masa sulit yang sedang Anda alami, agar Anda sampai di masa mudah dan makmur Anda”

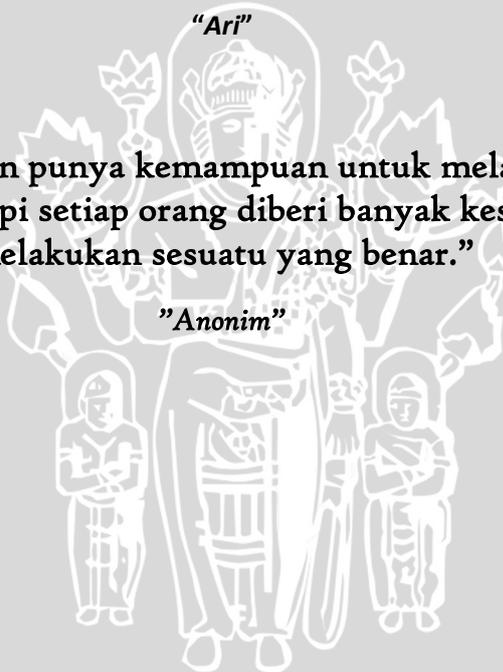
(Mario Teguh)

“Semakin banyak kita bersyukur dan bersabar, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan”

“Ari”

“Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.”

”Anonim”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Evaluasi Program Budidaya Minapolitan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang (Studi pada Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Ari Hardiansyah

NIM : 125030107111015

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 15 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Firda Hidayati, S.Sos, M.PA, D.PA
NIP. 19711013 200003 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 08 November 2016
Jam : 10.00
Skripsi atas nama : Ari Hardiansyah
Judul : Evaluasi Program Budidaya Minapolitan Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang (Studi Pada Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

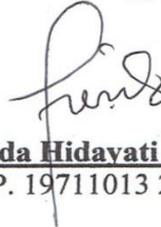
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Abdullah Said M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota,



Firda Hidayati S.Sos, M.PA, D.PA
NIP. 19711013 200003 2 001

Penguji I,



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Penguji II,



Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 November 2016



Nama : Ari Hardiansyah
NIM : 125030107111015

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku Kepada:

Kedua orang tuaku (Bpk. D'jai dan Ibu Sinarsih) Tercinta yang
selalu memberikan doa dan motivasi untuk
menyelesaikan skripsi ini

Kakakku “Azis Nurdiansyah”, dan Saudara kembarku “Arif
Ardiansyah”

Teman Seperjuangku “Anisa Rifqi Shofia”,



RINGKASAN

Ari Hardiansyah, 2016, **Evaluasi Program Budidaya Minapolitan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang. (Studi Pada Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)**, komisi pembimbing, Ketua: Dr. Abdullah Said, M.Si, Anggota: Firda Hidayati S.Sos., M.PA, D.PA, 223 Hal + xv

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kurangnya kontribusi sektor perikanan di Jawa Timur. Perikanan mempunyai peranan penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat terutama sumber protein dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding sumber protein hewani lainnya. Salah satu kabupaten di provinsi Jawa timur yang memiliki perhatian khusus dalam sektor perikanan air tawar adalah kabupaten Malang, tepatnya berada di kecamatan Wajak yang sekligus telah di ditetapkan sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Malang. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan wajak dan bagaimanakah evaluasi rencana strategis (Renstra) dinas perikanan dan kelautan periode 2011-2015 terkait program minapolitan budidaya di lihat dari evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Malang dengan situs penelitiannya di kantor DPK (Dinas Perikanan dan kelautan) kabupaten Malang, kantor BPP (Badan Penyuluh Pertanian) kecamatan Wajak, dan masyarakat pembudidaya ikan air tawar. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapang dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis data Cresswell (2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak dimulai karena adanya potensi air dikecamatan Wajak yang cocok untuk melakukan budidaya ikan air tawar, tapi masalah juga muncul disini karena kurangnya dukungan dari kualitas SDM yang kurang memadai sehingga implementasi program tersebut kurang berjalan secara maksimal. Sehingga evaluasi dari renstra tersebut diantaranya sudah dijalankannya Renstra terkait program minapolitan budidaya diantaranya sudah adanya kerjasama antar *stakeholder*, adanya sosialisai tentang ilmu perikanan dan berbagai strategi untuk mengelola isu strategis perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak selain adanya potensi SDA harus diimbangi dengan kualitas SDM. Selain itu juga lebih ditingkatkannya kerjasama dan kesolidan antar masyarakat budidaya, petugas BPP maupun DPK kabupaten Malang supaya program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak terlaksana dengan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Rencana Strategis, Evaluasi Program, Minapolitan Budidaya

SUMMARY

Ari Hardiansyah, 2016. **The Evaluation of Minapolitan Cultivation Program Based on Strategic Plan (Renstra) of The Official of Fishery and Marine of Malang Regency (Study at Freshwater Cultivation Center in Wajak District, Malang Regency)**. Promotor: Dr. Abdullah Said, M.Si. Co-Promotor: Firda Hidayati, S.Sos., M.PA, D.PA, 223 Pages + xv

Research background went from poor contribution of fishery sector in East Java Province. Fishery played important role for fulfilling nutrient necessities of people, especially the demand for protein at more affordable price if compared with another source of animal protein. There was a place in East Java Province deserving great attention for its potentialities in freshwater fishery. This place was Malang Regency, precisely in Wajak District that recently has been recognized as minapolitan region in Malang Regency. The formulated problems are: How is the implementation of cultivated minapolitan program in Wajak District? and How is the evaluation of strategic plan (Renstra) made by the Official of Fishery and Marine on period 2011-2015 concerning with cultivated minapolitan program if understood from evaluation result and strategic plan perspective.

Method of research was descriptive with qualitative approach. Location of research was at Malang Regency, whereas site of research involved the Official of Fishery and Marine (DPK) in Malang Regency, the Office of Farming Extension Agency (BPP) for Wajak District, and the communities of freshwater fishery cultivator. Data collection technique involved observation, interview and documentation. Instruments include self-author, interview manual, field note, and documentation. Data analysis technique was data analysis model of Cresswell (2012).

Result of research indicated that the implementation of cultivated minapolitan program in Wajak District was starting because there were water potentialities in Wajak District that remained suitable to freshwater fishery cultivation. The problem showed up because human resource quality was not supportive and less reliable, and therefore, the implementation of program was not maximizing. The evaluation of Strategic Plan of Cultivated Minapolitan Program includes the cooperation between stakeholders, the socialization about fishery science, and the various strategies to manage fishery strategic issues. Result of research showed that the implementation of cultivated minapolitan program in Wajak District, other than natural resource potentials, must be balanced with human resource quality. The cooperation and the solidity of cultivator communities, BPP officers and DPK of Malang Regency, should be improved such that cultivated minapolitan program in Wajak District could be made maximizing.

Keywords: Strategic Plan, Program Evaluation, Cultivation Minapolitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Program Minapolitan Budidaya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang (Studi pada Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). Pada skripsi ini mendeskripsikan Bagaimana Evaluasi Program Minapolitan Budidaya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Mintohadi, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, M.PA, D.PA selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan semangat, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ir. M. Nasri ABD. Wahid, M.Eng.S, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi terkait dengan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Wiwin, selaku Badan Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
11. Bapak Imam Tauhid selaku ketua Kelompok Tani Ikan “Sumber Miksur”
12. Bapak Zainal Abidin selaku Bendahara Kelompok Tani Ikan
13. Bapak Rudi selaku Anggota seksi Budidaya Kelompok Tani Ikan Mina Jaya
14. Kedua orang tua dan Kakak atas doa yang ikhlas, dukungan, nasehat, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Teman Seperjuangan Anisa Rifqi Shofia, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya selama ini.
16. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2012, wawan, tanzil, fahrur, Iman, mas dimas, Anifah, Sisti, ruri, devi, roro, nining, yudhis, Archan dll dan noes, isa selaku pembahas skripsi.
17. Teman-teman anggota Sanggar Seni Mahasiswa (SSM).
18. Teman-teman Kontrakkan, Wisnu, Iman, Pendik, Adi, Biko, Ari, Arif, Kikik, Bagas, Sowo.

Malang, 11 November 2016

Penulis

Ari Hardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	14
1. Pengertian Administrasi Publik.....	14
2. Peran Administrasi Publik.....	15
B. Konsep Implementasi Program.....	16
1. Pengertian Implementasi Program.....	16
2. Proses Implementasi.....	17
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	19
C. Evaluasi Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	21
2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan.....	23
3. Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	23
4. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan.....	24
D. Perencanaan Strategis.....	29
1. Definisi Perencanaan Strategis.....	29
2. Manfaat Perencanaan Strategis.....	30
3. Manajemen Strategis.....	33
4. Evaluasi dalam Perspektif Perencanaan Strategis.....	38
E. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	44
1. Renstra SKPD.....	45
2. Renja SKPD.....	47
F. Konsep Minapolitan.....	49



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Analisis Data.....	60

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	63
2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malang...	75
3. Gambaran Umum Kecamatan Wajak.....	81
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	84
1. Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang	85
2. Evaluasi Renstra DPK periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan dilihat dari Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis.....	109
C. Analisis Data Fokus Penelitian.....	152
1. Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang	153
2. Evaluasi Renstra DPK periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan dilihat dari Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis.....	166

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	202
2. Saran.....	204

DAFTAR PUSTAKA	206
-----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Peranan Wiayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2015 (Persen).....	4
2	Analisis Data Spiral	60
3	Peta Kabupaten Malang.....	64
4	Susunan Organisasi DPK Kabupaten Malang	80
5.	Peta Kecamatan Wajak.....	82
6	Tanda Daftar Kegiatan Perikanan.....	105
7	Kolam Budidaya yang Berlokasi di Pinggir Hutan.....	108
8	Koordinasi antara Perwakilan Pejabat DPK Kabupaten Malang dengan Pegawai BPP Kecamatan Wajak	111
9	Koordinasi antara Pegawai BPP kecamatan Wajak dengan Masyarakat Pelaku Minapolitan Budidaya.....	113



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Pertumbuhan PDB Triwulan Indonesia 2009-2015.....	3
2	Jumlah Benih Ikan di Tanam di Kolam menurut Jenis Ikan.....	7
3	Target Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Malang.....	7
4	Data Informan Penelitian.....	57
5	Pembagian Wilayah Administratif.....	69
6	Pelaksanaan Registrasi Penduduk di Kecamatan Wajak.....	83
7	Indikator Kependudukan Kecamatan Wajak.....	84
8	Potensi Irigasi di Wilayah Kecamatan Wajak.....	88
9	Perkembangan Jumlah Pembudidaya Ikan di Kecamatan Wajak.....	90
10	Jenis Bantuan untuk Budidaya Ikan yang Diterima oleh Kecamatan Wajak.....	102
11	Analisis SWOT Minapolitan Budidaya	120
12	Analisis SWOT Minapolitan Budidaya.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Dokumentasi.....	210
2	Peta Potensi Wilayah Kecamatan Wajak	211
3	Interview Guide.....	212
4	Tabel Produksi Perikanan Pokdakan di Kecamatan Wajak.....	218
5	Surat Rekomendasi Riset/Penelitian.....	222
6	Curriculum Vutae.....	223



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substansial ia adalah sama (Zauhar, 1996:11). Unsur-unsur administrasi ini sudah pasti ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia terutama dalam kegiatan berkelompok (bermasyarakat) dan sudah ada sejak manusia berada dalam masa *primitive*. Seiring dengan berkembangnya jaman serta sikap masyarakat yang semakin kompleks, unsur dan peranan administrasi menjadi bertambah canggih. Perkembangan administrasi kini menjadi sangat berarti dan selalu digunakan suatu organisasi (kumpulan manusia yang berkelompok untuk mencapai tujuan bersama) untuk mencapai tujuannya. Tujuan organisasi pada umumnya adalah untuk pembangunan. Administrasi yang efektif dan efisien merupakan jalan yang hakiki untuk mewujudkan tujuan pembangunan suatu organisasi misalnya Negara sebagai organisasi dalam skala yang besar.

Bagi suatu Negara, pembangunan merupakan suatu tujuan untuk masa depan suatu Negara yang terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari kondisi kehidupan yang kurang baik. Artinya, dalam pembangunan suatu negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat atau membangun kesejahteraan menuju keadaan yang lebih baik. Jones dalam Suharto (2006:3) mengemukakan



bahwa dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan yang utama melalui penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Cakupan pembangunan dalam konteks ilmu sosial dapat dikategorikan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia (masyarakat) dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama bagi negara-negara berkembang hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi yang mengakibatkan lambatnya negara tersebut untuk berkembang (Silalahi, 2012). Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu wacana yang sangat menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara termasuk perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dalam upaya mengelola pengangguran, inflasi, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Secara umum Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2009 hingga 2011 tetapi mengalami penurunan mulai tahun 2011 hingga 2015. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel Pertumbuhan PDB Triwulan Indonesia 2009-2015 (*Annual % Change*):

Tabel 1 Pertumbuhan PDB Triwulan Indonesia 2009-2015

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV
2015	4.71	4.67	4.73	5.04
2014	5.14	5.03	4.92	5.01
2013	6.03	5.81	5.62	5.72
2012	6.29	6.36	6.17	6.11
2011	6.45	6.52	6.49	6.50
2010	5.99	6.29	5.81	6.81
2009	4.60	4.37	4.31	4.58

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015

Pada table 1 dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2015 yang mengalami perlambatan menjadi 4,73 persen, jika dibandingkan dengan pertumbuhan di periode yang sama tahun lalu 4,92 persen. Banyak kalangan yang menilai perlambatan ekonomi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, mengingat semakin memburuknya ekonomi sehingga dapat memicu krisis. Meskipun demikian, para investor asing tetap optimistis dengan Indonesia dikarenakan secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap di atas pertumbuhan ekonomi dunia (Praditya, 2015). Pertumbuhan ekonomi tersebut diwarnai oleh faktor musiman pada lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 14,63 persen (BPS,2015). Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,30 persen, kemudian diikuti oleh pulau Sumatra sebesar 22,56 persen, pulau Kalimantan 8,26 persen, dan pulau Sulawesi 5,72 persen, dan sisanya 5,16 persen di pulau-pulau lainnya.



Gambar 1 Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2015 (Persen)

Sumber : BPS.2015

Salah satu Provinsi di Jawa yang menyumbang PDB cukup besar yaitu provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu provinsi yang memberikan andil besar dalam perekonomian nasional setelah provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data kinerja ekonomi, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 14,61 %. Angka ini terpaut 1,56% dibanding dengan kontribusi DKI Jakarta terhadap PDB nasional mencapai 16,17 %. Jawa timur menduduki nomor dua setelah DKI, karena semua kantor pusat perusahaan besar atau asing berada di Jakarta, sehingga pajak atau penghasilan masuk ke DKI meskipun operasionalnya berada di Jatim (Berita Moneter,2015).

Perekonomian Jawa Timur selama triwulan I/2015 tumbuh 5,18 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan pencapaian tahun lalu pada periode sama sebesar 5,90 persen. Struktur ekonomi Jatim pada triwulan I/2015 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha di antaranya kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,76 persen. Berikutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang sebesar 14,54 persen (BPS 2015). Minimnya

kontribusi sektor perikanan jawa timur sangat disayangkan. Seperti yang kita ketahui perikanan di provinsi jawa timur memang belum berkembang secara optimal terutama pada sektor perikanan darat. Banyak faktor internal maupun eksternal yang banyak menjadi penghambat. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang cukup pada sektor ini. Perikanan mempunyai peranan penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat terutama sumber protein dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding sumber protein hewani lainnya. Untuk sektor ikan hias mungkin dapat membantu dalam penghematan dan penghasil devisa negara sehingga dapat di manfaatkan untuk sektor lain yang lebih penting, dengan menghasilkan kualitas yang baik, tidak menutup kemungkinan untuk dapat menghasilkan devisa (Trias, 2012).

Pola pikir yang masih sangat tradisional sering menjadi kendala dalam perikanan rakyat tradisional dalam manajemen pengelolaan perikanan, bahkan yang cukup mengherankan hal ini juga masih menjadi pedoman pelaku perikanan yang sudah boleh di golongan sebagai tingkatan industri. Selain pola pikir yang masih tradisional, minimnya pengetahuan masalah perikanan, sulitnya menerima inovasi baru, dan tetap mempertahankan pola pikir perikanan tradisional dalam pemeliharaan ikan menjadi faktor penghambat utama dalam sektor ini. Banyak sekali asumsi - asumsi yang keliru berkembang dalam masyarakat perikanan yang kurang tepat, tetap di pertahankan. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan tentang bagaimana memelihara ikan yang berdasarkan pengetahuan modern serta keangkuhan dan keteguhan mempertahankan pengetahuan yang hanya didasarkan anjuran para pendahulu ataupun para senior.

Semakin memburuknya kondisi alam dan pertambahan populasi manusia pada era globalisasi, sudah saatnya masyarakat perikanan untuk mulai menapaki era perikanan modern yang lagi tidak bergantung pada alam sepenuhnya yang disini adalah perikanan laut tetapi juga melihat potensi yang ada dalam sektor budidaya ikan air tawar. Kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir sama dengan ikan air laut, sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jumlah cukup. Tingginya kandungan protein dan vitamin membuat ikan yang mudah dibudidayakan ini sangat membantu pertumbuhan anak-anak balita (Nirmala, 2003). Salah satu kabupaten di provinsi Jawa timur yang memiliki perhatian khusus dalam sektor perikanan air tawar adalah kabupaten Malang, tepatnya berada di kecamatan Wajak. Kecamatan Wajak ditetapkan sebagai kawasan inti (*minapolis*), selain itu Kec. Gondanglegi, Kec. Dau, Kec. Wonosari, Kec. Sumberpucung, Kec. Kepanjen, dan Kec. Turen ditetapkan sebagai kawasan penyangga (*hinterland*).

Kecamatan wajak di Kabupaten Malang merupakan salah satu kecamatan yang dibina oleh dinas Perikanan dan Kelautan dalam bidang Budidaya Ikan Air Tawar yang dikelola oleh kelompok tani (Direktorat Prasarana, dan Sarana Budidaya, 2014). Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 180/399/KEP/421.013/2008 dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 180/340/KEP/421.013/2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas perikanan dan kelautan provinsi Jawa Timur luas kolam tersebut jika dilihat secara keseluruhan atau total dari kabupaten Malang dan Kota Malang yang

memiliki luas kotor dan bersih yaitu masing-masing 46,67 Ha (Statistik Perikanan Budidaya Jawa Timur 2013). Selain itu kolam tersebut juga di kelola dengan ditanami benih ikan pada kolam dan apabila di golongan berdasarkan jenis ikan sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Benih ikan yang Ditanam di Kolam Menurut Jenis Ikan

Kabupaten/Kota	Malang	
Jumlah	577.784,86	
Jenis Ikan	Ikan Mas (1-5 Cm)	279,69
	Ikan Mas (5 Cm)	-
	Tawes	-
	Nila	1.809,42
	Gurami	-
	Mujair	111,75
	Lele	575.456,56
	Patin	66,69
	Sidat	-
	Bawal	-
	Lain-lain	60,75
	Katak	-
	U. Galah	-

Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Jawa Timur 2013

Tabel di atas menunjukkan budidaya Ikan Air Tawar yang dikelola oleh kelompok tani adalah dari jenis Ikan mas, Nilai, Mujair, Lele, Patin, Sidat, Bawal, dan Lain-lain. Sedangkan komoditas unggulannya yaitu ikan nila, dan ikan lele sebagaimana terlihat dalam tabel target produksi budidaya Kabupaten Malang sejak tahun 2011-2014.

Tabel 3 Target Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Malang

No	Komoditas	Tahun				Kenaikan (%/th)
		2011	2012	2013	2014	
1	Nila	6.500	7.500	8.750	10.625	17,83
2	Lele	4.125	4.350	4.500	4.575	3,52

Sumber :Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya - DJPB

Pemerintah Kabupaten Malang saat ini terus berupaya untuk memperluas area pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program mina tani yaitu program Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP) dengan bidang usaha Pembenihan dan Pembesaran ikan air tawar dengan tujuan melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembenihan dan pembesaran dan mempunyai komitmen membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan tercapainya harapan pemerintah dibidang perikanan, juga rasa tanggung jawab berbuat kepada masyarakat di sejumlah kawasan pertanian padi (sawah) yang ada di wilayah itu. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi pengembangan budi daya ikan air tawar mulai dari produktivitasnya hingga serapannya di pasar. Kegiatan minapolitan di kecamatan Wajak sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan akan dikembangkan ke beberapa daerah lain yang berapa di kabupaten Malang. Dengan perencanaan, pengelolaan serta pemasaran yang baik dari budidaya ikan air tawar pasti tujuan yang diinginkan akan tercapai. Melalui produktivitas ikan budidaya yang melimpah, berarti masyarakat ikut serta menyukseskan program ketahanan pangan, sebab ikan juga termasuk dalam kategori pangan bahkan sangat bagus untuk kecerdasan anak-anak (Sukarelawati, 2015).

Perkembangan dari budidaya ikan sangat tergantung dari peran Pemerintah. Pihak pemerintah daerah kabupaten Malang beserta dinas perikanan dan kelautan yang memberikan andil besar dalam proses pembudidayaan tersebut. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) dari satuan kerja perangkat daerah dinas perikanan dan kelautan dituntut untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Renstra merupakan *road map* yang membawa sebuah organisasi menuju kepada kondisi yang dicita-citakan akan terwujud lima atau sepuluh tahun ke depan. Penyusunan perencanaan strategis menjadikan sebuah organisasi lebih terencana dan sistematis dalam mencapai tujuannya. Penyusunan Rencana strategis di sektor perikanan yang tepat dan memperhitungkan berbagai peluang, tantangan dan masalah baik internal maupun eksternal menjadikan suatu instansi pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan bisa melaksanakan tugas, fungsi serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis disektor perikanan sangat diperlukan di era globalisasi. dan mempunyai pengaruh besar pada peningkatan hasil daripada sektor perikanan di Kabupaten Malang dalam menghadapi globalisasi, karena proses penyusunan rencana strategis merupakan sebuah langkah untuk menata dan mempersiapkan sebuah organisasi dapat mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka, dinas perikanan dan kelutan harus mampu membaca tanda-tanda jaman, menganalisis secara kritis dan menjadikannya bagian dalam menentukan langkah-langkah strategis menuju masa depan yang lebih baik. Dinas perikanan dan kelautan memiliki fungsi strategis karena dari sanalah akan dihasilkan produk-produk hasil perikanan yang berkualitas dan nantinya mampu bersaing pada era globalisasi. Tetapi meskipun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang sudah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun sekali bukan berarti terlepas dari hambatan dalam proses pelaksanaannya, khususnya dalam bidang pembudidayaan ikan air tawar. Hambatan yang terjadi dalam proses budidaya di

kecamatan wajak ini terkait masalah keamanan karena ada beberapa lokasi budidaya yang terletak di area pinggiran hutan, selain itu juga terkait masalah anggaran.

Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang merupakan suatu Dokumen yang nantinya dengan disusun Renstra tersebut mampu menjelaskan arah pelaksanaan misi, di tetapkan sesuai tugas, fungsi dan peranan organisasi. Sehingga dari sini, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Budidaya Minapolitan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Malang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak?
2. Bagaimanakah Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan di lihat dari evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak
2. Untuk mengevaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan di lihat dari evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi peneliti tentang bagaimana pelaksanaan program budidaya minapolitan berdasarkan Renstra yang sudah ada dan evaluasi apa yang didapatkan serta menerapkan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian yang di dapat dari masa perkuliahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi realita yang ada khususnya terkait dengan implementasi program budidaya minapolitan di kecamatan Wajak dan melihat Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan periode 2011-2015 terkait program budidaya minapolitan di lihat dari evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis,

sehingga masyarakat umum khususnya dan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dapat tambahan informasi.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi terkait implementasi program budidaya minapolitan di kecamatan Wajak, serta menjadi evaluasi bagi pelaksanaan Renstra yang dilakukan khususnya di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam memberikan gambaran umum secara keseluruhan mengenai isi dari penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas beberapa teori yang digunakan yang kaitannya dengan materi penulisan skripsi, mengenai Administrasi Publik, Konsep Implementasi Program, Evaluasi Kebijakan Publik, Perencanaan Strategis, Rencana

Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Konsep Minapolitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode dalam melakukan penelitian dan bagaimana penulis mengelola serta menganalisis data yang diperoleh. Dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan dalam perumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna melakukan perbaikan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengelola organisasi publik. Menurut pendapat Keban (2004:6)

Administrasi Publik yaitu :

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Pengertian lain dari Siagian (2008:2) mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi publik menurut Soempomo dalam (Thoah,2008:44) adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah negara sebagian dari pemerintah eksekutif baik dipusat maupun di daerah yang tugas dan kegiatannya terutama melaksanakan kebijakan pemerintah. Dimana pandangan yang lebih menekankan peran Negara sangat dominan dan terpusat dalam mengelola pemerintah dan mengabaikan masyarakat atau publik untuk mengambil peran dalam

mengelola pemerintah, meskipun dalam pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi tujuan utama.

Beberapa definisi Administrasi publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya merupakan pelaksanaan pembangunan dan mengelola serta memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan yang dilakukan minimal dua orang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Peran Administrasi Publik

Peran administrasi Publik sangat penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan pemerintah maupun organisasi publik. Thoha (2002 1:104) memandang bahwa studi mengenai kebijaksanaan dalam administrasi publik menjadi sangat populer, akan tetapi sebagai halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Sejalan dengan itu para peneliti mulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi lainnya.

Pendapat lain datang dari Hebert A. Simon dikutip oleh Thoha (2008:105) mengemukakan bahwa studi tentang kebijakan adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu sosial, dan analisis tentang kebijakan dipandang sebagai bidang studi yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial. Pemerintah dan masyarakat menjalankan pengelolaan sumberdaya yang disertai dengan tanggung jawab publik dan pengawasan, sehingga perlu

transparansi dalam mengelola sumber daya pemerintah daerah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya adalah Pemberdayaan masyarakat sehingga dengan pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya agar harapan pemerintah dan masyarakat dapat terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik sangat penting dan diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya, sesuai dengan tujuan utama administrasi publik yaitu meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara atau daerah. Sjamsiar sjamsuddin, (2010) sebagai salah satu bentuk pencerminan Negara demokrasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, maupun program-program. Masyarakat adalah faktor terpenting dalam proses pengelolaan pengembangan sumber daya, karena tujuan pemerintah tidak akan berjalan lancar tanpa keikutsertaan masyarakat.

B. Konsep Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik ataupun dalam suatu program. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata”. Sementara itu, Grindle

dalam Winarno (2014: 149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum implementasi adalah membentuk suatu ikatan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan, implementasi dapat diartikan sebagai suatu tahap setelah kebijakan dibuat dengan merealisasikan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat untuk mendapatkan hasil dan dampak secara nyata dari kebijakan yang telah dibuat. Pengertian di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa implementasi dari suatu kebijakan dapat berwujud dengan pelaksanaan suatu program.

Program yang dijadikan sebagai implementasi dari kebijakan itu sendiri berisi misi, strategi, rencana dan sebuah program kerja yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau pun tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2009: 156-157) yang mengatakan bahwa misi, strategi, rencana dan program kerja yang dirumuskan dengan teori sedemikian rupa, dapat tidak dilaksanakan secara efisien dan efektif karena berbagai faktor yang tidak terduga dalam proses pelaksanaan.

2. Proses Implementasi

Proses implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program (Wibawa, 1994: 16). Menurut Casley dan Kumar dalam Wibawa (1994: 16), terdapat proses implementasi sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Proses ini dilakukan dengan cara membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola kemudian memisahkan permasalahan-permasalahan tersebut dari gejala yang mendukung.
- b. Menentukan faktor-faktor dari masalah yang dimaksud. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkuat hipotesis.
- c. Mengkaji hambatan dari keputusan yang telah dibuat. Proses ini dilakukan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang lain
- d. Mengembangkan solusi-solusi alternatif
- e. Memperkirakan solusi yang paling layak. Proses ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria yang jelas dan diterapkan untuk menguji kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif yang diberikan
- f. Memantau umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan. Proses implementasi dapat dinilai dengan keefektifan dari implementasi itu sendiri. Menurut Lan dalam Rewansyah (2010: 57) menyatakan bahwa efektifitas implementasi dapat dilihat melalui:
 - 1) Output kebijakan oleh badan atau pihak pelaksana.
 - 2) Pemenuhan atau ketaatan kelompok sasaran kebijakan terhadap output kebijakan.
 - 3) Dampak nyata dari output kebijakan.
 - 4) Dampak output kebijakan berdasarkan persepsi kelompok sasaran.

5) Penyempurnaan kebijakan publik

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dikelompokkan oleh Conyers dalam Wahyuni (2012: 48-51) mengelompokkan faktor yang mempengaruhi proses implementasi dalam empat jenis faktor utama, yaitu:

a. *Nature of the Planning Process*

Faktor ini merupakan pendekatan baru yang memandang persiapan dan implementasi rencana dipandang sebagai proses siklus yang terus menerus. Persiapan rencana dalam hal ini memiliki dua keunggulan, yaitu implementasi rencana dilakukan secara logis mulai dari tahap awal identifikasi dan penilaian program hingga pada alternatif dalam mengambil tindakan serta pentingnya pemantauan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan dan adanya umpan balik untuk memperoleh informasi ke dalam proses pengambilan keputusan.

b. *Organization of Planning and Implementation*

Hubungan timbal balik dari berbagai pihak baik dalam persiapan atau perencanaan dapat mengakibatkan banyak masalah.

c. *Content of Plans*

Keberhasilan implementasi tergantung pada cara dimana rencana disajikan. Perlu sebuah rencana yang realistis dalam hal sumber daya yang tersedia untuk implementasi, kapasitas politik, dan administrasi yang mendukung.

d. *Management of the Implementation Process*

Implementasi meliputi penggerakan, pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan yang ditentukan sesuai dengan rencana. Sumber daya ini dapat meliputi keuangan, tenaga kerja dan peralatan.

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses implementasi juga disampaikan oleh Rewansyah (2010: 54), yang menyebutkan terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi. Pengaruh yang disebabkan dapat mendorong ataupun menghambat proses implementasi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah (1) *Understanding*, faktor ini dapat dilakukan melalui sosialisasi agar kebijakan dapat diketahui dengan baik, dimengerti dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan; (2) *Communication*, faktor ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang bersifat persuasif dengan pemilihan media yang tepat, terjangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat; (3) *Resources*, faktor ini dapat berupa sumber daya manusia atau sumber daya yang lain sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi; (4) *Dispotition*; (5) *Bureaucratic Structur*, struktur birokrasi berperan dalam mempercepat proses implementasi; serta (6) *Problem and Prospect*, faktor lain adalah terkait permasalahan di lapangan dan prospek yang dapat diperhitungkan.

Analisis implementasi program yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori campuran. Teori pertama yang peneliti gunakan adalah teori dari Casley dan Kumar yang menyebutkan

bahwa dalam proses implementasi program terdapat proses identifikasi masalah yang harus dilakukan. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya identifikasi masalah yang dilakukan oleh pelaksana program. Teori kedua yang peneliti gunakan adalah teori dari Siagian yang menyebutkan adanya strategi yang harus termuat dalam implementasi program. Teori ketiga yang peneliti gunakan adalah teori dari Rewansyah yang menyebutkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat minimnya identifikasi masalah yang dilakukan, beberapa strategi yang digunakan hingga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Penemuan tersebut peneliti nilai relevan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Salah satu cabang bidang kajian dalam studi analisis kebijakan publik adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. (Abdul Wahab, 1990 : 47-48), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (1986), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) dapat dibagi menjadi 2 yaitu *non implementation* (tidak terimplementasi), dan *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan

apa yang di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya: pelaksanaannya jelek (*bad execution*),kebijakannya sendiri itu memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (*bad luck*). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan” (Abdul Wahab, 1997 : 62). Evaluasi Kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara *policy impact/outcome* dan *policy output*. *Policy Impact/outcome* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan *Policy output* ialah dari apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 1986 : 114-115). Dari pengertian tersebut maka dampak evaluasi kebijakan mengacu pada adanya perubahan-perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu implementasi kebijakan.

2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Renstra, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Rossi dan Freeman (dalam William Dunn, 2000: 36):

Mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

4. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 184):

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

b. Efisiensi

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 185):

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 186):

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa

sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 187):

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 189):

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002: 184):

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

D. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan bagian daripada proses perencanaan. Oleh karena itu lebih ditekankan kepada pemilihan strategi yang akan digunakan dalam suatu organisasi baik organisasi Publik maupun organisasi Bisnis. Ketepatan dalam memilih strategi yang digunakan turut menentukan keberhasilan dari organisasi dan tujuan yang akan dicapai.

1. Definisi Perencanaan Strategis

Menurut Olsen dan Eadge dalam Bryson (2007:4-5), mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu, bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Melalui perencanaan strategi maka, suatu organisasi dapat memperoleh strategi-strategi baru yang akan digunakan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis dalam sektor publik terutama diterapkan untuk tujuan militer dan praktik penyelenggaraan Negara (*statecraft*) dalam skala yang besar (Quin, 1980 ;bracker, 1980) dalam Bryson (2007:5), secara khusus perencanaan strategis dapat diterapkan kepada :

- a. Lembaga publik, Departemen, atau Divisi Penting dalam organisasi;
- b. Pemerintah umum, seperti Pemerintah *city*, *country* atau Negara bagian;
- c. Organisasi Nirlaba yang pada dasarnya memberikan pelayanan
- d. Fungsi khusus yang menjembatani batasan-batasan organisasi dan Pemerintah, seperti transportasi, kesehatan, atau pendidikan;
- e. Seluruh komunitas, Kawasan Perkotaan atau metropolitan, Daerah\atau Negara Bagian.

2. Manfaat Perencanaan Strategis

Sebuah perencanaan, perencanaan strategis memiliki manfaat yang cukup besar bagi organisasi publik. Melalui perencanaan strategis dapat membuat organisasi publik lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan. Seperti dijelaskan oleh beberapa penulis Steiner, dkk dalam Bryson (2007:12-13), bahwa perencanaan strategis dapat membantu suatu organisasi yaitu sebagai:

- a. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif;

Artinya berfikir secara keseluruhan dengan mempelajari suatu kondisi yang nyata. Dengan mengembangkan tindakan yang strategis, maka situasi permasalahan dapat diatasi.

- b. Memperjelas arah masa depan;

Dengan meninjau kembali tujuan-tujuan yang telah dicapai sebelumnya dan tujuan-tujuan yang belum tercapai. Sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kelemahan yang harus diperbaiki dan kekuatan yang harus dipertahankan.

- c. Menciptakan Prioritas;

Menciptakan prioritas yang akan membuat suatu organisasi lebih fokus terhadap tujuan yang akan dicapai dengan memahami isu-isu strategis yang sedang berkembang.

- d. Membuat keputusan sekarang dan mengingat konsekuensi masa depan;

Keputusan yang telah diambil sekarang sebaiknya telah memperhitungkan konsekuensi yang akan ditemukan di masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang akan dihadapi oleh organisasi.

- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan;

Dalam mengambil keputusan, harus memahami latar belakang dari situasi yang mau diatasi. Dengan adanya alasan yang kuat, dapat membentuk suatu pemikiran yang kuat bagi pembuat keputusan, agar dapat mengembangkan strategi yang akan dicapai dengan mempertimbangkan tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

- f. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah control organisasi;

Keleluasaan yang dimaksud adalah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dari atas kebawah. Koordinasi dengan menciptakan suatu komunikasi yang baik antara pusat dan daerah akan memudahkan control dalam pengembangan organisasi.

- g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi;

Dalam membuat suatu keputusan, sebelumnya perlu untuk memahami hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Berdasarkan pemahaman yang ada, maka keputusan yang diambil akan mengarah

kepada pemenuhan kebutuhan organisasi dalam menjalankan arah maupun kebijakan yang telah ditentukan.

h. Memecahkan masalah utama organisasi;

Masalah akan melemahkan kinerja dari organisasi. Masalah dapat ditemukan didalam organisasi internal oleh individu maupun kelompok, maupun dari luar organisasi eksternal seperti perubahan lingkungan seiring dengan perkembangan dunia.

i. Memperbaiki kinerja organisasi;

Kinerja dari suatu organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi. Dengan memperhatikan kualitas sumberdaya manusia dalam organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah mampu bersaing dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki. Sumberdaya yang kompetitif akan memberikan pengaruh yang positif dan menjadikan organisasi lebih memiliki karakter.

j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif;

Lingkungan organisasi yang cenderung berubah karena pengaruh ekonomi, sosial, politik maupun teknologi, akan menguji kesiapan organisasi. Apabila suatu organisasi tidak cepat tanggap dengan perubahan lingkungan, maka sulit untuk bersaing di masa sekarang dan masa yang akan datang.

- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian;

Keahlian merupakan prioritas dari organisasi. Seseorang yang professional akan membawa organisasi kedalam suatu perubahan kearah yang lebih baik. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu kerjasama antar kelompok yang ada didalam suatu organisasi perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang.

3. Manajemen Strategis

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (david, 2002:5). Menurut Dirgantoro (2001:9) manajemen strategis sendiri memiliki banyak definisi lain, beberapa diantaranya adalah :

- a. Suatu proses yang berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat *match* dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsive terhadap perubahan-perubahan didalam lingkungannya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
- b. Kombinasi ilmu dan seni untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang bersifat cros-fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.
- c. Usaha untuk mengembangkan kekuatan yang ada di perusahaan untuk menggunakan atau menangkap peluang bisnis yang muncul guna

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang ditentukan.

Sejalan dengan itu William dalam Amirullah dan Sri (2002:4) mengemukakan bahwa manajemen strategis adalah suatu tindakan managerial yang mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan di dalam mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Dari beragam definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah sebuah proses yang dilakukan untuk dapat menangkap peluang yang ada disekitar organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut david (2002:6) Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang, perencanaan jangka panjang, sebaliknya mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang dimasa yang akan datang. Secara garis besar terdapat proses manajemen strategic yang terdiri dari lima tahapan, dimana seperti yang dikemukakan oleh Amirullah dan Sri (2002:10) yaitu : analisis lingkungan, penetapan misi dan tujuan, perumusan strategis, pilihan dan penerapan strategi serta evaluasi atau pengendalian strategi. Masing-masing bagian dari proses manajemen strategic memiliki ketergantungan satu sama lainnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, konsep manajemen strategis memiliki banyak perkembangan dan prosesnya semakin dimodifikasi untuk memperoleh strategi masa depan yang benar-benar sesuai untuk sebuah

perusahaan. Pendapat lain tentang langkah manajemen strategis dikemukakan oleh Suyanto (2007:10-26) dimana ada 7 langkah manajemen strategis antara lain.

a. Visi, misi Bisnis

Visi merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau tujuan perusahaan. Visi adalah tujuan unik perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Secara ringkas visi menguraikan produk, pasar dan teknologi yang ditetapkan perusahaan, dan ini dilakukan sedemikian sehingga mencerminkan nilai dan prioritas dari pengambil strategic perusahaan. Sedangkan misi merupakan operasionalisasi dari visi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari tiga perangkat pertama faktor lingkungan jauh yang bersumber dari faktor ekonomi, sosial-budaya, teknologi, demografi, politik-hukum, dan ekologi. Kedua faktor lingkungan industry yang terdiri dari persaingan diantara anggota industry, hambatan masuk, produk substitusi, daya tawar pembeli dan daya tawar pemasok. Ketiga faktor lingkungan operasional meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi persaingan perusahaan, yaitu posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor, dan tenaga kerja.

c. Analisis Lingkungan Internal

Analisis internal perusahaan dikenal dengan nama analisis profil perusahaan. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis ini menggambarkan kekuatan perusahaan, baik segi kuantitas maupun kualitas pemasaran, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, operasi, keuangan, manajemen dan organisasi. Kekuatan dan kelemahan organisasi dan manajemen dapat diperoleh dari struktur organisasi, citra dan prestasi perusahaan, cacatan perusahaan dalam mencapai sasaran, komunikasi dalam organisasi, system pengendalian organisasi keseluruhan, budaya dan iklim organisasi, penggunaan system efektif dalam pengambilan keputusan, system perencanaan strategis, sinergi dalam organisasi, system informasi yang baik dan manajemen kualitas yang baik.

d. Merumuskan Tujuan/ Sasaran

Selanjutnya perusahaan merumuskan sasaran/tujuan. Sasaran perusahaan dapat berupa profisibilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia, hubungan antar karyawan dan tanggung jawab sosial. Sasaran menjelaskan tujuan-tujuan yang spesifik dalam jumlah dan waktu. Dengan demikian sasaran dapat memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

e. Merumuskan Strategi

Strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. Setiap usaha harus merancang strategi untuk mencapai sasarannya karena sasaran menunjukkan apa yang ingin dicapai perusahaan. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

f. Implementasi Strategis

Strategi yang tanpa didukung dengan matang dan jelas mungkin tidak bermanfaat jika perusahaan gagal melaksanakannya dengan cermat.

g. Pengendalian strategi

Pengendalian strategi dilaksanakan untuk mengamati hasil dan terus memantau perkembangan terbaru yang terjadi dilingkungan internal dan eksternal. Dimana dapat diperkirakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan bersifat stabil dari tahun ketahun maupun yang perlahan-lahan cepat berevolusi. Perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi pelaksanaan program, strategi, atau bahkan sasarannya jika perubahan lingkungan cepat itu terjadi.

Berbeda dari pendapat Bryson (2007) tentang manajemen strategis, membuat proses manajemen strategis yang tidak hanya dapat digunakan pada organisasi bisnis saja, tetapi dapat diterapkan pada organisasi nirlaba, konsep ini lebih dikenal sebagai perencanaan strategis. Ada delapan langkah yang

lebih tertib, bersifat hati-hati, dan partisipatif dalam proses perencanaan strategis menurut Bryson (2007:55).yaitu;

- a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
- b. Memperjelas atau mengidentifikasi mandate Organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- d. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.
- e. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Delapan langkah tersebut harus mengarah kepada tindakan, hasil dan evaluasi. Dan tindakan, hasil, dan penilaian evaluative harus muncul pada setiap langkah dalam proses. Dengan demikian implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dari proses dan terus menerus.

4. Evaluasi dalam Perspektif Perencanaan Strategis

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut mempunyai langkah atau proses yang berbeda, namun bila dikaji lebih lanjut, hampir memiliki kesamaan. Dari pendapat para ahli perencanaan dan manajemen strategis tersebut, penulis menarik kesimpulan langkah-langkah strategis untuk mengevaluasi program-program atau kegiatan budidaya ikan air tawar oleh petani ikan air tawar dalam rencana setrategis antara lain menurut Bryson (2007:55).yaitu;

a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

Pada langkah ini merupakan langkah menegosiasikan kesepakatan untuk menyelenggarakan perencanaan strategis dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinions leaders) dan para stakeholder baik internal maupun eksternal. Dukungan dan komitmen mereka merupakan hal yang sangat penting jika perencanaan strategis ingin berhasil. Keterlibatan orang-orang penting di luar organisasi adakalanya sangat krusial jika dalam implementasinya melibatkan banyak pihak di luar organisasi.

Dalam tahap inilah dibentuk kelompok pemrakarsa, yang salah satu tugasnya menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong orang-orang penting pembuat keputusan. Tugas berikutnya adalah menetapkan orang, kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategis ini. Selanjutnya dalam kesepakatan ini harus mencakup: maksud upaya perencanaan; langkah-langkah yang dilalui dalam proses; bentuk dan jadwal pembuatan laporan; peran, fungsi dan keanggotaan suatu kelompok atau komite yang berwenang mengawasi upaya tersebut; peran, fungsi dan keanggotaan tim perencana strategis; dan komitmen sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan perencanaan strategis.

b. Memperjelas atau mengidentifikasi mandate Organisasi.

Mandat formal dan mandat informal yang berada pada suatu organisasi merupakan keharusan yang dihadapi. Mandat formal adalah

tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan, piagam, pasal-pasal ataupun perjanjian-perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan. Mandat informal adalah norma-norma yang menjadi pegangan beroperasinya organisasi yang tidak kalah mengikatnya.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

Misi organisasi, yang berkaitan erat dengan mandat yang harus dilaksanakan, merupakan deskripsi tentang apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka mengemban mandat organisasi. Rumusan misi harus dapat menjawab enam pertanyaan:

- 1) Siapakah kita ini sebagai organisasi (komunitas)?
- 2) Secara umum, kebutuhan dasar sosial dan atau politik apa yang akan organisasi kita penuhi?
- 3) Secara umum, bagaimana kita bekerja untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan-kebutuhan di atas?
- 4) Bagaimana kita harus memberikan respon terhadap stakeholder kunci?
- 5) Apa filosofi dan nilai-nilai inti kita? (menentukan integritas organisasi)
- 6) Apa yang membuat organisasi kita unik/beda dengan organisasi yang lain?

Misi harus dirumuskan melalui diskusi yang panjang dengan melibatkan para stakeholder, sehingga diperoleh rumusan yang komprehensif. Nilai-

nilai dimaksud dalam hal ini adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara yang menjadi spirit organisasi dalam melaksanakan fungsinya, misal kejujuran, demokratis, keterbukaan/transparansi, tanggung jawab, dsb.

d. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.

Menilai lingkungan eksternal adalah tindakan mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang diluar kontrol organisasi, meliputi kecenderungan politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi (PEST), kelompok masyarakat yang harus dilayani, dan pesaing (competitor). Anggota-anggota majelis sekolah yang berasal dari luar sekolah, misal asosiasi profesi, praktisi industri pada umumnya lebih tajam dalam menilai faktor eksternal.

e. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan

Menilai lingkungan internal adalah upaya mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Kita dapat mengenalinya dari sumber daya (inputs), strategi yang dijalankan sekarang (process), dan kinerja (outputs).

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.

Mengidentifikasi isu merupakan langkah yang sangat penting guna mengetahui persoalan kritis yang sesungguhnya dihadapi organisasi. Dengan mempertimbangkan mandat, misi dan nilai, kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal akan dapat kita

identifikasi persoalan kritis organisasi. Pernyataan isu strategis harus mengandung tiga unsur: Pertama, isu harus disajikan dengan ringkas, cukup satu paragraf dan disajikan dalam kalimat tanya. Kedua, faktor yang menyebabkan sesuatu isu menjadi persoalan kebijakan penting harus didaftar, yang mencakup aspek mandat, misi, nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Ketiga, konsekuensi kegagalan dalam menghadapi isu harus merupakan taruhan hidup dan matinya organisasi.

Ada tiga pendekatan dasar untuk mengenali isu strategis: pendekatan langsung (direct approach), pendekatan sasaran (goals approach) dan pendekatan visi keberhasilan (vision of success). Pendekatan langsung, merupakan proses mengidentifikasi isu dengan cara meruntut dari uraian mandat, misi dan analisis SWOT, sehingga dirumuskan isu strategis organisasi. Pendekatan ini akan sangat baik apabila tidak ada kesepakatan sasaran sebelumnya, tidak ada visi keberhasilan dan tidak ada otoritas hirarkhi yang memaksakan sasaran. Pendekatan ini juga amat baik untuk menghadapi lingkungan yang sangat bergolak. Pendekatan sasaran, lebih sejalan dengan teori perencanaan konvensional, yang menetapkan bahwa organisasi harus menetapkan sasaran dan tujuan bagi dirinya, kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan visi keberhasilan, dalam pendekatan ini organisasi mengembangkan suatu gambar yang terbaik atau ideal mengenai dirinya sendiri di masa depan sebagai organisasi yang sangat berhasil mewujudkan misinya. Sehingga isu strategis sebagai diskripsi

tentang bagaimana organisasi harus beralih dari jalannya sekarang, menuju bagaimana organisasi akan memandang dan berjalan sesuai dengan visinya.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.

Strategi dapat berbeda-beda karena kerangka tingkat, fungsi dan waktu. Pengembangan strategi dimulai dengan identifikasi alternatif praktis, dan impian atau visi untuk memecahkan isu strategis. Selanjutnya, kita memerinci hambatan yang kemungkinan dihadapi untuk mencapai alternatif, impian atau visi tersebut.

Setelah identifikasi alternatif, impian atau visi bersama-sama dengan hambatan tersusun, langkah berikutnya kita mengembangkan usulan pokok untuk mencapai alternatif, impian atau visi secara langsung atau tidak langsung dengan cara mengatasi hambatan. Setelah usulan utama diajukan, kemudian kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam dua hingga tiga atau empat/lima tahun mendatang. Terakhir kita menyusun program kerja yang terperinci untuk setiap tahunnya. Strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, secara teknis strategi harus dapat bekerja (dilaksanakan) untuk menghadapi isu strategis; kedua, secara politis dapat diterima oleh para

stakeholder kunci; dan ketiga, strategi harus menjadi etika, moral dan hukum organisasi.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Deskripsi inilah yang disebut “Visi Keberhasilan” organisasi.

Secara khusus yang termasuk dalam deskripsi ini adalah misi organisasi, strategi dasarnya, kriteria kinerjanya, beberapa aturan keputusan penting, dan standar etika yang diharapkan oleh seluruh pegawai. Visi keberhasilan harus singkat – tidak lebih dari beberapa halaman – dan memberi ilham. Orang-orang diilhami oleh visi yang jelas dan kuat yang disampaikan dengan penuh keyakinan. Jadi, visi itu menfokus kepada masa depan yang lebih baik, mendorong harapan dan impian, menarik nilai-nilai umum, menyatakan hasil yang positif, menekankan kekuatan kelompok yang bersatu, mengemukakan antusiasme dan kegembiraan.

E. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan tentang tata cara perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yaitu dokumen perencanaan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk periode 5 tahun,

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional mengamanatkan agar system perencanaan dapat berjalan beriringan sehingga dapat terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional secara umum sampai pada Perencanaan Pembangunan secara khusus. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional maka ditetapkanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang terdiri dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra dan Renja merupakan dua dokumen penting yang dimiliki oleh SKPD. Renstra merupakan dokumen yang memuat rencana strategis SKPD selama lima tahun, sedangkan Renja merupakan dokumen yang memuat rencana kerja SKPD yang disusun satu tahun sekali. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 merupakan dasar dari penyusunan Renstra maupun Renja sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 yang memuat tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa Rencana strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk periode lima tahunan. Dokumen Rencana Strategis yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Perikanan dan kelautan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang yang telah ditetapkan. Adapun tahapan perumusan rancangan Rencana Strategi SKPD yaitu:

a. **Persiapan Penyusunan Renstra SKPD**

Persiapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari perumusan rancangan dan penyajian rancangan. Untuk tahapan perumusan rancangan berpedoman pada hasil penelaahan dari rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian dapat digunakan sebagai referensi untuk penyajian rancangan Renstra SKPD berdasarkan informasi maupun gambaran yang diperoleh dari rencana yang telah dilakukan sebelumnya, maupun rencana yang dirancang untuk kemudian hari.

b. **Penyusunan Rancangan Renstra SKPD**

PERMENDAGRI No.54 tahun 2010 pasal 94 ayat (2) menjelaskan bahwa rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD. Dengan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dapat saling bertukar pendapat mengenai program dan kegiatan yang akan dijalankan.

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD

Penyusunan rancangan akhir merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertegas tujuan dan sasaran dalam pembangunan. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian setiap SKPD dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

d. Penetapan Renstra SKPD

Rencana SKPD akan ditetapkan setelah penyusunan akhir dilakukan. Pada tahapan penetapan Renstra SKPD akan disahkan program dan kegiatan maupun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian upaya pembangunan akan lebih terarah karena berpedoman pada Renstra SKPD yang sudah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan harus terpadu dengan perencanaan. Melalui dokumen rencana kerja dapat memberikan arahan untuk pencapaian strategi yang telah ditetapkan. Perumusan renja SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran tupoksi dari masing-masing tiap SKPD dalam masa kerjanya. Rencana kerja SKPD berisi tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kineja, kelompok

sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Adapun proses perumusan Renja SKPD terdiri dari :

a. **Persiapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD**

Persiapan penyusunan Renja dilakukan agar proses penyusunan dapat terlaksana dengan sistematis. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPd dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPd dengan SKPD, serta penyiapan data dan informasi. Pengolahan data dan informasi memiliki tujuan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat lebih terarah. Melalui data dan informasi yang tersedia kemudian dapat diolah untuk menjadi bahan masukan. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

b. **Penyusunan Rencana Kerja SKPD**

penyusunan rancangan SKPD dapat dilakukan dengan menelaah kembali hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya merupakan hal yang diperlukan untuk penyusunan Renja di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat digunakan untuk menyempurnakan langkah-langkah kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah pembangunan sehingga visi dari suatu SKPD dapat terwujud.

c. Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

Melalui perumusan kegiatan prioritas maka proses perumusan Renja akan lebih terarah. Program dan kegiatan yang diprioritaskan dapat menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan Renja SKPD dapat dilakukan dengan penyesuaian program, target dan capaian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Dengan demikian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Setiap program memiliki target capaian masing-masing sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

d. Penetapan Rencana Kerja SKPD

Renja SKPD akan digunakan sebagai pedoman sehingga pembangunan lebih terarah. Tahapan Penetapan Renja dilakukan untuk menyetujui program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Rancangan Renja SKPD merupakan hasil penyempurnaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang digunakan dalam penelitian ini adalah milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, mengingat penelitian akan dilakukan di sentra budidaya ikan air tawar yang berada di kecamatan Wajak. Sehingga, melalui Renstra yang ada (Periode 2011-2015) akan digunakan peneliti untuk mengevaluasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak.

F. Konsep Minapolitan

Kebijakan Minapolitan Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Seiring dengan kebijakan dan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN_KP/2013 tentang penetapan kawasan minapolitan, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh Dinas Perikanan dan kelautan Jawa Timur sebagai salah satu sentra industry di Jawa Timur dengan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 perihal penetapan Kabupaten Malang sebagai pengembangan kawasan minapolitan di Jawa Timur. Dengan keputusan tersebut ditetapkan bahwa Kecamatan Wajak sebagai sentra perikanan budidaya ikan air tawar yaitu ikan Nila salah satunya sebagai komoditas utama.

Dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu,

1. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan,

2. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu,

1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat
2. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat, bangsa dan negara kuat.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Dan Tujuan Minapolitan itu sendiri yaitu dilaksanakan dengan tujuan;

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk dan perikanan.
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan dengan melaksanakan penelitian harus menggunakan kaidah-kaidah metode penelitian karena sangat penting bagi kelancaran proses pengumpulan data, penganalisaan dan interpretasi data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Telah dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2012:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah riset yang berbentuk deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Jenis penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Dengan penelitian deskriptif, memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hubungan variabel atau asosiasi, dan juga mencari hubungan komparasi antar variabel. Maka dari penelitian deskriptif kualitatif yang menjadi jenis penelitian sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut dan disajikan secara sistematis tentang “Evaluasi Program

Budidaya Minapolitan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsep yang berisi tentang pengertian dan definisi konsep, aspek dimensi, komponen, bentuk, dan gejala yang nantinya akan dijadikan sebagai indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Sugiyono (2012:34) mengemukakan empat fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tentang *organizing domain*, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek dan menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
 - a. Identifikasi masalah dalam proses implementasi program
 - b. Strategi implementasi program
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program
2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan kelautan Periode 2011-2015 terkait program budidaya minapolitan dilihat dari 8 tahapan Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis (Bryson:2007).
 - a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

- b. Memperjelas atau mengidentifikasi mandate Organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- d. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).
- e. Menilai lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan).
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang akan dilakukan, serta tempat untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Wajak, dan dinas perikanan kelautan Kabupaten Malang. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena kecamatan wajak sudah ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar sejak tahun 2009 lalu. Selain itu, kecamatan Wajak telah melaksanakan kegiatan mina tani dan sudah melakukan budidaya ikan air tawar. Minapolitan itu sendiri maksudnya adalah kota perikanan, dimana nantinya akan ada produksi hulu sampai hilir mulai dari pembenihan, membesarkan, mengolah, dan memasarkan ikan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang
2. Kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Wajak
3. Petani Ikan Air Tawar di Kecamatan Wajak.
4. Lingkungan Kecamatan dan Masyarakat sentra budidaya ikan air tawar di kecamatan wajak.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena di dalam setiap penelitian memerlukan data. Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai pentunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel (Subagyo,2006:31). Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih ketua BPP Kecamatan Wajak dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Malang yang akan menjadi *key informan* untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan yang berkompeten memberikan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teks-teks mengenai rencana strategis (Renstra) dinas kelautan dan perikanan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Selain jenis data dalam penelitian ini juga ada sumber data. Sumber data sendiri menurut pendapat dari Arikunto (2010: 172) adalah benda, hal atau orang tempat meneliti, mengamati, membaca atau bertanya terkait data. Lebih lanjut lagi bahwa secara umum sumber data dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang disebut dengan 3P, yaitu:

1. *Person* (Informan)

Merupakan orang yang menjadi di tempat penelitian untuk bertanya terkait dengan yang sedang diteliti atau di sebut sebagai informan.

Adapun yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini antara lain adalah:

Tabel 4: Data Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan	Hari	Tanggal pelaksanaan
1	NS	Nasri	Kepala DPK Kabupaten Malang	Selasa	14-6-2015
2	WN	Wiwin	Petugas BPP	Senin	23-5-2016
3	RD	Rudi	Seksi budidaya Pokdakan Minajaya	Selasa	17-5-2016
4	IT	Imam Tauhid	Ketua Pokdakan Sumber Miksur	Senin	16-5-2016
5	ZA	Zaenal Abidin	Pembudidaya ikan	Senin	16-5-2016

Sumber: Data Primer diolah tahun 2016

2. Paper (Dokumen)

Merupakan dokumen tentang keterangan, arsip, pedoman dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun yang menjadi dokumen dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
- b. Penetapan Kabupaten Malang sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan kebijakan dan Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN_KP/2013
- c. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan
- d. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar

e. Profil Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) kecamatan Wajak

3. *Place* (Tempat)

Merupakan sumber data dimana keadaan tempat atau peristiwa berlangsungnya kegiatan yang terkait dengan penelitaian. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud *place* yakni di kantor DPK dan kantor BPP kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Menurut pemaparan Arikunto (2002:136) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dalam hal ini yang berkenaan dengan evaluasi program minapolitan budidaya berdasarkan Renstra Dinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang.

2. Tahap wawancara

Merupakan proses mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten dan mampu untuk dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. dalam penelitian, dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan menurut Moloeng (2007), meliputi:

1. Peneliti Sendiri:

Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Karena peneliti merupakan seorang perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Pedoman Wawancara

Peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

3. Catatan Lapangan

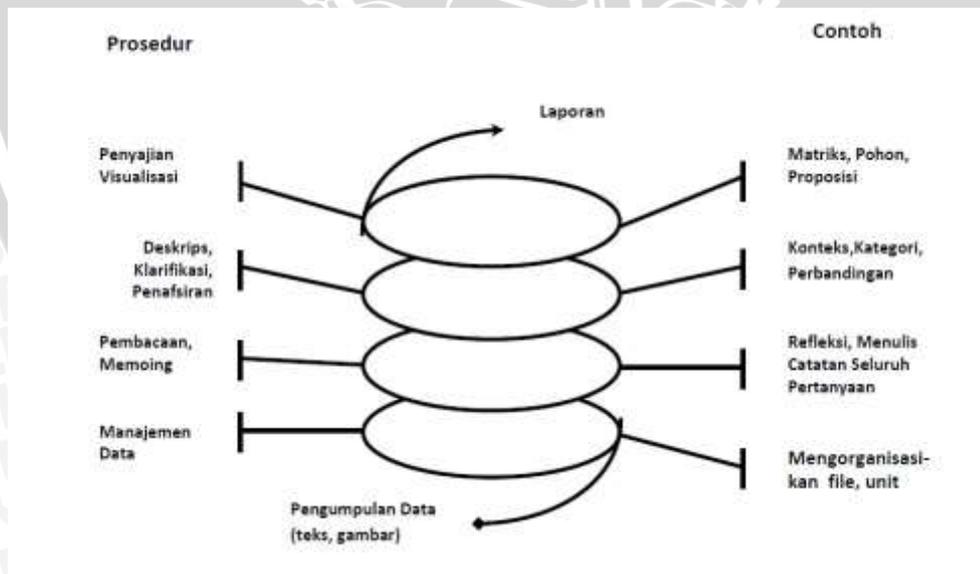
Catatan lapangan merupakan catatan tertulis yang sistematis yang disusun berdasarkan temuan lapangan pada saat observasi dilaksanakan (yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam penelitian kualitatif).

4. Dokumentasi

Peneliti menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Creswell (2012: 274-275) mengatakan bahwa analisis data merupakan proses yang berkelanjutan dengan membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Alasan peneliti dalam menggunakan model analisis data oleh Creswell adalah peneliti ingin mendeskripsikan fenomena yang ada, mengklarifikasi dan menafsirkan fenomena tersebut dengan teori yang peneliti gunakan. Tahap analisis data kualitatif menurut Creswell dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2: Analisis Data Spiral

Sumber: Creswell (2014: 254-261)

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bergerak dalam lingkaran analisis daripada menggunakan pendekatan linear yang tetap (Creswell, 2014: 254). Penjelasan dari gambar di atas dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

1. Mengorganisasikan Data

Pada tahap awal, peneliti mengorganisir data dalam file-file komputer dengan mengonversi file-file menjadi satuan teks yang sesuai (misalnya: sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah cerita lengkap) untuk analisis baik dengan tangan maupun dengan komputer.

2. Membaca dan Membuat Memo (*Memoing*)

Proses selanjutnya adalah memaknai data-data tersebut secara keseluruhan. Memo ini berupa frasa pendek, ide atau konsep penting yang muncul dalam pikiran analis. Proses ini mulai memaknai hasil wawancara sebagai satu kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian, menulis catatan atau memo di bagian tepi catatan lapangan atau transkrip atau di bawah foto untuk memudahkan eksplorasi *database*.

3. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, Menafsirkan Data menjadi Kode dan Tema

Proses ini, peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang mereka dari perspektif yang ada dalam literatur. Proses pengodean (*coding*) dimulai dengan mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai *database* yang digunakan dalam studi, kemudian memberikan

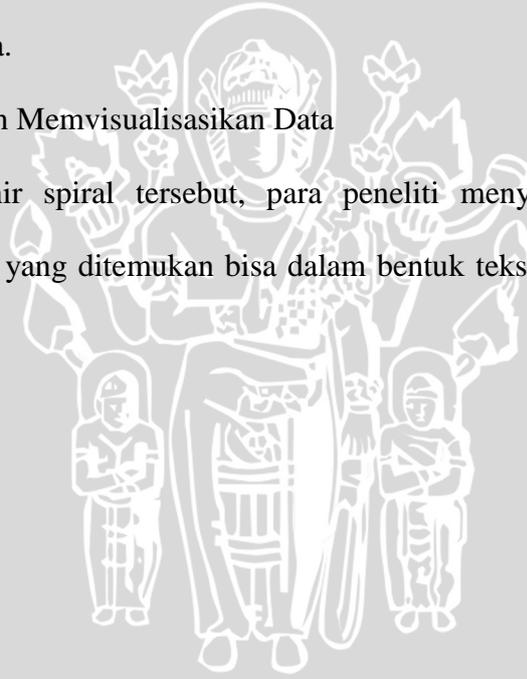
label pada kode tersebut. Setelah itu, tema dalam penelitian kualitatif merupakan satuan informasi yang luas yang tersusun dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum.

4. Menafsirkan Data

Penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan tema menuju makna yang lebih luas dari data. Hal ini peneliti akan menafsirkan data melalui pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data

Pada fase akhir spiral tersebut, para peneliti menyajikan data yaitu mengemas apa yang ditemukan bisa dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 2.581.671 jiwa (tahun 2015) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan.

Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90`` sampai 112°57'00`` Bujur Timur, 7°44'55,11`` sampai 8°26'35,45`` Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya. Batas-batas Kabupaten Malang dengan kabupaten lain sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia



Gambar 3: Peta Kabupaten Malang

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2015 (www.malangkab.go.id)

b. Visi dan Misi Kabupaten Malang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun

atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Penjelasan visi :

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- 1) Mandiri, yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap

dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

- 2) Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
- 3) Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 4) Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

- 5) Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- 6) Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 7) Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- 8) Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudkan Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

Penjelasan Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
- 2) Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
- 3) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
- 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

c. Data Administratif

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah mencapai 3.534,86 km² yang secara administrative terbagi menjadi 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan. Pembagian wilayah administrative pada kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5: Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Malang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Donomulyo	192.60	72 668	377
2	Kalipare	105.39	67 594	641
3	Pagak	90.08	53 470	594
4	Bantur	159.15	76 451	480
5	Gedangan	130.55	58 742	450
6	Sumbermanjing	239.49	99 471	415
7	Dampit	135.31	135 035	998
8	Tirtoyudo	141.96	64 450	454
9	Ampelgading	79.60	59 324	745
10	Poncokusumo	102.99	98 088	952
11	Wajak	94.56	87 438	925
12	Turen	63.90	123 879	1 939
13	Bululawang	49.36	70 228	1 423
14	Gondanglegi	79.74	88 626	1 111
15	Pagelaran	45.83	71 967	1 570
16	Kepanjen	46.25	101 268	2 190
17	Sumberpucung	35.90	59 683	1 662
18	Kromengan	38.63	40 428	1 047
19	Ngajum	60.12	51 657	859
20	Wonosari	48.53	50 222	1 035
21	Wagir	75.43	82 223	1 090
22	Pakisaji	38.41	84 964	2 212
23	Tajinan	40.11	52 585	1 311
24	Tumpang	72.09	77 836	1 080
25	Pakis	53.62	143 184	2 670
26	Jabung	135.89	71 909	529
27	Lawang	68.23	102 979	1 509

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
28	Singosari	118.51	174 724	1 474
29	Karangploso	58.74	73 973	1 259
30	Dau	41.96	63 665	1 517
31	Pujon	130.75	69 393	531
32	Ngantang	147.70	59 238	401
33	Kasembon	55.67	31 707	570
	Jumlah	2 977.05	2 619 069	880

Sumber : BPS Kabupaten Malang 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Malang yang memiliki Luas (Km²) terluas adalah Kecamatan Sumbermanjing mencapai 239.49 Km², dan yang memiliki Luas (Km²) Terkecil adalah kecamatan Sumberpucung dengan Luas 35.90 Km².

d. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk merupakan aspek penting dalam melaksanakan kegiatan perikanan, penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai subyek maupun objek dalam sektor perikanan. Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik laki-laki maupun perempuan (berdasarkan BPS Kabupaten Malang). Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Malang 2.451.997 jiwa terus bertambah hingga tahun 2014 menjadi 2.527.087 jiwa, dimana pertumbuhan paling banyak adalah laki-laki, dengan jumlah laki-laki 1.269.613 jiwa dan perempuan sebanyak 1.257.474 jiwa. dan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang dalam angka 2015 penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.581.671.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja setiap tahunnya akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Potensi suatu daerah dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kabupaten Malang memiliki potensi tenaga kerja yang data-datanya disajikan menurut uraian angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Malang Tahun 2010 sampai 2014. Jumlah angkatan kerja terbanyak pada tahun 2012 sebanyak 535.345 orang laki-laki dan 953 orang perempuan. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja tertampung sebanyak 550 orang laki-laki dan 4.739 orang perempuan. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi daripada tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan jumlah pencari kerja didominasi oleh penduduk perempuan yaitu sebanyak 48.214 orang pada tahun 2012.

Penduduk usia kerja di Kabupaten Malang juga didominasi oleh penduduk perempuan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk perempuan usia kerja 1.095.642. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada tahun-tahun lainnya. Potensi ketenagakerjaan dapat terlihat dari banyak tidaknya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran penduduk laki-laki terbanyak terdapat pada tahun 2012 dengan jumlah 32.810 orang. Sedangkan pengangguran penduduk wanita terbanyak terdapat pada tahun 2012 sebanyak 48.124 orang. Sedangkan untuk jumlah kesempatan kerja

terbanyak terdapat pada kesempatan kerja menurut jenis penduduk perempuan sebanyak 4.739 orang pada tahun 2010. Jumlah tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 jumlah kesempatan kerja penduduk perempuan adalah 2.950 orang.

Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pembangunan terbuka, dimana Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2012 sebesar 94,60 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 79,50 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 4,45 persen.

e. Perekonomian

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau berperan dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Melihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) informasi struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui. Dengan mengamati struktur ekonomi dari tahun-ke tahun akan terlihat pola dan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara lintas sektoral. Untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi dari peranan tiga sektor pendukung, PDRB diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sektor Primer, terdiri dari sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian;
- 2) Sektor Sekunder, terdiri dari sektor Industri Pengolahan, Sektor LGA, dan Sektor konstruksi;

- 3) Sektor Tersier, terdiri dari Sektor PHR, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal, teknologi dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional baik yang terkait dengan kebijakan sektor riil maupun moneter serta perkembangan harga minyak dunia.

f. Perikanan

Kabupaten Malang memiliki potensi yang cukup besar di Sektor Kelautan dan Perikanan meliputi potensi perikanan tangkap dan potensi perikanan budidaya.

1) Potensi Perikanan Tangkap

Berkembangnya Pusat Pendaratan Ikan seperti: Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI) Pondok dadap (Sendangbiru) Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Licin Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, TPI Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo. Adanya aktivitas perikanan laut di wilayah pantai selatan sepanjang 85,92 km dari timur sampai barat yang melintasi 6 kecamatan yaitu Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur dan Donomulyo dengan

potensi sumberdaya hayati ikan 80.435 ton per tahun untuk wilayah 200 mil laut. Luas potensi perairan laut Kabupaten Malang mencapai 570.801 km² (setara 57.080 ha). Jika rata-rata produksi per hektar per tahun = 456,66 kg, maka potensi produksi perikanan laut dapat mencapai 26.066,2 ton ikan per tahun. Namun berdasarkan data produksi riil tahun 2008 baru mencapai 4.068,7 ton atau sekitar 15,9 % dari potensi yang ada. Di wilayah 6 kecamatan pantai tersebut, selain terdapat potensi perikanan laut, potensi sumber daya laut yang lain juga masih melimpah seperti rumput laut, terumbu karang, ikan hias dll.

2) Potensi Perikanan Budidaya

Potensi Perikanan budidaya yang meliputi budidaya tambak, kolam, karamba, minapadi dan jaring sekat terdapat di beberapa wilayah kecamatan tergantung karakteristik masing-masing, yaitu

- a) Budidaya tambak berada di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan dan Gedangan.
- b) Budidaya kolam, karamba dan minapadi tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.
- c) Budidaya jaring sekat berada di Waduk Selorejo Kec. Ngantang, Waduk Sengguruh Kec. Kepanjen, Waduk Lahor Kec. Kromengan, Waduk Karangates Kec. Sumberpucung, Pagak dan Kalipare.

2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Malang

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- 2) Perencanaan strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kelautan dan Perikanan;
- 6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 7) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 8) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- 9) Pembinaan UPTD;
- 10) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 11) Pengkoordinasian, Integrsi dan Sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Pelaksanaan Kerjasama Lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya.

b. Visi dan Misi

Sebagai Organisasi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Aman, Lestari dan Berdaya Saing”

Penjelasan Visi :

Dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera dalam arti mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, tingkat ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan dengan melihat kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan kondisi pengelolaan secara optimal terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di darat, laut dan pesisir yang dilakukan dengan berpedoman pada kaidah - kaidah :

- 1) Aman, yang dimaknai pertama : dari sisi kualitas produk perikanan berkaitan dengan keamanan pangan melalui pra panen dan pasca panen sesuai dengan standar tidak ada unsur antibiotik, baik pada sarana produksi maupun benih, budidaya, hasil tangkap dan pengolahan, sehingga aman untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua : dari sisi kuantitas berkaitan dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan melalui peningkatan produktivitas dan fasilitasi sarana prasarana. Ketiga : dari sisi kesiapan terhadap ancaman bencana alam laut sedini mungkin memaksimalkan antisipasi mitigasi dalam rangka keamanan masyarakat pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam laut tersebut.
- 2) Lestari, yang dimaknai dengan dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal harus tetap mempertahankan kelestarian. Upaya lain yang harus dilakukan adalah penataan kawasan pesisir sesuai dengan kaidah pelestarian dan meningkatkan sumberdaya manusia untuk menjaga kualitas perairan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Berdaya saing, yang dimaknai pertama : dengan semakin meningkatnya produk perikanan baik dari sisi kualitas maupun jenis komoditas yang dihasilkan yang merupakan produk ekonomis

penting dan produk unggulan, maka akan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Kedua : dengan adanya pemberdayaan pada sumber daya masyarakat khususnya masyarakat pesisir maka akan meningkatkan keterampilan dan kesempatan berusaha sehingga mampu bersaing dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan diupayakan melalui misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

Mengacu pada visi dan misi yang ingin dicapai, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan berusaha dan kesiagaan terhadap bencana alam laut bagi masyarakat pesisir.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 3) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan.
- 4) Meningkatkan sumberdaya manusia dan tingkat konsumsi ikan.

Sasaran hasil pembangunan yang diharapkan sebagai dampak aspek kehidupan masyarakat adalah :

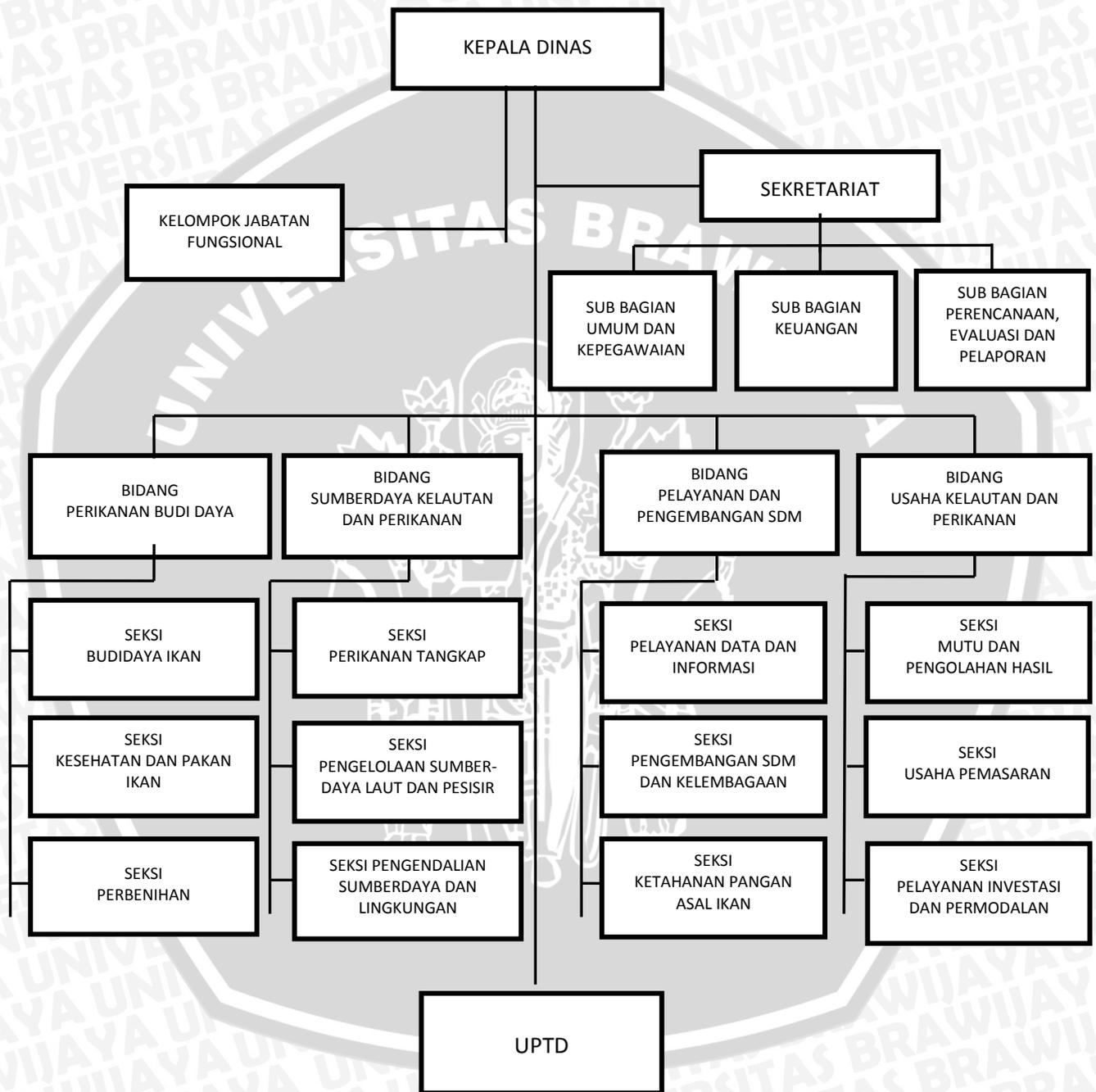
- 1) Meningkatnya pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir dan persiapan terhadap ancaman bencana alam laut.
- 2) Meningkatnya jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas *illegal fishing*.
- 3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
- 4) Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
- 5) Meningkatnya produksi ikan olahan.
- 6) Meningkatnya konsumsi ikan per kapita (www.kelautan.malangkab.go.id).

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan;
- g. UPTD (UPTD Balai Benih Ikan dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 4: Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber: Renstra DPK tahun 2011-2015

3. Gambaran Umum Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

1) Kondisi Geografis Kecamatan Wajak

Kecamatan Wajak secara geografis terletak di sebelah Timur 25 Km dari kota Malang, terletak pada ketinggian wilayah 525 m/dpl, suhu maksimum/minimum : 32°C /20°C , dalam rupa bumi terletak dikordinat sebelah timur pada 112° 43" dan garis lintang selatan pada 08°06', Curah hujan rata – rata pertahun antara 1297 s/d 1925 mm setiap tahunnya (<http://wajak.malangkab.go.id>). Batas wilayah Kecamatan Wajak adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo.
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Tirtoyudo & kawasan hutan.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Turen & Kecamatan Dampit
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bululawang Kecamatan Tajinan

Batas wilayah administratif kecamatan Wajak dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5: Peta Kecamatan Wajak

Sumber: Profil Kecamatan Wajak

Luas kawasan kecamatan Wajak secara keseluruhan adalah sekitar 94,56 km² atau sekitar 3,18 persen dari total luas kabupaten Malang.

2) Data Administratif

Pada tahun 2014, kecamatan Wajak terbagi habis menjadi 13 desa, 40 dusun, 141 RW dan 478 RT. Dilihat dari komposisinya, desa Sumberputih, desa Patok Picis dan desa Sukoanyar, memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 4 dusun. banyaknya jumlah dusun yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak pula. Terbukti jumlah RT terbanyak di Desa Wajak yaitu sebanyak 20 RW dan 64 RT. Berikutnya Codo (15 RW dan 54 RT), Bringin (19 RW dan 45 RT), Kidangbang (11 RW dan 43), Sukoanyar (12 RW dan 39 RT), Sumberputih (8 RW dan 36 RT), Dadapan (11 RW dan 33 RT) dan sisanya berada di desa Blayu, Sukolilo, desa Bambang, Desa Patok Picis, desa Ngembal dan desa Wonoayu. Berikut adalah data registrasi penduduk di kecamatan Wajak:

Tabel 6: Pelaksanaan Registrasi Penduduk di Kecamatan Wajak

No.	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk Akhir Tahun (Jiwa)			Ratio Jenis Kelamin (%)	Jumlah Keluarga Akhir Tahun (KK)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Sumberputih	3.127	3.080	6.207	101.53	1.563
2	Wonoayu	708	753	1.461	94.02	382
3	Bambang	2.020	1.947	3.967	103.75	1.023
4	Bringin	3.108	3.109	6.217	99.97	1.562
5	Dadapan	3.294	3.344	6.638	98.50	1.679
6	Patok Picis	3.097	3.109	6.206	99.61	2.008
7	Blayu	3.329	3.340	6.669	99.67	1.913
8	Codo	4.019	4.250	8.269	94.56	2.650
9	Sukolilo	3.429	3.437	6.866	99.77	1.803
10	Kidangbang	3.764	3.900	7.664	96.51	2.084
11	Sukoanyar	3.361	3.262	6.623	103.03	1.779
12	Wajak	7.474	7.755	15.229	96.38	4.219
13	ngembal	2.572	2.670	5.422	103.07	1.378
	2014	43.482	43.956	87.438	98.92	24.043

Sumber: Profil Kecamatan Wajak 2015

3) Kondisi Penduduk Kecamatan Wajak

Penduduk kecamatan Wajak dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Memasuki tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 87.438 jiwa. Dengan luas wilayah 94,56 km², maka kepadatan penduduk mencapai sekitar 919 jiwa per km². Kepadatan penduduk tahun 2014 ini lebih tinggi di banding dua tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 913 jiwa per km² (2012) dan sebesar jiwa per km² (2013).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 49,73 persen adalah penduduk laki-laki dan 50,27 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 98,92 persen. Hal ini menunjukkan setiap 100 penduduk perempuan di kecamatan Wajak

terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Struktur umur penduduk cenderung mengarah apad kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka bebean ketergantungan penduduk muda sebesar 37,048 persen. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 49,05 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 44 orang bukan usia produktif (0-14 tahun) dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio 2:1.

Berikut adalah indicator kependudukan kec. Wajak Th 2012-2014:

Tabel 7: Indikator Kependudukan Kec Wajak

Uraian	2012	2013	2014
Penduduk	86.285	86.383	87.438
Pertumbuhan	0,12	0,11	1,22
Kepadatan	912	913	919
Rasio Sex	96,85	96,92	98,92
Jumlah Rumah tangga	23.118	23.143	24.043
Angka ketergantungan			
0-14 Tahun			37,04
> 64 Tahun			12,01
Total			49,05

Sumber: BPS Kabupaten Malang 2015

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Penyajian data fokus penelitian merupakan langkah awal untuk memaparkan data-data yang diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian di lapangan. Data-data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan di dapat dari dokumentasi pendukung dari penelitian. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus dari penelitian didukung

oleh temuan peneliti di lapangan. Berikut adalah penyajian data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini:

1. Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Program minapolitan budidaya di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Pemaparan peneliti terkait fokus penelitian yang telah diperoleh peneliti selama proses penelitian di lapangan berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah dalam Proses Implementasi Program

Kabupaten Malang dengan luas daratan kurang lebih 3.712 Km², sebanyak 1.242,81 Km² adalah merupakan tanah pertanian/perikanan (www.malangkab.go.id). Kabupaten Malang membuat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan karena sudah adanya penetapan kawasan Minapolitan secara nasional pada Tahun Anggaran berjalan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan. Selain itu dasar normatif perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Selanjutnya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/407/Kep/421.013/2008 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan tahun 2008. Kemudian Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan

Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar.

Konsep minapolitan ini ditata sebagai sebuah kawasan bisnis terpadu. Selain pengembangan produksi ikan konsumsi dan benih, juga membidik bidang pengembangan dan pemasaran. Sentra pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang dipilih Kecamatan Wajak, dengan beberapa alasan yaitu disamping merupakan lokasi di tengah-tengah daerah Kabupaten Malang juga karena merupakan daerah agraris yang areal persawahannya banyak mempergunakan aliran air sungai. Dikarenakan juga banyak mempunyai sumber air dari dua sungai besar yaitu Sungai Kajaran dan Sungai Pawon, selain itu Kecamatan Wajak banyak memiliki Rumah Tangga yang mempunyai usaha budidaya ikan. Selanjutnya kecamatan lain di sekitar Kecamatan Wajak sebagai kecamatan pendukung (*hinterland*).

Tujuan dari pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah pengendalian urbanisasi dari desa ke kota, penanggulangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah daerah Kabupaten Malang yang ingin meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malang yang berada di tahap pra sejahtera dengan berbagai cara dalam hal ini mengolah potensi di beberapa wilayah kecamatan sesuai kondisi potensinya Kecamatan Wajak yang berada di Kabupaten Malang merupakan lokasi yang dipilih

untuk pengimplementasian program minapolitan budidaya. Sebagaimana data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) selaku pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Penetapan Wajak sebagai lokasi pelaksanaan program minapotitan budidaya atau di jadikan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Diantaranya yang pertama jelas airnya, jadi memang kualitas airnya bagus tanpa ada pencemaran. Jumlah mata airnya iyaitu sangat banyak sekali dikecamatan wajak ini lebih dari 30 mata air. Kemudian lingkungan juga mendukung dan SDM masyarakat juga sudah mendukung. Jadi istilahnya ditetapkan sebaga minapolitan disitu dilihat dari pekerjaannya sudah ada kemudian dari masyarakatnya sendiri sudah ada yang mengawali,jadi untuk melihara ikan sudah ada beberapa kelompok yang mengawali,jadi itu sebagai embrio.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan bahwa penetapan kecamatan wajak sebagai lokasi pelaksaaan program minapolitan budidaya atau sentra budidaya ikan air tawar dikarenakan Wajak memiliki kualitas air yang bagus dan sudah ada beberapa orang yang memulai membudidayakan ikan air tawar di kecamatan Wajak.

Kualitas air yang bagus sebagaimana data primer di atas berasal dari beberapa sumber mata air yang berada di kecamatan wajak. Potensi irigasi atau sumber mata air yang berada di wilayah kecamatan wajak dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 8: Potensi Irigasi di Wilayah Kecamatan Wajak (2015)

Desa	Jenis Irigasi					
	Danau	Waduk	Sungai	Mata air	Sumur	Pompa
Wajak	-	-	1	7	1.157	-
Ngembal	-	-	1	-	1.033	1
Sukoanyar	-	-	2	3	1.270	-
Kidangbang	-	-	3	2	844	1
Sukolilo	-	1	2	3	1.300	-
Blayu	-	-	4	10	1.260	-
Codo	-	-	3	1	1.375	-
Dadapan	-	-	3	6	1.110	-
Bringin	-	-	2	2	1.080	-
Patokpicis	-	-	1	2	1.190	-
Bambang	-	-	-	-	-	-
Wonoayu	-	-	-	-	249	-
Sumberputih	-	-	2	6	920	-

Sumber: dokumen programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan balai penyuluhan kecamatan wajak tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jika persebaran sumber mata air tersebar hampir di seluruh desa yang berada di kecamatan wajak. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani mina jaya, yang menyatakan bahwa:

“Yang menjadi potensi unggulan kecamatan wajak mungkin pertama air terutama untuk yang nila. Yang kedua memang teknisi orang-orang pelopor ikan darat ini memang dari wajak yang banyak. Sebelum ditetapkan minapolitan memang sudah banyak yang budidaya ikan air tawar”(wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak),

Sebagaimana hasil wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan jika potensi air yang ada di kecamatan Wajak cocok digunakan untuk pembudidayaan ikan air darat terutama untuk nila serta pembudidaya ikan air darat tersebut sudah mulai membudidaya sebelum

ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Selanjutnya RD (L:47th) memberikan pernyataan lanjutan sebagai berikut:

“Memang sudah lama mas orang-orang sini melakukan budidaya ikan itu. Tapi ya gitu, orangnya itu-itu saja. Kalau ada pertemuan acara apa gitu yang datang orangnya ya cuma itu. Dulu pernah ada anak-anak muda yang mulai beternak ikan disini ini. Tapi cuma jalan sebentar ya ndak di lanjut.”(wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Meskipun potensi yang dimiliki oleh kecamatan wajak dalam sektor budidaya ikan air tawar unggul dari kualitas air, tetapi berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan jika SDM (pelaku usaha perikanan) tidak mendukung potensi yang dimiliki karena sulit berkembangnya jumlah pelaku usaha perikanan. Mendukung pernyataan RD (L:47th), WN (L:45th) selaku pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Kalau pembudidaya ikan air tawar baik tambak, kolam, jaring, dan sebagainya itu semakin tahu menalami peningkatan tapi perlahan. Tapi yang disayangkan pada tahun 2015 lalu jumlah rumah tangga perikanan mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Memang kita harus tlaten dan teliti ketika budidaya, ya itu yang menjadi penyebab kenapa perkembangan pelau usaha perikanan itu tidak bisa berkembang secara signifikan. Ya itu tadi masalahnya sebenarnya kembali lagi ke SDM.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Sebagaimana hasil wawancara tersebut, dapat dilihat jika perkembangan pelaku usaha perikanan yang menjadi permasalahan. Meskipun ada peningkatan tetapi tidak secara signifikan, dan terlebih pada tahun 2015 pelaku usaha perikanan di kecamatan wajak mengalami penurunan

daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah data perkembangan jumlah pembudidaya ikan di kecamatan wajak dari tahun 2011-2015:

Tabel 9: Perkembangan Jumlah Pembudidaya Ikan Di Kecamatan Wajak

No.	Jenis Budidaya	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembudidaya Tambak	9	9	9	9	9
2	Pembudidaya Kolam	2.143	2.383	2.683	3.176	3.285
3	Pembudidaya Mina Padi	48	54	56	56	52
4	Pembudidaya Mina Mendong	160	162	162	142	142
5	Pembudidaya Jaring Sekat	2.806	3.240	3.240	2.807	2.288
	JUMLAH	5.166	5.848	6.150	6.190	5.776

Sumber: Dokumen Renstra DPK tahun 2011-2015 Kabupaten Malang

b. Strategi Implementasi Program

Secara umum, produksi perikanan tangkap dunia sudah mengalami stagnasi dan sudah mencapai titik optimal sehingga tidak mungkin untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi perikanan yang masih belum termanfaatkan dengan baik dan terus akan dapat ditingkatkan sejalan dengan tingkat teknologi yang digunakan adalah sumberdaya perikanan budidaya. Sehingga perlu adanya strategi-strategi yang mampu menunjang produksi hasil perikanan.

Kaitannya dengan program minapolitan di kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang menjadi pihak pertama dalam pengimplementasian program adalah pihak Bappeda Kabupaten Malang selaku pihak yang merencanakan pembangunan di Kabupaten Malang. Secara umum, bertugas menentukan strategi yang dapat diterima oleh semua pihak dan dinilai lebih mudah, kemudian selanjutnya strategi

diserahkan langsung kepada pihak yang menangani Program Minapolitan Budidaya yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan. Strategi tersebut sudah terkandung dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Malang dalam RPJMD yaitu strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang berdaya saing, aman dan lestari.

Pernyataan tersebut di atas didukung oleh data hasil wawancara yang dilakukan dengan NS (L:51th) selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing itu utamanya pembiayaan, jadi untuk perikanan budidaya ini kita dipatok untuk naik 5 persen, sehingga strateginya adalah mencukupkan pembiayaan, kalau teknologi itu udah ada yang mikir. Dengan memberikan kebutuhan pembiayaan itu saja, kalau SDM ndak pernah sambat sini” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan jika strategi yang dinyatakan oleh Dinas Perikanan dan kelautan langsung mengarah ke pembiayaan yang menjadi utamanya yaitu mencukupkan pembiayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan Minapolitan budidaya di kecamatan wajak, terkait teknologi dan sumber daya manusia tidak pernah menjadi hambatan. Selanjutnya Strategi atau metode untuk meningkatkan dan mengembangkan Minapolitan Budidaya dilakukan oleh pihak BPP (Badan Penyuluh Pertanian) Kecamatan Wajak yang menangani langsung dilapangan dengan menerapkan teknologi-teknologi terbaru. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan WN

(L:45th) selaku pihak pegawai BPP Kecamatan Wajak, mengatakan bahwa:

“Strategi dari kita jadi kita kan memang budidaya, jadi untuk produksi kita kalah dengan jaring sekat dan jaring apung tapi kita menang dikualitas, kualitas ikan kita lebih bagus kalau tidak ada pencemaran tidak ada residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic kita tidak ada, karena peranan kita masih alami kita menang disitu, kemudian kita juga ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi jadi kita juga menerapkan teknologi-teknologi terbaru untuk bedanya untuk perguruan tinggi, jadi untuk kolam yang kecil bisa menghasilkan yang banyak salah satunya itu, kemudian ada juga kita beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya”.(wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan jika untuk produksi budidaya memang dikualitas, karena tidak ada pencemaran dan tidak ada residu kimia kemudian dikatakan juga tidak adanya resiko antibiotic dimana air yang dipakai dari sumber mata air alami yang menjadikan peranan yang alami disetiap pengembangannya. Dan juga sudah adanya peran pembibitan untuk meningkatkan produksi serta sudah menerapkan teknologi-teknologi baru, selain itu untuk meningkatkan nilai ekonomisnya beralih ke ikan hias. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan air tawar, yang menyatakan bahwa:

“Strateginya *ngikuti* pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis pelan-pelan sebagian kita beralih ke ikan hias, misalnya seperti koi dan nila”. (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak)

Dari hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut menunjukkan jika strateginya disisi mengikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomis pelan-pelan beralih ke ikan hias seperti koi dan nila.

Selanjutnya untuk menggambarkan Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang Aman dan Lestari tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan NS (L:51th) Selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari, Aman kita mengacu pada kualitas air, menjaga kualitas pakan dulu dan air. Kalau lestari yaitu dengan mengelola pengelolaan lingkungan sumber air, pesisir, pengelolaan lingkungan secara umum, bisa sumbernya”. (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya strategi yang memang harus dikelola untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang Aman dan Lestari. Strategi yang dimaksudkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bersifat umum yaitu Aman yang berarti mengacu pada kualitas air, menjaga kualitas pakan dan air kemudian yang dimaksud Lestari yaitu mengelola pengelolaan lingkungan secara umum bisa pada sumber airnya. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan WN (L:45th) pegawai BPP terkait dengan pengelolaan sumber mata air, yang menyatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari, airnya masih jernih dan terbebas dari residu kimia dan upaya kontribusi dari BPP itu bagaimana untuk menanggapi itu tantangan kedepan, tantangan kita sebenarnya

untuk saat ini adalah debit air yang semakin menurun, tantangan kita disitu, jadi kita sudah kerjasama dengan dinas kehutanan, itu kita ada program untuk penyelamatan mata air, sekarang mulai tahun kemarin kita sudah menanam pohon di atas mata air, diradius 200 m diatas mata air diatasnya kita tanami kayu semua, kayu yang harapan kita nanti disitu tidak ada yang ditebang, jalan satu-satunya yang kita tanam, tanaman kami yang menghasilkan buah, jadi kalau kayu saja 6 sampai 8 tahun ditebang oleh pemerintah, tapi kalau buah tidak akan ditebang karena kan diambil buahnya itu, jadi yang kita tanam kemarin ada nangka ada durian kemudian ada bicung/kluwek, itu yang kita tanam. Jadi harapan kita bisa mencapai puluhan tahun, karena yang diambil hanya buahnya saja terserah, jadi kita berikan ke petani.(wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut strategi untuk mewujudkan hasil budidaya yang aman dan lestari salah satunya yaitu mengelola pengelolaan lingkungan yang terkait dengan sumber mata air, ada program penyelamatan sumber mata air dengan menanam pohon diatas mata air diradius 200 meter diatas mata air dilakukan secara bertahap. Strategi yang dilakukan berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh pelaku pembudidaya. IT (L:52th) selaku kelompok tani ikan sumber miksor mengatakan bahwa:

“Dadi lek enten tiang nyulami niku dilarang dados nyetrum potas, pas niko wonten maling seng ngobat kolam. Dados enggeh mati sak kolam niku. Marai lek lokasine teng samping alas nggeh keamanane terkendala”.(Jadi kalau ada yang mengambil ikan itu dilarang menggunakan peralatan listrik dan obat-obatan kimia, waktu itu ada maling yang memberi obat kimia satu kolam. Jadiya mati semua satu kolam. Jika lokasinya di pinggir hutan memang terkendala keamanan).”(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang aman dan lestari yaitu dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia dan peralatan listrik saat memanen ikan yang sudah siap panen. Selain itu berbeda dengan yang dikatakan Bapak Rudi Selaku seksi budidaya kelompok tani ikan di mina jaya, RD (L:47th) mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari jadi kita kan sering diadakan untuk pelatihan jadi kesimpulan dari pelatihan-pelatihan itu kita membuat pulang ilmu itu sendiri-sendiri jadi tiap orang tidak sama, seperti saya kalau beli pakan kan yang paling murah itu saya oplos buanyak botol-botol kita isi macam-macam bakteri atau mikroba itu. Untuk teman-teman yang lain ada yang pakek tapi, jadi kita ndak sama, dan tidak mau mencoba punya teman. Jadi kreasi seni nya disitu, kita cuman tau tapi kita ndak mau mencoba punya teman, kita sudah komit punya saya yang paling unggul. Tapi kalau ada penyakit ada kendala kita kumpul kita kompak .mencari jalan keluar sharing-sharing bagaimana mencari jalan keluar.(wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk mewujudkan hasil budidaya perikanan yang aman dan lestari ditunjukkan pada pemberian pakan, jadi mengedepankan kualitas pakan untuk ikan yang aman dan baik untuk konsumsi ikan, dimana dengan mencampur macam bakteri dan mikroba dengan kreasi masing-masing pembudidaya yang tidak sama.

Membudidayakan ikan air tawar membutuhkan ketlatenan dan kesabaran sehingga tidak semua orang mampu melaksanakannya. Karena dalam budidaya ikan air tawar terdapat berbagai masalah atau kendala

yang dihadapi oleh para pembudidaya, dalam hal itu kaitannya dengan bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat atau khususnya pihak yang terkait dalam membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan air tawar sangat direspon baik. Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksur, mengatakan bahwa:

“Lek tanggapan pemerintah setempat pas wonten kendala niku enggeh sae ningali teng lokasi langsung, survey langsung, polisi enggeh dateng langsung, dadi nate iwak siap panen induk niku pernah ilang,,staf deso juga bertindak (Tanggapan pemerintah setempat ketika ada kendala itu sangat baik dan akan langsung datang ke lokasi, survey langsung, polisipun juga datang langsung saat ikan siap panen induk itu pernah hilang, pegawai desa juga bertindak).”(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Sebagaimana dikatakan oleh bapak IT (L:52th) bahwa tanggapan dari pemerintah dan khususnya pihak-pihak terkait sangat baik dan responsive dimana dikatakan langsung menuju ke lokasi jika terjadi permasalahan dalam pembudidayaan ikan air tawar. Dan juga didukung dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya yang mengatakan bahwa:

“Tanggapan dari pemerintah setempat dan masyarakat ketika terjadi suatu kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar, biasanya besoknya langsung datang, kemarin aja dari propinsi airnya itu saja sudah di bawa sampel-sampelnya banyak cuman yang habis itu analisisnya kita ndak tau, iya ndak dikembalikan, ya memang kita dari pasuruan atau dari malang punten itu kita ada apa ya sudah di suruh datang lah kalau ada masalah apa-apa + analisa lep gratis tapi sama, mungkin kalau dari orang-orang atau dari kelautan mungkin karena kesibukan pak tani kan banyak,

biasanya kita minta tolong temen-temen yang di unibraw biasanya kalau ada kendala². Cuman minta tolong doing, ikannya sakit,, cuaca memang sulitnya bukan main. Saya sudah puluhan tahun tetep kesulitan, jadi kuncinya cuman dari pemijahnya yang tau kalau budidayanya ndak tau, hujan pengaruh hujan malam ini yang bahaya sama abu ini bahaya sulit. Pernah disini maling cuman 1 kali tahun 2012. Padahal mau ada tvone udah datang tapi lelenya udah dimaling (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Pernyataan tersebut menggambarkan alasan lain bahwa permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya selain banyak terjadi pencurian juga karna cuaca atau musim, terjadinya hujan abu dan hujan malam yang sangat membahayakan dan yang menyebabkan kesulitan dalam memelihara ikan. Untuk proses penanganannya jika terjadi kendala atau permasalahan seperti yang dikatakan oleh WN (L:45th) selaku pegawai BPP yang menangani langsung lapangan mengatakan bahwa:

“Tanggapan dari pemerintah setempat dan masyarakat ketika terjadi suatu kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar, kendalanya ada dikelompok dulu, permasalahan itu diselesaikan secara kelompok dulu, jadi kalau kelompok ndak bisa baru ke kita, dan kalau kita ndak bisa baru ke dinas.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”

Seperti yang dikatakan WN (L:45th) tersebut bahwa jika terjadi suatu kendala atau permasalahan dalam budidaya ikan air tawar, proses permasalahan itu diselesaikan secara bertahap jadi dari kelompok dulu jika belum menemukan penyelesaian baru ke BPP (Badan Penyuluh

Pertanian) selanjutnya kalau masih belum menemukan solusinya juga, baru langsung ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program sesuai dengan data hasil wawancara, terbagi dalam beberapa proses seperti misalnya: (1) Ketersediaan sumber dana/modal; (2) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana (3) Penguatan kelembagaan; (4) Tingkat keamanan.

1) Faktor Pendukung

a) Ketersediaan Sumber Dana

Dalam suatu program ataupun kebijakan dana merupakan hal terpenting. Hal tersebut dikarenakan dana merupakan jalan awal suatu program dapat direalisasikan. Begitu pula dalam program minapolitan di kecamatan Wajak. Ketersediaan sumber dana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program. Sesuai dengan data hasil wawancara dengan IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber makmur mengatakan, bahwa:

“Bantuan engkang di tampi miriki mulai enggeh pertama niku angsal asal induk, bibit, tembok beton dari pemerintah, pemerintah perhatian bantu ,paving dalam niku pemerintah saking perikanan lan niku bantuan uang 65 juta saking PUMP pengembangan usaha minapolitan pedesaan niku,” (Bantuan yang diterima mulai dari pertama mendapat induk, bibit, tembok beton dari pemerintah, pemerintah memperhatikan dan bantu paving buat jalan dari pemerintah perikanan dan dana uang sebesar 65 juta dari PUMP pengembangan usaha minapolitan pedesaan).”

(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan adanya ketersediaan sumber dana dari pemerintah yaitu melalui dana PUMP (Pengembangan Usaha Minapolitan Perdesaan) senilai 65 juta. Selanjutnya dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil produk perikanan budidaya dan untuk menunjang pengembangan budidaya ikan air tawar. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan, yang menyatakan bahwa:

“Lek bantuan iku uakeh ta mas. PUMP, mina pedesaan, wujud e uang tunai niku 65 juta per kelompok. Ada dana yang dibelanjakan harus habis, bantuan dinding itu sanes BUMP, bantuan sarana, jalan, peralatan ada, peralatan pembenihan pembibitan, percetak mesin pellet, lengkap. Tapi wong e sing aras-arasen, yang tetep ya orang itu aja yang orang baru menyusut kalau udah ndak bisa tumbuh lagi ikannya (Kalau bantuan itu banyak mas. PUMP, mina pedesaan, yang berwujud uang tunai sebesar 65 juta per kelompok. Ada dana kemudian dibelanjakan harus habis, bantuan dinding itu bukan BUMP, bantuan sarana, jalan, peralatan ada, peralatan pembenihan pembibitan, percetakan mesin pellet, lengkap. Tapi orangnya yang malas-malasan. Yang tetap orangnya itu-itulah saja yang orang baru menyusut kalau sudah tidak bisa tumbuh lagi ikannya.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketersediaan sumber dana selain dari pemerintah perikanan berupa sarana prasarana seperti; indukan, bibit dan

kolam beton, percetakan mesin pallet, yaitu dari bump, mina pedesaan berupa uang tunai melalui PUMP (Pengembangan Usaha Minapolitan Perdesaan) sebesar 65 Juta. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani mina jaya, yang menyatakan bahwa:

“Pernah 3 kali mendapat bantuan. Pertama terpal sama bibit dan pakan terus kedua atas nama kelompok itu cuman bibit aja, yang terakhir ini kolam beton, milik kelompok tani. dan bantuan dari PUMP (Pengembangan Usaha Minapolitan Perdesaan) sebesar 65 juta pada waktu itu” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah perikanan dari sarana dan prasarananya seperti bibit ikan, pakan dan kolam beton dan juga bantuan uang tunai sebesar 65 juta melalui PUMP (Pengembangan Usaha Minapolitan Perdesaan). WN (L:45th) selaku pegawai BPP di kecamatan wajak yang menangani langsung dilapangan mengatakan, bahwa:

“Bantuan banyak yaitu dari benih bibit pakan peralatan ada semua sampai saluran irigasi perikanan kolam ada semua, bantuan dana melalui PUMP juga sebesar 65 juta per kelompok tani ikan , sebelum ada minapolitan kita sudah ada bantuan untuk pengembangan kelompok itu kita sudah ada itu baru kita untuk pertumbuhan aja. Dari setelah ada minapolitan kita baru banyak bantuan, dari dinas, propinsi dari pusat, masuk semua.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”

Sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45th) menunjukkan bahwa adanya banyak bantuan dari benih, bibit, pakan, peralatan

sampai saluran irigasi perikanan kolam, bantuan dana sebesar 65 juta melalui PUMP (Pengembangan Usaha Minapolitan Perdesaan). Dan tidak hanya dari dinas dari pusat propinsi pun juga ada.

b) Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Bantuan pembangunan sarana dan prasarana dalam program minapolitan budidaya di kecamatan wajak sudah sangat baik dan mendukung, bantuan yang diterima oleh masyarakat pembudidaya ikan yaitu bibit indukan ikan, pakan, mesin pencetak pakan atau pallet, serta saluran irigasi perikanan kolam dan perbaikan jalan berpaving. Semua bantuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berhak digunakan oleh seluruh masyarakat petani ikan budidaya di kecamatan wajak. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh RD (L:47th), selaku seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya, sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana sudah sangat mendukung sekali untuk permodalan awal, saya ini dulu kan *backgroundnya* kan benih itu jadi 3 tahun udah nekuni lele, tidak pernah keluar cuman lele ini. Untuk lapak-lapaknya ikan sudah ada di wajaknya sudah ada sama pak camat sudah dibuatkan, (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan jika bantuan sarana dan prasarana langsung diterima oleh para pembudidaya serta sangat mendukung untuk peningkatan dan pengembangan produk hasil perikanan budidaya. Pernyataan tersebut juga

didukung dari hasil wawancara dengan IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksur, mengatakan, bahwa:

“Sarana dan prasaranane sampun didukung. Enggeh pertama niku enggeh angsal asal induk, bibit, tembok beton dari pemerintah. Pemerintah perhatian bantu paving dalam niku pemerintah saking perikanan (Sarana dan prasarananya sudah didukung. Yang pertaman mendapat indukan, bibit, tembok beton dari pemerintah. Pemerintah perhatian sehingga memberi bantuan berupa paving jalan itu dari pemerintah dinas perikanan).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Wawancara dengan IT (L:52th) tersebut juga menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya ikan sudah mendukung.

Wujud bantuan sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan dalam wawancara di atas berupa terpal, jaring dan Alkon, serta mesin penepung ikan. Adapun bantuan sarana prasarana yang di maksud, secara rinci di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10: Jenis Bantuan untuk Budidaya Ikan yang Diterima oleh Kecamatan Wajak

NO	NAMA POKDAKAN	DESA	JENIS BANTUAN
1	Mina Jaya	Kidangbang	Terpal, Jaring dan Alkon, mesin penepung pakan Ikan
2	Sumber Ringin	Dadapan	Terpal, Jaring dan Alkon
3	Bringin Jaya	Bringin	Terpal, Jaring dan Alkon
4	Mina Mulyo Lestari	Blayu	Terpal, Jaring dan Alkon
5	KUBE Sangkuriang	Codo	Terpal, Jaring dan Alkon
6	Mina Makaryo	Wajak	Mesin penepung pakan ikan

Sumber: Dokumen Panji-panji Program Perikanan Kecamatan Wajak Tahun 2015

Terlihat dari tabel 10 terkait bantuan sarana dan prasarana diatas menunjukkan bahwa dikecamatan wajak ada 6 desa dari masing-masing 6 pokdakan yaitu diterima oleh Pokdakan Mina Jaya, Sumber Ringin, Bringin Jaya, Mina Mulyo Lestari, KUBE Sangkuriang serta Mina Makaryo.

c) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan yang diterima oleh masyarakat petani ikan budidaya di kecamatan wajak berupa pelatihan seperti dalam bidang administrasi, dan pelatihan-pelatihan yang menunjang kegiatan budidaya ikan air tawar untuk peningkatan kualitas kelompok. Selain itu, baik dari masyarakat kelompok tani ikan budidaya di kecamatan wajak juga telah mendapatkan sertifikat pembudidaya dengan tidak dipungut biaya. Serta penguatan kelembagaan yang kaitannya dengan akses permodalan sudah ada yang berbentuk sertifikat usaha untuk pengembangan bisnis dengan kredit. Sebagaimana data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) selaku pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Untuk penguatan kelembagaan kita ada pertemuan rutin untuk kelembagaan, kita juga sudah kerjasama dengan bank untuk permodalan kita bisa pinjam ke BRI, sudah berjalan. Sementara dengan BRI, tapi juga ada keuangan mandiri kelompok itu ada yang membentuk koperasi satu kecamatan

aja. minjam kalau ndak dikoperasinya kelompok ya di bank.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dilakukan pertemuan rutin dan untuk akses permodalannya sudah kerjasama dengan bank bri dan sudah berjalan serta juga adanya keuangan mandiri yang membentuk koperasi, jadi ada dua pilihan bagi masyarakat petani ikan budidaya untuk meminjam modal bisa di koperasi kelompok atau di bank BRI. Tetapi untuk peminjaman modal di bank hanya berlaku di BRI tajinan sampai saat ini, seperti yang diungkapkan oleh RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya, mengatakan, bahwa:

“Untuk model penguatan kelembagan kepada petani ikan yang ada di Kecamatan Wajak sudah ada, kemarin sudah ada badan hukumnya tapi belum jadinya saya kurang tau. kayaknya sih sudah jadi. Untuk pengembangan bisnis ada kredit, terus suruh ngajukan tanda usaha terus suruh buat ini cuman itu tapi tidak ada fungsinya, ndak bisa buat minjam di bank ,kemudian ada rapat perkumpulan permodalan, dan sekarang sudah bisa di Bank BRI tajinan, seharusnya semua anggota punya, berhubung ini gratis ndak butuh biaya tapi ndak ada yang mau, batas maksimal kita per orang 25 juta, satu tahun batas waktu surat ijin usaha biaya gratis, sudah keseluruhan malang, kalau saya baru mei 2015 baru 1 tahun kita ngajukan KUR kredit-kredit biasa lembaga keuangan hanya bekerjasama dengan Bank BRI Tajinan.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh RD (L:47th) bahwa untuk akses permodalan bagi para petani ikan budidaya dikecamatan wajak baru bisa di bank Bri Tajinan dengan menunjukkan sertifikat usaha budidaya atau yang dinamakan surat ijin usaha. Berikut adalah tanda daftar kegiatan perikanan yang digunakan untuk melakukan kredit di bank BRI Tajinan:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Pahlawan 100 Malang, 65121
Telp. (0471) 421111 Fax. (0471) 421112
E-MAIL: sekretariat@dmk.malang.go.id
BEPANEN - MALANG 65121

TANDA DAFTAR KEGIATAN PERIKANAN
USAHAWIS BUDIDAYA IKAN
Nomor: 001/0000/2016

IDENTITAS PEMILIK
Nama: BUDI KURNIAWAN
No. Telp: 0812 3333 3333
Tempat: Malang
Pekerjaan: Budidaya Ikan

DATA KEGIATAN
No. Daftar: 001/0000/2016

No	Spesies & Jenis	Luas (Ha)	Luas (M ²)	Status
1	Lele	0,5	500	Produksi

DATA KEGIATAN
Nama: BUDI KURNIAWAN
Tempat: Kumpang
Kecamatan: Wajak
Kabupaten: Malang

MALANG, 17 Mei 2016
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
[Stempel Resmi]

Gambar 6: Tanda Daftar Kegiatan Perikanan

Sumber: Data Hasil Observasi Peneliti, 2016

Dokumen tersebut yang tertera pada gambar 6 merupakan tanda daftar kegiatan perikanan yang dapat digunakan untuk melakukan kredit sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh RD (L:47th) di atas. Pernyataan selanjutnya juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan ZA (L:50th) selaku bendahara kelompok tani ikan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk model penguatan kelembagaan kepada petani ikan yang ada di Kecamatan Wajak, ada sertifikat pembudidaya

pembuatan gratis khusus pembuatan ikan”,(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan jika penguatan kelembagaan untuk masyarakat petani ikan budidaya yaitu salah satunya dengan adanya sertifikat pembudidaya secara gratis. Namun untuk para pembudidaya belum mendapatkan akta notaries hanya saja sosialisasi sudah dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksor, sebagai berikut:

“Lek e notaris tasek derng enten, Tasik sosialisasi niku,”(Kalau Notaris masih belum ada, masih Sosialisasi).”(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak)

Seperti yang diungkapkan oleh IT (L:52th) bahwa masyarakat petani ikan budidaya di kecamatan wajak belum mendapatkan akta notaris dan masih disosialisasikan terkait hal itu.

2) Faktor Penghambat

a) Tingkat Keamanan

Salah satu faktor penghambat dalam kegiatan budidaya ikan air tawar dikecamatan wajak yaitu terkait dengan keamanan, dimana tingkat keamanan yang memang dalam kondisi yang kurang baik. Seperti yang diungkapkan oleh IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksor, mengatakan bahwa:

“Lek e niki niku, mulai wonten sering-sering niku enggeh enten penyakit, coro mriki niku ndas e ireng/maling niku, maleh katah sing jogo niku solusine (kalau disini

kendalanya itu masih adanya banyak pencuri ikan, jadi solusinya kita diadakan penjagaan secara bergantian).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh IT (L:52th) bahwa kendala yang banyak di rasakan oleh para petani ikan budidaya yaitu masih banyak pencuri ikan daripada kendala seperti penyakit-penyakit yang ada pada ikan air tawar, sebagaimana yang diungkapkan oleh ZA (L:50th) selaku pembudi daya ikan ikan, mengatakan, bahwa:

“Penyakit kug ndak onok penyakit, kan airnya terus ganti jadi ndak sampek onok penyakit, kalau maling ya ada ae, tapi ya ada yang jaga, dadi ya saling njogo.” (kalau kendala penyakit tidak ada, karena kan airnya ganti terus jadi tidak sampai terkena penyakit, pencuri ya ada saja, tapi ya sekarang ada yang jaga, jadi saling menjaga).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Pada hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut memang menunjukkan bahwa faktor penghambat atau kendala yaitu pada tingkat kemananannya. Selain itu wawancara selanjutnya dilakukan dengan WN (L:45th) selaku pegawai badan penyuluh perikanan yang menangani langsung dilapangan, mengatakan bahwa:

“Jadi untuk kendala secara teknis kita ndak ada jadi untuk non teknisnya itu rata-rata keamanan, kemudian abu gunung. Jadi kalau hujan abu itu banyak yang penyakit.”(wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala atau hambatan daripada petani budidaya ikan air tawar secara non teknisnya pada tingkat keamanan, selain itu juga karena faktor cuaca dimana jika terjadi abu gunung atau hujan abu yang akan menyebabkan penyakit pada ikan air tawar yang dibudidaya. Faktor keamanan yang sebagaimana di ungkapkan oleh informan dapat tergambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 7: Kolam Budidaya yang Berlokasi di Pinggir Hutan

Sumber: Data Hasil Observasi Peneliti

Pada gambar 7 terlihat lokasi budidaya yang berada di area pinggir hutan yang menyebabkan faktor keamanan dalam hal ini menjadi faktor penghambat dalam budidaya ikan air tawar di kecamatan Wajak. Berbeda dengan narasumber sebelumnya NS (L:51th) selaku kepala Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Kalau kendala dari kacamata pemerintah itu keterbatasan anggaran, sumber pembiayaan, bisa dari bank, CSR, kita itu bantu peralatan, Fokus keperalatan. Di BRI kalau bank uang, BRI kita undang dapat kompensasi.” (wawancara

pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh NS (L:51th) bahwasanya yang menjadi kendala yaitu keterbatasan anggaran itu dari kacamata pemerintah.

2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan kelautan Periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan dilihat dari 8 tahapan Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis (Bryson : 2007)

Fokus kedua dalam penelitian ini adalah mengenai evaluasi rencana strategis (Renstra) dinas perikanan dan kelautan periode 2011-2015 terkait program minapolitan budidaya dilihat dari 8 tahapan evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis (Bryson:2007). Pemaparan peneliti terkait fokus penelitian yang telah diperoleh peneliti selama proses penelitian di lapangan berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi berperan sebagai stakeholder yang membuat keputusan. Setiap stakeholder dalam melaksanakan kegiatan strategisnya mempunyai posisi dan tugas masing-masing. Dengan menetapkan orang, kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategis. Sehingga antar stakeholder yang

terlibat mempunyai tanggungjawab yang berbeda demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program minapolitan budidaya di kecamatan wajak melibatkan beberapa stakeholder dalam mencapai tujuannya. Dimana stakeholder tersebut meliputi dinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang, balai penyuluhan pertanian (BPP) kecamatan Wajak dan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan data primer dari wawancara dengan WN (L:45th) selaku pihak BPP kecamatan Wajak, yang mengatakan bahwa:

“Untuk kerjasamanya BPP kita bekerjanya di pemberdayaan di SDMnya dan diteknisnya. Jadi untuk DPK yaitu mensupport dalam bentuk bantuan, jadi kita sebagai pelaksana dilapangan dan mereka yang mensupport dengan bantuan tadi, dan untuk tanggungjawab kelompok minapolitan budidaya ya kita disini.”(wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan WN (L:45th) menunjukkan jika kerjasama dilakukan dari pihak DPK, BPP dan masyarakat setempat. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak antara pihak DPK dan BPP dapat dilihat sebagai mana data sekunder di bawah ini:



Gambar 8: Koordinasi antara perwakilan pejabat dinas perikanan dan kelautan kabupaten malang dengan pegawai BPP kecamatan Wajak
Sumber: Dokumen Profil BPP kecamatan Wajak

Pernyataan dari hasil wawancara dengan pihak BPP yaitu WN (L:45th) selanjutnya didukung dengan data primer hasil wawancara dengan Bapak IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksuri di bawah ini:

“Lek kerjasamane nuku nggèh wonten saking petani saking kecamatan saking dinas e saking UPT pertanian mriki (BPP). Biasane mangke wonten pertemuan ngoten saking BPP damel masyarakat mriki terutama engkang budidaya ulam. (Kalau kerjasamanyaitu ya ada dari petani, dari dinas, dari UPT pertanian (BPP). Biasanya nanti ada pertemuan dari BPP untuk masyarakat sini terutama pembudidaya ikan.)”(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan jika ada kerjasama antara masyarakat, dinas pertanian dan DPK dalam pembudidayaan ikan

di kecamatan Wajak. Pernyataan yang sama juga datang dari RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani mina jaya, yang menyatakan bahwa:

“Kalau kerjasama itu ya ada sering. Kita dikumpulkan dan selanjutnya di beri arahan atau masukan-masukan tentang ilmu perikanan. Biasanya dari BPP sini (kecamatan Wajak). Selain itu juga sharing-sharing tentang masalah, dan juga kalau ada kendala apa seumpamanya gitu dari pihak BPP atau DPK turut membantu.”
”(wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Wawancara di atas menunjukkan jika kerjasama yang dilakukan dari BPP ataupun DPK dilakukan dalam bentuk sharing atau pemberian arahan dan masukan dalam ilmu-ilmu perikanan. Pada dokumentasi sebelumnya Gambar 8 yang menunjukkan adanya kerjasama antar *stakeholder* dalam program minapolitan yang berasal dari pihak DPK dan BPP. Selanjutnya, pada data sekunder ini akan menunjukkan adanya kerjasama antara DPK melalui BPP kepada masyarakat sebagaimana hasil dokumentasi di bawah ini:



Gambar 9: Koordinasi antara pegawai BPP Kec. Wajak dengan masyarakat pelaku minapolitan budidaya

Sumber: Dokumen Profil BPP kecamatan Wajak

b. Memperjelas atau mengidentifikasi mandate organisasi

Kabupaten Malang membuat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan karena sudah adanya penetapan kawasan Minapolitan secara nasional pada Tahun Anggaran berjalan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan. Selain itu dasar normatif perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Kemudian Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar.

Sebagaimana data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) selaku pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Penetapan Wajak sebagai lokasi pelaksanaan program minapolitan budidaya atau di jadikan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Diantaranya yang pertama jelas airnya, jadi memang kualitas airnya bagus tanpa ada pencemaran. Jumlah mata airnya iyaitu sangat banyak sekali dikecamatan wajak ini lebih dari 30 mata air. Kemudian lingkungan juga mendukung dan SDM masyarakat juga sudah mendukung. Jadi istilahnya ditetapkan sebaga minapolitan disitu dilihat dari pekerjaannya sudah ada kemudian dari masyarakatnya sendiri sudah ada yang mengawali, jadi untuk melihara ikan sudah ada beberapa kelompok yang mengawali, jadi itu sebagai embrio.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan bahwa penetapan kecamatan wajak sebagai lokasi pelaksanaan program minapolitan budidaya atau sentra budidaya ikan air tawar dikarenakan Wajak memiliki kualitas air yang bagus dan sudah ada beberapa orang yang memulai membudidayakan ikan air tawar di kecamatan Wajak.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya surat keputusan menteri dan penetapan kawasan minapolitan di kecamatan wajak yang berada di kabupaten malang menjadi landasan hukum dan menjadi mandate formal dan informal bagi dinas perikanan dan kelautan kabupaten malang dalam upayanya untuk melaksanakan dan membuat program yang baik dan terarah untuk program minapolitan budidaya ikan air tawar.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Untuk mencapai tujuan umum pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera dalam arti mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, tingkat ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan dengan melihat kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada di darat, laut dan pesisir yang dilakukan dengan berpedoman pada misi Organisasi tersebut. Misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

Berdasarkan misi DKP Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang aman, lestari, berdaya saing, dan meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu pada proses pelaksanaannya dari setiap pihak memiliki cara masing-masing, pihak masyarakat pembudidaya ikan air tawar IT (L:52th) juga selaku kelompok tani ikan sumber miksur, menyampaikan bahwa:

“Dados mriki niku mboten sah nyade enten tiang sing ngandani, dados konsumen niku tertarik saking konco-konco. Pas panen dadi lek enten tiang nyulami niku dilarag dados nyetrum potas,,iya anu dalu ada maling diobat enggeh mati sak kolam niku samping alas keamanan terkendala makane seng njogo kedah gantosan. (jadi pembudidaya disini tidak perlu memasarkan hasil perikanannya tetapi konsumen sudah tertarik untuk membeli dari pengalaman

teman-temannya. Waktu panen jadi kalau ada orang yang memanen ikan itu dilarang panen menggunakan strum atau obat kimia, kendalanya lokasi dipinggir hutan jadi keamanannya terkendala. Sehingga yang jaga harus bergantian)." (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dari pihak masyarakat pembudidaya ikan air tawar untuk mewujudkan hasil perikanan yang memiliki daya saing yaitu dengan memberitahukan ke teman-teman pembudidaya lainnya agar tertarik dan untuk mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari yaitu dalam memanen hasil budidaya dilarang menggunakan penyetrum dan bahan kimia. Sedangkan dari ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan mengatakan bahwa,:

"Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing jadi kita ngikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis pelan-pelan sebagian kita beralih ke ikan hias, seperti koi dan nilai. Sementara cara mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari lek neng kene kadang onok sing nganggo obat setrum, lek ndek kono onok tempat sing diengoni ya wes tau (Disini kadang ya masih ada yang pakai obat sama setrum)." (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak)

Pada hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut dikatakan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing yaitu dengan mengikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya pelan-pelan beralih ke ikan hias. Sedangkan untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari sama seperti yang diungkapkan IT (L:52th) yaitu tidak boleh menggunakan obat dan penyetrum pada waktu untuk memanen

ikan. Sejalan dengan itu WN (L:45th) selaku pihak BPP yang menangani langsung dilapangan mengatakan bahwa,:

“Strategi dari kita, jadi kita kan memang budidaya, jadi untuk produksi kita kalah dengan jaring sek atdan jaring apung tapi kita menang dikualitas. Kualitas ikan kita lebih bagus kalau tidak ada pencemaran tidak ada residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic kita tidak ada karena peranan kita masih alami kita menang disitu kemudian kita juga ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi jadi kita juga menerapkan teknologi-teknologi terbaru. Jadi untuk kolam yang kecil bisa menghasilkan yang banyak salah satunya itu kemudian ada juga kita beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Kalau di wajak sendiri airnya masih jernih dan terbebas dari residu kimia dan itu upaya kontribusi dari BPP itu untuk menanggapi tantangan kedepan, tantangan kita sebenarnya untuk saat ini adalah debit air yang semakin menurun. Tantangan kita disitu, jadi kita sudah kerjasama dengan dinas kehutanan. itu kita ada program untuk penyelamatan mata air sekarang, mulai tahun kemarin kita sudah menanam pohon di atas mata air, diradius 200 m diatas mata air diatasnya kita tatanmi kayu semua, kayu yang harapan kita nanti disitu tidak ada yang ditebang. jalan satu-satu nya yang kita tanam,tanaman kami yang menghasilkan buah, jadi kalau kayu saja 6 sampai 8 tahun ditebang oleh pemerintah, tapi kalau buah tidak akan ditebang karena kan diambil buahnya itu, jadi yang kita tanam kemarin ada nangka ada durian kemudian ada bicung/kluwek itu yang kita tanam. Jadi harapan kita bisa mencapai puluhan tahun, karena yang diambil hanya buahnya saja terserah. jadi kita berikan ke petani. Iya bagaimana kita menyelamatkan debit air ini yang pertama memang untuk perikanan yang kedua untuk pertanian, kemarin juga kita adakan pelatihan untuk masyarakat jadi khususnya HIPA himpunan pengguna air, jadi dimasing-masing sudah ada kelompok yang tugasnya menata air dari perikanan maupun pertanian, kita kumpulkan kita adakan pelatihan disini,,kalau berkurangnya kita tidak langsung gitu tidak tapi bertahap ,kemarin coba kita hitung 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu sudah beda, mungkin dengan 20 tahun yang lalu sudah beda. Nah kemarin itu dari hitungan kita kalau 1tahun yang lalu itu kekurangan kita adalah sekitar 20 persen airnya setiap 20 tahun, kehilangan kita 20 persen

tapi kalau kita nanti 6 tahun kedepan kita sudah kehabisan 60 persen, dan sampai 4 tahun kedepannya lagi kita bisa ndak punya air, jadi setiap pengurangan segitu banyaknya nanti 50 tahun kedepan kita tidak punya air sudah habis. Jadi sudah ditebangi semua kayu, jadi yang dimasalahkan itu tadi”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh WN (L:45th) bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan yang memiliki daya saing yaitu memang tidak adanya residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic, karena peranannya masih alami, kemudian ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi dan menerapkan teknologi-teknologi terbaru, kemudian juga dikatakan pelan-pelan sebagian akan beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Sedangkan untuk mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari yaitu dengan menjaga mata air yang kian menurun dengan bekerjasama dengan dinas kehutanan melalui program untuk penyelamatan mata air. Berbeda seperti apa yang diungkapkan oleh NS (L:51th) selaku kepala dinas DPK Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“Strategi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing adalah melalui pembiayaan. Jadi untuk perikanan budidaya ini kita dipatok untuk naik 5 persen, strateginya adalah mencukupkan pembiayaan, kalau teknologi itu udah ada yang mikir. Dengan memberikan kebutuhan pembiayaan itu saja, kalau SDM ndak pernah sambat sini. Selanjutnya cara kita mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari uang kita sedikit pakan kita ndak cukup. Kalau aman kita mengacu pada kualitas air, menjaga kualitas pakan dulu dan air, kalau lestari yaitu dengan mengelola pengelolaan lingkungan sumber air, pesisir ,pengelolaan lingkungan secara umum, bisa sumber.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”.

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak DPK tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing yaitu, dengan memberikan kebutuhan pembiayaan, sedangkan untuk mewujudkan sumberdaya perikanan dan kelautan mengacu pada kualitas air dengan mengelola pengelolaan lingkungan sumber air. Sedangkan dari wawancara dengan RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya mengatakan, bahwa:

“Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing ada, tapi tiap anggota kita punya rahasia sendiri-sendiri. Jadi kita kalau panen banyak yang bantu lebih cepat mana yang panen cuman itu, kadang perlakuan kita dari unibraw itu ada customer yang pakek prebiotic macam-macam lah. kita pakek cara sendiri-sendiri. Sedangkan cara mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari kita kan sering diadakan untuk pelatihan jadi kesimpulan dari pelatihan-pelatihan itu kita membuat pulang ilmu itu sendiri-sendiri jadi tiap orang tidak sama, seperti saya kalau beli pakan kan yang paling murah itu saya oplos buanyak botol-botol kita isi macam-macam bakteri atau mikroba itu. untuk teman-teman yang lain ada yang pakek tapi jadi kita ndak sama, dan tidak mau mencoba punya teman jadi kreasi seni nya disitu. Kita cuman tau tapi kita ndak mau mencoba punya teman, kita sudah komit punya saya yang paling unggul. Tapi kalau ada penyakit ada kendala kita kumpul kita kompak .mencari jalan keluar sharingsharing bagaimana mencari jalan keluar.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan yang memilki daya saing ,aman dan lestari yaitu setiap pembudidaya memiliki cara sendiri-sendiri dengan mengoplos pakan dengan botol-botol isi macam-macam bakteri atau mikroba.

d. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)

Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dalam program minapolitan budidaya ikan air tawar sesuai dengan data hasil wawancara, terbagi dalam beberapa proses seperti,:(1) Adanya Program nasional bidang kelautan dan perikanan; (2) permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat; serta (3) kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha perikanan dan kelautan memiliki keterbatasan dalam akses modal. Untuk lingkungan eksternal baik peluang maupun ancaman terkait budidaya ikan air tawar/minapolitan sebagaimana yang telah dijelaskan tercantum dalam dokumen Renstra DKP kabupaten Malang tahun 2011-2015 seagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 11: Analisis SWOT minapolitan budidaya

	Peluang	Ancaman
Lingkungan Eksternal	a. Adanya Program nasional bidang kelautan dan perikanan b. Permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat.	a. Kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan memiliki keterbatasan dalam akses modal.

Sumber: Dokemen Renstra DKP Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Secara rinci untuk faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Peluang

a) Adanya Program nasional bidang kelautan dan perikanan

Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan arahan kebijakan pembangunan, terkhusus pada pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia diantaranya adalah Program Pengembangan Minapolitan. Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan program minapolitan adalah kecamatan Wajak yang berada di Kabupaten Malang.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/399/Kep/421.013/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/447/Kep/421.013/ 2008 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2008. Maka Kawasan sentra pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Malang dipusatkan di Kecamatan Wajak. Data primer yang menunjukkan Wajak sebagai lokasi pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45th)

selaku pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Penetapan Wajak sebagai lokasi pelaksanaan program minapolitan budidaya atau di jadikan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Diantaranya yang pertama jelas airnya, jadi memang kualitas airnya bagus tanpa ada pencemaran. Jumlah mata airnya iyaitu sangat banyak sekali dikecamatan wajak ini lebih dari 30 mata air. Kemudian lingkungan juga mendukung dan SDM masyarakat juga sudah mendukung. Jadi istilahnya ditetapkan sebaga minapolitan disitu dilihat dari pekerjaannya sudah ada kemudian dari masyarakatnya sendiri sudah ada yang mengawali, jadi untuk melihara ikan sudah ada beberapa kelompok yang mengawali, jadi itu sebagai embrio.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan bahwa penetapan kecamatan wajak sebagai lokasi pelaksaan program minapolitan budidaya atau sentra budidaya ikan air tawar dikarenakan Wajak memiliki kualitas air yang bagus dan sudah ada beberapa orang yang memulai membudidayakan ikan air tawar di kecamatan Wajak.

b) Permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat.

Dalam suatu program ataupun kebijakan yang berkaitan dengan permintaan pasar terhadap produk kebutuhan pokok merupakan hal terpenting. Hal tersebut dikarenakan permintaan pasar merupakan jalan dimana program atau hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dinilai kualitasnya. Dengan permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin banyak maka kualitas

terhadap produk perikanan tersebut akan meningkat bahkan nilai ekonomisnya pun akan meningkat. Sesuai dengan data hasil wawancara dengan RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani mina jaya, yang menyatakan bahwa:

“Untuk permintaan ikan disini kadang tak tentu, bisa sekali waktu meningkat namun sekali waktu menurun, itu pengaruh kondisi cuaca juga untuk budidaya kami dikecamatan wajak sini. (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa permintaan daripada ikan air tawar dikecamatan wajak tidak tentu bisa kadang meningkat atau menurun. WN (L:45th) selaku pegawai BPP di kecamatan wajak yang menangani langsung dilapangan mengatakan, bahwa:

“Untuk permintaan ikan daripada tahun kemarin meningkat dari kelompok pemancingan dan dari pasar ndak tentu memang tergantung kualitas ikan kita bagus atau ndak, kalau bagus ya banyak yang beli terutama dari para pengepus ikan disini” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45th) menunjukkan bahwa untuk permintaan meningkat ditahun ini dari kelompok pemancingan dan dari pasar tergantung dari kualitas ikannya.

2) Ancaman

- a) Kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan memiliki keterbatasan dalam akses modal.

Modal merupakan hal terpenting dalam suatu kegiatan program ataupun kebijakan. Begitu pula dalam program minapolitan dikecamatan wajak. Keterbatasan akses modal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya program tersebut. Sesuai dengan data hasil wawancara dengan IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber makmur mengatakan, bahwa:

“lak kendala mriki enggeh modal niku ,saking bank niku dereng wanton amergi teruse niku kolam e tasek alit mboten angsal dados jaminan” kendalanya modal , dari bank masih belum berani karena kolamnya masih kecil belum bisa buat jaminan” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar salah satunya yaitu modal dan dari bank masih belum bisa pinjam. Berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh RD (L:47th) selaku seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya yang mengatakan bahwa:

“untuk pinjam modal ke bank belum bisa kemarin pas itu saya disuruh pulang gara-gara hanya bawa sertifikat usaha ikan yang dari dinas kepanjen, tapi bisanya disini itu hanya di bri tajinan saja. (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk akses Modal memang terkendala karena para pembudidaya masih belum banyak mempunyai sertifikat usaha dan sertifikat dari

dinas masih belum kuat untuk pinjam di bank-bank lain hanya di bri tajinan saja.

e. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

Menilai lingkungan internal adalah upaya mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Kita dapat mengenalinya dari sumber daya (inputs), strategi yang dijalankan sekarang (process), dan kinerja (outputs). Faktor lingkungan internal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dalam program minapolitan budidaya ikan air tawar sesuai dengan data hasil wawancara, terbagi dalam beberapa proses seperti,; (1) Eksistensi kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan; (2) Tersedia pengusaha yang bergerak di bidang perikanan. (3) Tersedianya potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar serta (4) kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi. Untuk lingkungan internal baik kekuatan maupun kelemahan terkait budidaya ikan air tawar/minapolitan sebagaimana yang telah dijelaskan tercantum dalam dokumen Renstra DKP kabupaten Malang tahun 2011-2015 seagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12: Analisis SWOT minapolitan budidaya

	Kekuatan	Kelemahan
Lingkungan Internal	a. Eksistensi kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan. b. Tersedianya potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar. c. Tersedia pengusaha yang bergerak di bidang perikanan.	a. Kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi.

Sumber: Dokemen Renstra DKP Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Secara rinci untuk faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Kekuatan

a) Eksistensi kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Eksistensi kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan dalam perkembangan peningkatan hasil dari pada budidaya ikan air tawar di kecamatan wajak, salah satunya yaitu bentuk,

Perhatian DPK terhadap program minapolitan budidaya di kecamatan wajak sangat mendukung sekali dalam peningkatan hasil daripada program tersebut diantaranya yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terkait budidaya ikan air tawar, bantuan sarana dan prasarana, maupun respon-respon baik ketika terjadi kendala keamanan seperti pencurian. Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan IT (L:52th) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksor, mengatakan bahwa:

“Lek tanggapane pemerintah setempat pas wonten kendala niku enggeh sae ningali teng lokasi langsung, survey langsung, polisi enggeh dateng langsung, dadi nate iwak siap panen induk niku pernah ilang,,staf deso juga bertindak (Tanggapan pemerintah setempat ketika ada kendala itu sangat baik dan akan langsung datang ke lokasi, survey langsung, polisipun juga datang langsung

saat ikan siap panen induk itu pernah hilang, pegawai desa juga bertindak).”(wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Sebagaimana dikatakan oleh bapak IT (L:52th) bahwa tanggapan dari pemerintah dan khususnya pihak-pihak terkait sangat baik dan responsive dimana dikatakan langsung menuju kelokasi jika terjadi permasalahan dalam pembudidayaan ikan air tawar. Selain itu, eksistensi DPK selanjutnya terlihat dari adanya pertemuan yang diadakan oleh dinas, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak RD (L:47th) sebagaimana berikut:

“Kita ndak tentu tergantung dinas,,kadang mendadak, yang dikabari ketua kelompoknya terus nanti disebar ke anggotanya.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Rumah RD BPP Kecamatan Wajak)”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan dari DPK kepada pembudidaya ikan air tawar.

b) Tersedianya potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar.

Hal ini selaras dengan alasan dan pertimbangan ditetapkannya kecamatan wajak sebagai minapolitan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Malang yaitu karena sumber daya alam yang melimpah dan besar yaitu terdapatnya sumber air di kecamatan wajak dengan 30 sumber mata air. Sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45th) selaku pegawai Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Penetapan Wajak sebagai lokasi pelaksanaan program minapolitan budidaya atau di jadikan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di dasarkan atas beberapa pertimbangan. Diantaranya yang pertama jelas airnya, jadi memang kualitas airnya bagus tanpa ada pencemaran. Jumlah mata airnya iyaitu sangat banyak sekali dikecamatan wajak ini lebih dari 30 mata air. Kemudian lingkungan juga mendukung dan SDM masyarakat juga sudah mendukung. Jadi istilahnya ditetapkan sebaga minapolitan disitu dilihat dari pekerjaannya sudah ada kemudian dari masyarakatnya sendiri sudah ada yang mengawali, jadi untuk melihara ikan sudah ada beberapa kelompok yang mengawali, jadi itu sebagai embrio.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) tersebut menunjukkan bahwa tersedianya sumber mata air yang sangat besar dan melimpah dikecamatan wajak.

c) Tersedia pengusaha yang bergerak di bidang perikanan.

Tersedianya pengusaha yang bergerak di bidang perikanan menjadi hal yang sangat penting bagi terlaksananya program minapolitan budidaya dimana salah satunya yaitu hasil daripada produk budidaya ikan air tawar akan dipasarkan dengan berbagai cara salah satunya memasarkan ikan melalui pengepul, pemancingan ataupun rumah makan. Pernyataan itu didukung dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya, mengatakan bahwa:

“Biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya ada ketua kelompoknya yang mengepul, bergiliran satu kelompok kalau panen, cuman pasar ikan di kecamatan belum mencukupi dikecamatan wajak. kalau disini baru satu orang yang budidaya terus dijual untuk lalapan baru satu orang kalau kecamatan sebelah seperti pagelaran itu sudah ada olahan kripik kulit lele abon ,sudah kekurangan soalnya. Kalau pemerintah biasanya waktu panen datang membuat pakan dan ada kendala dating.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Berdasarkan wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan bahwa memang pemasaran hasil perikanan budidaya masih melalui pengepul dan bergiliran dari satu kelompok .dimana masih dipasarkan di pasar kecamatan sendiri.

2) Kelemahan

a) Kebutuhan benih dan induk ikan yang belum tercukupi.

Kebutuhan benih dan induk ikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kualitas program minapolitan budidaya. Hal tersebut dikarenakan benih dan induk ikan adalah suatu pokok utama untuk melihat kualitas daripada ikan air tawar tersebut. Sesuai dengan data hasil wawancara dengan RD (L:47th), selaku seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya mengatakan, bahwa:

“Kalau induk dan bibit kita dapat dari dinas tetapi masih belum cukup untuk kebutuhan pembudidaya di kecamatan wajak ini, kadang untuk membeli bibit kita beli di daerah tetangga. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Rumah RD BPP Kecamatan Wajak)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan bibit dan induk untuk pembudidaya ikan air tawar masih belum mencukupi di kecamatan waja ini.

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Isu-isu strategis DKP pada bidang budidaya diperoleh dari analisis lingkungan internal, eksternal dan mengacu pada Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2011-2015, serta mereview dokumen perencanaan lainnya, maka diperoleh isu strategis pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Ketersediaan Benih dan Induk Ikan Unggul
 - 2) Peningkatan ketersediaan benih dan induk ikan unggul.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.
 - 4) Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan.
 - 5) Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan kelestarian sumberdaya perikanan.
 - 6) Peningkatan kesiagaan terhadap bencana alam laut.
 - 7) Pemantapan kelembagaan, sumberdaya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung.
- (sumber: Renstra DPK Kabupaten Malang 2011-2015)

Dari beberapa isu strategis yang terdapat dalam Renstra Kabupaten Malang tahun 2011-2015 maka selanjutnya untuk menganalisis dalam penelitian ini hanya diambil poin-poin yang berhubungan dengan budidaya ikan air tawar dikecamatan wajak. Sehingga isu-isu strategis tersebut yang berkaitan dengan budidaya ikan air tawar diantaranya adalah:

1) Peningkatan Ketersediaan Benih dan Induk Ikan Unggul

Peningkatan Ketersediaan benih dan Induk Ikan unggul budidaya ikan air tawar di kecamatan wajak, memiliki pihak yang terkait dalam proses implementasinya. IT (L:52th), selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksur kecamatan wajak, mengatakan bahwa:

“Awalnya bibit itu dari pemerintah, bibit per orang, bibit gantosan kadang-kadang per kelompok. Lek e konco-konco kurang benih mendet mriki lek rumiyen niku 40. 1 kelompok nyebar teng wajak niki sade benih teng mriki, luar daerah enggeh nate beli teng wajak. (awal bibit dari pemerintah, bibit per orang, bibit gentian, kadang-kadang per kelompok, kalau teman-teman kurang benih ambil disini, kalau dulu ada 40 1 kelompok disebar di wajak ini, ada benih di sini, dari luar daerah juga pernah beli di wajak)” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Pernyataan bapak IT (L:52th) menunjukkan bahwa adanya ketersediaan bibit indukan ikan air tawar yang akan dibudidaya dari pemerintah untuk para pembudidaya dan sampai saat inipun diwajak juga dapat menghasilkan bibit sendiri sampai pembudidaya dari luar daerahpun membeli di wajak tersebut. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ZA (L:50th) selaku bendahara kelompok tani ikan mengatakan bahwa,:

“Dari dinas awalnya,,bibit sendiri dulu dapet induknya dari dinas.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ZA (L:50th) bahwa bibit unggul berupa indukan ikan air tawar diberikan kepada para

pembudidaya dikecamatan wajak oleh DPK Kabupaten Malang.

Selanjutnya diungkapkan oleh WN (L:45th) selaku pihak BPP

Kecamatan Wajak mengatakan bahwa:

“Lumayan lebih banyak, disini kalau tergantung kebutuhannya terkadang disini kalau kita kelebihan benih kadang juga kekurangan tergantung musimnya kalau pas banyak yang budidaya itu kita kekurangan jadi untuk saat ini kita juga kekurangan ikan lele maupun nila tapi dilain waktu kita kelebihan karena kan produksi ikan itu kan kondisi belum intensif, jadi pembenihan itu masih belum jadi usaha utama, usaha utama mereka masih kepembesaran, jadi kalau pembenihan sudah jalan tapi yaitu belum intensif jadi kalau pas ada musimnya bagus benih ikan melimpah.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Pernyataan WN (L:45th) menggambarkan bahwa kualitas bibit unggul yang baik lumayan lebih banyak didapat dan dilain waktu dikatakan kadang di kecamatan wajak kelebihan bibit namun dilain waktu juga bisa kekurangan karena belum intensifnya kondisi terhadap produksi ikan oleh para pembudidaya. RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya juga mengatakan bahwa:

“Kalau pembibitan kab malang sudah ada yang ditunjuk untuk kecamatan maguhan khusus untuk kecamatan maguhan itu, itu sedangkan disini juga ada 1, 2 orang tapi belum mencukupi untuk kebutuhan untuk anggota yang banyak budidaya ikan disini ,karena sulit.”(wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya tempat di Kabupaten Malang ini untuk pembibitan yaitu di kecamatan maguhan, tapi juga belum mencukupi

untuk kebutuhan anggota para pembudidaya, untuk itu memang perlu adanya peningkatan ruang tersendiri di kecamatan wajak terkait dengan budidaya pembibitan.

2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak oleh pemerintah DKP, dari pusat propinsi dan BPP yang menangani langsung dilapangan yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembinaan dan sosialisasi. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan WN (L:45th) selaku pegawai badan penyuluh pertanian BPP sebagai berikut,:

“Ada kita pelatihan ada bermacam-macam jadi dari bpp sendiri ada, pembinaan ada, pembinaan dari BPP ke kelompok kita ada pelatihan mandiri disitu kita juga ada pelatihan dari kabupaten propinsi dan dari pusat, rutin. Itu kalau dari propinsi satu tahun itu 4 sampai 6 kali. Tempat kita menyesuaikan dengan kalau yang dari kelompok ya kita dikelompok tapi kalau dari pusat kita ada dibanyuwangi atau disukabumi sedangkan kalau dari propinsi bisa ada dikepanjen jadi memang tempat ndak tentu, tergantung comodity yang diusahakan. Jadi misal kayak ikan nilai itu pelatihannya ada dipasuruan, khusus ikan lele itu ada dikepanjen, kemudian khusus ikan galak itu ada diprigi sama di pandaan, untuk ikan hias ada dipunten, jadi beda-beda, jadi didinas kelautan khususnya propinsi ini punya klaster sendiri-sendiri jadi khusus untuk udang udang galak itu sudah ditentukan pasarnya untuk ikan nila lele itu sudah ada jadi ditempat spesialisnya itu disitu kita pelatihan. Sementara untuk penguatan kelembagaan kita ada pertemuan rutin untuk kelembagaan, kita juga sudah kerjasama dengan untuk permodalan kita bisa pinjam ke bri ,sudah berjalan. Sementara dengan bri tapi juga ada keuangan mandiri kelompok itu ada yang membentuk koperasi satu kecamatan aja .minjam kalau ndak dikoperasinya kelompok ya di bank”

(wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Sebagaimana yang disampaikan dari hasil wawancara diatas bahwa pemberdayaan masyarakat petani ikan budidaya di kecamatan wajak melibatkan beberapa stakeholder. Diantaranya dari DKP, BPP maupun dari pusat, Propinsi yaitu dalam bentuk pembinaan-pembinaan mandiri, sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan juga dalam bentuk penguatan kelembagaan. ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan mengatakan, bahwa:

“Sering, seluruh anggota. Gentian, pelatihan dirumah pak zainal kadang 1 bulan sekali. Kita juga bekerjasama dengan BLK, pelatihan tidak hanya dari dinas tapi juga maca dari dinas kabupaten propinsi pusat itu ada tapi dimasyarakat juga ada sendiri. Sementara untuk model penguatan kelembagan kepada petani ikan yang ada di Kecamatan Wajak diadakan seperti adanya sertifikat pembudidaya pembuatan gratis khusus pembuatan ikan.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Dari hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali dirumah ZA (L:50th) dan dikatakan pula pelatihan tidak hanya dari dinas tetapi juga dari propinsi dan masyarakatpun juga mengadakan pelatihan sendiri. Pernyataan tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya mengatakan, bahwa:

“Kita ndak tentu tergantung dinas, kadang mendadak. Yang dikabari ketua kelompoknya terus nanti disebarkan ke anggotanya biasanya kita 3 bulan sekali melakukan perkumpulan, tapi kadang setiap minggu itu kumpul dirumah anggota, yang bertanggung jawab melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tersebut dari dinas ke BPP, tapi yang sering

disini dari propinsi.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pihak DKP Kabupaten maupun pusat/propinsi tidak tentu kadang dilaksanakan secara mendadak, selain itu kadang setiap minggu ada perkumpulan sesama anggota pembudidaya ikan. Sejalan dengan itu NS (L:51th) selaku kepala dinas DKP Kabupaten Malang mengatakan, bahwa,:

“Untuk pelatihan dan sosialisasi dilakukan oleh penyuluh perikanan, penyuluh perikanan itu dikaranduren, Selanjutnya untuk model penguatan kelembagaan jadi kelembagaan itu akan didorong diperkuat potensinya dengan Undang-undang, yang punya target meningkat kualitasnya, untuk peningkatan kualitas kelompok, yang damping penyuluh.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)

Dari wawancara dengan NS (L:51th), menunjukkan jika pelatihan dilakukan oleh penyuluh perikanan dan tujuan daripada penguatan kelembagaan yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas kelompok yang didampingi oleh penyuluh.

3) Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan.

Pemasaran hasil perikanan dari budidaya ikan air tawar di kecamatan wajak yaitu diantaranya rumah makan, pemancingan, ataupun dengan dijual melalui pengepul. Sebagaimana diungkapkan oleh WN (L:45th) dari pihak balai penyuluh pertanian (BPP) kecamatan wajak mengatakan, bahwa:

“Biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya kita sudah ada link sendiri jadi baik di pemancingan, rumah makan atau pengepul kita sudah ada. Dan untuk olahan disini untuk saat ini yang ada hanya babyfish, itu keripik ikan kecil-kecil. banyak diproduksi dipondok pesantren satu pondok saja di anggota” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WN (L:45th) bahwa pemasaran ikan hasil budidaya di pasarkan melalui pengepul dan juga untuk pemancingan maupun rumah makan, dikatakan sudah mempunyai link sendiri-sendiri untuk pemasarannya. Seperti yang dinyatakan IT (L:52) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksor mengatakan, bahwa:

“Nyadene biasane lek mriki damel pemancingan, biasa e niku borongan. Kelompok pemancingan yang borong mboten dipasarne teng pasar ikan, daerah turen bogor niku langsung mriki wonten. (biasanya disini untuk pemancingan dan biasanya yang borong yaitu kelompok pemancingan).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Berdasarkan wawancara dengan IT (L:52th) menunjukkan bahwa pemasaran ikan budidaya melalui kelompok pemancingan dan juga pembeli dari luar kecamatan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan yang mengatakan bahwa:

“Biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya nggeh nyade pundut kiambak. wes onok sing butuh ndek pemancingan ambil. Lek seng nyade anu bentuk langsung jadi olahan blum ada ndek kene. Lek biasane koyok ngunu iku hasil e gak onok sing ngambil. Produksi kita masih belum mencukupi untuk wajak ini. Paling banyak permintaan

pemancingan, langsung masyarakat tidak ada keterlibatan dari dinas.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Dari hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut menunjukkan bahwa untuk pemasaran hasil perikanan budidaya melalui permintaan dari kelompok pemancingan, dan dikatakan pula bahwa dari pihak dinas masih belum terlibat secara langsung. Jadi dari pihak dinas hanya melakukan pembinaan terkait dengan pemasaran tersebut. Pernyataan itu didukung dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya, mengatakan bahwa:

“Biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanan ada ketua kelompoknya yang mengepul, bergiliran satu kelompok kalau panen, cuman pasar ikan di kecamatan belum mencukupi dikecamatan wajak. kalau disini baru satu orang yang budidaya terus dijual untuk lalapan baru satu orang kalau kecamatan sebelah seperti pagelaran itu sudah ada olahan kripik kulit lele abon, sudah kekurangan soalnya. Kalau pemerintah biasanya waktu panen datang membuat pakan dan ada kendala dating.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Berdasarkan wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan bahwa memang pemasaran hasil perikanan budidaya masih melalui pengepul dan bergiliran dari satu kelompok. dimana masih dipasarkan di pasar kecamatan sendiri.

- 4) Pemantapan kelembagaan, sumberdaya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk para pembudidaya ikan air tawar dikecamatan wajak ini sudah didukung dengan jalan fasilitas yang lengkap dan sudah cukup bagus mendukung untuk peningkatan hasil produksi budidaya. Sebagaimana diungkapkan oleh IT (L:52th) selaku kelompok tani ikan sumber miksor mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar sudah mendukung.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Hasil wawancara dengan IT (L:52th) tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana memang sudah didukung dengan baik. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar itu lengkap, seperti jalan dan fasilitas” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Sebagaimana hasil wawancara dengan ZA (L:50th) juga menunjukkan bahwa sarana prasarana pendukung untuk petani pembudidaya ikan sudah didukung dengan fasilitas jalan yang lengkap. RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya juga mengatakan, bahwa:

“Sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar sangat mendukung sekali

untuk permodalan awal, saya ini dulu kan baggroundnya kan benih itu jadi 3 tahun udah nekuni lele, tidak pernah keluar cuman lele ini. Kalau wajaknya sudah kalau sini belum, tapi untuk lapak-lapaknya ikan sudah ada di wajaknya sudah ada, sama pak camat sudah dibuatkan.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Sebagaimana yang telah di ungkapkan pada hasil wawancara dengan RD (L:47th) menunjukkan jika sarana prasarana pendukung sudah sangat mendukung sekali dan dari pihak kecamatan juga sudah membuat lapak-lapak untuk pembudidaya ikan air tawar dikecamatan wajak tersebut.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang dari faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dikelola menjadi isu-isu dan kemudian dianalisa berdasarkan rumusan strategi dan kebijakan antara lain meliputi:

- 1) Memberdayakan sumberdaya laut dan masyarakat pesisir.
- 2) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pengembangan kawasan minapolitan budidaya.
- 4) Pengembangan kawasan minapolitan tangkap.
- 5) Peningkatan daya saing produk perikanan.
- 6) Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dengan didukung oleh data dan informasi yang terbaru.

Sinergi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang, khususnya fokus pembangunan yang mengarah pada peningkatan produksi dan ketahanan pangan, maka arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kesiagaan terhadap bencana alam laut.
- 2) Peningkatan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui upaya konservasi, rehabilitasi, penataan lingkungan dan penegakan hukum.

- 3) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya.
- 4) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
- 5) Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk perikanan.
- 6) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok, penyediaan data dan informasi.

Sumber: Renstra DPK Kabupaten Malang tahun 2011-2015

Berdasarkan strategi untuk mengelola isu yang terdapat dalam Renstra DPK Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 maka untuk menganalisis penelitian ini di pilihlah poin-poin yang berkaitan dengan budidaya ikan air tawar. Maka diperoleh rumusan strategi untuk mengelola isu yang meliputi:

- 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Malang bebas dari illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui pendekatan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu masyarakat diarahkan sebagai pengelola dan pengguna sumberdaya yang bertanggung jawab dan bijaksana untuk menjamin kelestarian lingkungan. Sebagaimana untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di bidang budidaya dikecamatan wajak, seperti yang dikatakan WN (L:45) pihak

badan penyuluh pertanian (BPP) kecamatan wajak mengatakan, bahwa:

“Untuk pengendalian sangat produktif jadi kita ada tim pokja jadi tim kelompok kerja, pokja itu kita ditingkat kecamatan ada, kabupaten ada kalau di kabupaten itu ada sekitar 12 dinas yang terlibat, kemudian ditingkat kecamatan ada 6 updt, mulai pendidikan, kecamatan, kemudian balai penyuluhan, kepolisian, koramil, kemudian ada dari puskesmas juga”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya system dan pengendalian pengawasan untuk pengelolaan perikanan budidaya di kecamatan wajak yaitu ada tim pokja dari tingkat kecamatan ada 6 updt, kabupaten ada 16 dinas mulai dari balai penyuluhan, kepolisian, koramil, kemudian dari puskesmas. Kemudian hasil dari wawancara dengan ZA (L:50) selaku bendahara kelompok tani ikan mengatakan, bahwa”:

“System pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dari pemerintah setempat dengan diadakannya kerjasama satu kelompok guyub rukun.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan jika pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya dilakukan bekerjasama satu kelompok dan saling guyub rukun antar para pembudidaya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan IT (L:52) selaku ketua kelompok tani ikan sumber miksir mengatakan, bahwa:

“Sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan Sumber daya perikanan dari pemerintah setempat niku *mboten*, *namung masyarakat niki tok kerjasama ngoten* (dari masyarakat sini saja kerjasama).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Sebagaimana hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan pengelolaan perikanan budidaya dilakukan oleh masyarakat sekitar dikecamatan wajak. Sedangkan NS (L:51) selaku kepala dinas DPK Kabupaten Malang mengatakan, bahwa:

“Caranya mengendalikan itu dengan pengawasan, jadi dengan program tadi.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)

Hasil wawancara dengan NS (L:51) tersebut menunjukkan bahwa untuk mengendalikan perikanan budidaya yaitu dengan pengawasan melalui program-program yang telah dibuat.

2) Pengembangan kawasan minapolitan budidaya.

Pengembangan kawasan minapolitan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya melalui pengembangan wilayah pada sentra-sentra produksi perikanan yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penggerak ekonomi masyarakat. Tujuan pengembangan kawasan minapolitan antara lain untuk meningkatkan produksi, produktivitas usaha dan kualitas perikanan serta pendapatan pelaku usaha perikanan.

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang ini berada di kecamatan wajak pada tahun 2009 dilihat dari air yang sangat baik yang sangat berpotensi sekali untuk budidaya ikan air tawar, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan IT (L:52) selaku ketua kelompok tani sumber miksur mengatakan, bahwa:

“Potensi unggulan Wajak niku ningali toyone sae tanah e sae terus diajukaken. Pemerintah niku pertama mriki, dinas enggeh dados kepanjen. Kepanjen mriki ningali kiambak. (Potensi unggulan Wajak itu melihat airnya baik tanaknya juga baik terus dimajukan, pemerintah itu pertama kesini melihat sendiri dari dinas kepanjen). Wajak mulai ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar, tahun 2009.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya atau minapolitan yaitu dengan melihat potensi airnya sangat baik,. Pernyataan tersebut didukung dari wawancara dengan ZA (L:50) selaku bendahara kelompok tani ikan mengatakan, bahwa:

“Sumber paron, memang sumber e gede tanah e niku 4 istilah jowa dadi ndak iso kering, mulo awakmu cilik mbiyen iku terus menerus tanaman niku, onok mina mending. dadian onok iwak e kan masyarakat tambah seneng kan hasilnya tambah banyak. Toyone niku soal e melimpah, ndak tau mati sumber e. (sumber airnya besar jadi tidak bisa kering, airnya melimpah tidak pernah mati sumber airnya).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa potensi unggulan kecamatan wajak yang menjadi sentra

minapolitan budidaya yaitu karena sumbernya besar dan tidak pernah mati dan kering airnya melimpah. Seperti yang disampaikan NS (L:51) selaku kepala dinas DKP mengatakan bahwa ,:

“Terutama air, kemudian tempatnya strategis ,utamanya air. Potensi air,yang menjadikan beda air dari semua kecamatan di kab malang, karena ada potensi dan lokasi.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”.

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa memang kecamatan wajak memiliki potensi air yang bagus dan lokasi yang strategis sebagai sentra minapolitan budidaya. WN (L:45) selaku pihak BPP kecamatan wajak juga berpendapat bahwa:

“Yang pertama jelas airnya, jadi memang kualitas airnya bagus tanpa ada pencemaran. jumlah mata airnya yaitu sangat banyak sekali dikecamatan wajak ini lebih dari 30 mata air. Kemudian lingkungan juga mendukung dan SDM masyarakat juga sudah mendukung, jadi istilahnya ditetapkan sebagai minapolitan disitu dilihat dari pekerjaannya sudah ada kemudian dari masyarakatnya sendiri sudah ada yang mengawali, jadi untuk melihara ikan sudah ada beberapa kelompok yang mengawali, jadi itu sebagai embrio.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan WN (L:45) tersebut bahwa dikecamatan wajak ada lebih dari 30 mata air, kemudian lingkungan dan sdm masyarakatnya juga mendukung karena

beberapa kelompok masyarakat juga sudah lama mengawali budidaya ikan air tawar.

3) Peningkatan daya saing produk perikanan.

Peningkatan daya saing produk perikanan dimaksudkan untuk menumbuhkan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha kelautan dan perikanan, baik pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan dan pemasar ikan. Selain itu dengan meningkatkan kualitas dan higienitas produk unggulan perikanan dan pasca panen. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembinaan usaha dan pemanfaatan fasilitas modal usaha guna meningkatkan dan memperlancar pengelolaan usaha serta penciptaan lapangan usaha bidang kelautan dan perikanan.

Untuk bidang budidaya ikan air tawar yang berada dikecamatan wajak dan sebagai sentra minapolitan sebagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya antara lain yaitu dengan cara mengikuti kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar selain itu juga dengan pelan-pelan beralih ke ikan hias ,sebagai salah satu bentuk usaha baru budidaya, sebagaimana hasil wawancara dengan ZA (L:50) selaku bendahara kelompok tani ikan mengatakan bahwa,:

“Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing kita ngikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan konomis pelan-pelan sebagian kita beralih ke ikan hias seperti koi dan nilai.” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mengikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat serta beralih ke ikan hias sangat perlu untuk meningkatkan daya saing hasil produk budidaya dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Didukung dari hasil wawancara dengan WN (L:45) selaku pihak BPP kecamatan wajak mengatakan, bahwa,:

“Jadi kita kan memang budidaya, jadi untuk produksi kita kalah dengan jaring sekat dan jaring apung tapi kita menang dikualitas, kualitas ikan kita lebih bagus, tidak ada pencemaran tidak ada residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic kita tidak ada karena peranan kita masih alami kita menang disitu, kemudian kita juga ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi jadi kita juga menerapkan teknologi-teknologi terbaru jadi untuk kolam yang kecil bisa menghasilkan yang banyak, salah satunya itu kemudian ada juga kita beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”.

Hasil wawancara dengan WN (L:45) tersebut mengungkapkan bahwa, budidaya ikan air tawar dikecamatan wajak dari yang lainnya dikatakan menang dikualitas dan tidak ada pencemaran ataupun residu kimia jadi tidak ada resiko antibiotic karena peranan budidaya dikecamatan wajak masih alami, demikian itu yang menjadikan alasan bahwa hasil produk ikan air tawar budidaya tersebut berkualitas baik dan patut menjadi andalan daya saing, kemudian adanya peran pembibitan dan menerapkan teknologi-teknologi terbaru serta pelan-pelan beralih ke ikan hias

untuk meningkatkan kualitas nilai ekonomisnya dan daya saing produk perikanan.

4) Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dengan didukung oleh data dan informasi yang terbaru.

Kelembagaan kelompok merupakan wadah para anggota untuk berinteraksi, tukar menukar informasi yang berguna bagi anggota dan memudahkan dalam pembinaan. Keberadaan kelompok perlu ditumbuhkan serta ditingkatkan eksistensinya dan kapasitasnya, demikian pula dengan data dan informasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam meningkatkan konsumsi ikan diperlukan informasi dan promosi kepada masyarakat, salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan membentuk organisasi forikan (forum peningkatan konsumsi ikan).

Penguatan kelembagaan kelompok petani budidaya ikan air tawar dikecamatan wajak diantaranya yaitu dengan pembinaan dibidang kualitas dan jumlah hasil produk perikanan. Sebagaimana diungkapkan oleh pihak DKP NS (L:51) selaku kepala dinas, mengatakan, bahwa:

“Jadi memang punya kasi pemasaran, ada binaan, keterlibatan kita itu pembinaan, jumlah dan kualitas yang terkait dengan dibina.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari pihak DKP ada pembinaan dalam pemasaran oleh kasi pemasaran.

kemudian Pernyataan dari RD (L:47) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya mengatakan, bahwa,:

“Setelah para petani ikan panen ada keterlibatan pemerintah setempat dalam pemasaran ataupun pengolahan lanjutan hasil budidaya tersebut misalnya waktu panen datang membuat pakan datang dan ada kendala datang,” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pemerintah atau pihak terkait perikanan dan kelutan dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan hasil konsumsi ikan dengan selalu mengawasi atau melihat ketika para pembudidaya panen dan jika ada kendala dalam membudidaya ikan air tawar.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Untuk mencapai tujuan umum pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera dalam arti mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, tingkat ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan dengan melihat kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada di darat, laut dan pesisir yang dilakukan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang ada pada Visi Organisasi tersebut. Visi DKP Kabupaten Malang yaitu :

“Terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing.”

Berdasarkan visi DKP Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing, pada proses pelaksanaannya dari setiap pihak memiliki cara masing-masing, pihak masyarakat pembudidaya ikan air tawar IT (L:52th) juga selaku kelompok tani ikan sumber miksur, menyampaikan bahwa:

“Dados mriki niku mboten sah nyade enten tiang sing ngandani, dados konsumen niku tertarik saking konco-konco. Pas panen dadi lek enten tiang nyulami niku dilarag dados nyetrum potas,,iya anu dalu ada maling diobat enggeh mati sak kolam niku samping alas keamanan terkendala makane seng njogo kedah gantosan. (jadi pembudidaya disini tidak perlu memasarkan hasil perikananya tetapi konsumen sudah tertarik untuk membeli dari pengalaman teman-temannya. Waktu panen jadi kalau ada orang yang memanen ikan itu dilarang panen menggunakan strum atau obat kimia, kendalanya lokasi dipinggir hutan jadi keamanannya terkendala. Sehingga yang jaga harus bergantian).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 , di Kantor Persawahan kolam budidaya Kecamatan Wajak).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dari pihak masyarakat pembudidaya ikan air tawar untuk mewujudkan hasil perikanan yang memiliki daya saing yaitu dengan memberitahukan ke teman-teman pembudidaya lainnya agar tertarik dan untuk mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari yaitu dalam memanen hasil budidaya dilarang menggunakan penyetrum dan bahan kimia. Sedangkan dari ZA (L:50th) selaku pembudidaya ikan mengatakan bahwa,:

“Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing jadi kita ngikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis pelan-pelan sebagian kita beralih ke ikan hias, seperti koi dan nilai. Sementara cara mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari lek neng kene kadang onok sing nganggo obat setrum,

lek ndek kono onok tempat sing diengoni ya wes tau (Disini kadang ya masih ada yang pakai obat sama setrum).” (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016, di rumah ZA Kecamatan Wajak)

Pada hasil wawancara dengan ZA (L:50th) tersebut dikatakan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing yaitu dengan mengikuti pasaran dan kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya pelan-pelan beralih ke ikan hias. Sedangkan untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari sama seperti yang diungkapkan IT (L:52th) yaitu tidak boleh menggunakan obat dan penyetrum pada waktu untuk memanen ikan. Sejalan dengan itu WN (L:45th) selaku pihak BPP yang menangani langsung dilapangan mengatakan bahwa,:

“Strategi dari kita, jadi kita kan memang budidaya, jadi untuk produksi kita kalah dengan jaring sek atdan jaring apung tapi kita menang dikualitas. Kualitas ikan kita lebih bagus kalau tidak ada pencemaran tidak ada residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic kita tidak ada karena peranan kita masih alami kita menang disitu kemudian kita juga ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi jadi kita juga menerapkan teknologi-teknologi terbaru. Jadi untuk kolam yang kecil bisa menghasilkan yang banyak salah satunya itu kemudian ada juga kita beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Kalau di wajak sendiri airnya masih jernih dan terbebas dari residu kimia dan itu upaya kontribusi dari BPP itu untuk menanggapi tantangan kedepan, tantangan kita sebenarnya untuk saat ini adalah debit air yang semakin menurun.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, di Kantor BPP Kecamatan Wajak)”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh WN (L:45th) bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan yang memiliki daya saing yaitu memang tidak adanya residu kimia kemudian tidak ada resiko antibiotic, karena

peranannya masih alami, kemudian ada peran pembibitan untuk meningkatkan produksi dan menerapkan teknologi-teknologi terbaru, kemudian juga dikatakan pelan-pelan sebagian akan beralih ke ikan hias jadi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Sedangkan untuk mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari yaitu dengan menjaga mata air yang kian menurun dengan bekerjasama dengan dinas kehutanan melalui program untuk penyelamatan mata air. Berbeda seperti apa yang diungkapkan oleh NS (L:51th) selaku kepala dinas DPK Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“Strategi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing adalah melalui pembiayaan. Jadi untuk perikanan budidaya ini kita dipatok untuk naik 5 persen, strateginya adalah mencukupkan pembiayaan, kalau teknologi itu udah ada yang mikir. Dengan memberikan kebutuhan pembiayaan itu saja, kalau SDM ndak pernah sambat sini. Selanjutnya cara kita mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari uang kita sedikit pakan kita ndak cukup. Kalau aman kita mengacu pada kualitas air, menjaga kualitas pakan dulu dan air, kalau lestari yaitu dengan mengelola pengelolaan lingkungan sumber air, pesisir, pengelolaan lingkungan secara umum, bisa sumber.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016, di Kantor DPK Kabupaten Malang)”

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak DPK tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing yaitu, dengan memberikan kebutuhan pembiayaan, sedangkan untuk mewujudkan sumberdaya perikanan dan kelautan mengacu pada kualitas air dengan mengelola pengelolaan lingkungan sumber air. Sedangkan dari wawancara dengan RD (L:47th) selaku anggota seksi budidaya kelompok tani ikan mina jaya mengatakan, bahwa:

“Strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing ada, tapi tiap anggota kita punya rahasia sendiri-sendiri. Jadi kita kalau panen banyak yang bantu lebih cepat mana yang panen cuman itu, kadang perlakuan kita dari unibraw itu ada customer yang pakek prebiotic macam-macam lah. kita pakek cara sendiri-sendiri. Sedangkan cara mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari kita kan sering diadakan untuk pelatihan jadi kesimpulan dari pelatihan-pelatihan itu kita membuat pulang ilmu itu sendiri-sendiri jadi tiap orang tidak sama, seperti saya kalau beli pakan kan yang paling murah itu saya oplos buanyak botol-botol kita isi macam-macam bakteri atau mikroba itu. untuk teman-teman yang lain ada yang pakek tapi jadi kita ndak sama, dan tidak mau mencoba punya teman jadi kreasi seni nya disitu. Kita cuman tau tapi kita ndak mau mencoba punya teman, kita sudah komit punya saya yang paling unggul. Tapi kalau ada penyakit ada kendala kita kumpul kita kompak .mencari jalan keluar sharingsharing bagaimana mencari jalan keluar.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016, di Rumah RD Kecamatan Wajak)

Dari hasil wawancara dengan RD (L:47th) tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan hasil perikanan yang memiliki daya saing ,aman dan lestari yaitu setiap pembudidaya memiliki cara sendiri-sendiri dengan mengoplos pakan dengan botol-botol isi macam-macam bakteri atau mikroba.

C. Analisis Data Penelitian

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini peneliti dituntut mampu menerjemahkan data yang diperoleh selama penilitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teori yang berkaitan. Data yang diperoleh dan diolah tersebut akan sangat berguna untuk memberikan arti, makna dan nilai tersendiri. Creswell (2012: 274-275) mengatakan bahwa analisis data

merupakan proses yang berkelanjutan dengan membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Pengertian mengenai analisis data yang diungkapkan oleh Creswell tersebut, dijadikan oleh peneliti untuk memulai proses dalam menyajikan data dengan lebih jelas dan rinci dari data yang dihasilkan oleh pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini akan dianalisis dengan menggunakan model analisis data oleh Creswell. Model analisis data yang peneliti gunakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan, mengklarifikasi dan menafsirkan fenomena tersebut agar dapat dipahami oleh banyak pihak. Fenomena yang peneliti maksud dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi program minapolitan budidaya berdasarkan Renstra DPK kabupaten Malang. Berikut adalah analisis data dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti:

1. Implementasi program budidaya minapolitan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Analisis pertama sesuai dengan fokus penelitian adalah mengenai implementasi Program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata”. Penelitian ini terfokus pada

Program minapolitan budidaya yang ditetapkan setelah adanya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Surat keputusan bupati tersebut yang selanjutnya merupakan salah satu dasar pembuatan RPJMD Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD. RPJMD Kabupaten Malang yang dibuat oleh SKPD terkait akan diteruskan untuk dibuat Renstra SKPD. Renstra SKPD memiliki fungsi sebagai teknis operasional yang berisi visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun masa jabatan.

Kalimat diatas menjelaskan mengenai asal-usul program, dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan implementasi dari adanya kebijakan yang mengatur program itu sendiri. Program yang diatur sedemikian rupa akan terlaksana jika di dalamnya terdapat misi, strategi, rencana dan sebuah program kerja yang dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan sesuatu dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2009: 156-157) yang mengungkapkan bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja yang dirumuskan dengan teori sedemikian rupa, dapat tidak dilaksanakan secara efisien dan efektif karena berbagai faktor yang tidak terduga dalam proses pelaksanaan.

DPK Kabupaten Malang melalui Program budidaya minapolitan memiliki misi untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan tersebut



akan dilakukan dengan: memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan serta memperluas akses pasar domestik dan internasional. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut diharapkan mampu untuk mengantarkan masyarakat perikanan kabupaten malang memiliki kualitas hidup yang sejahtera melalui bidang perikanan.

Analisis data dari penyajian data sebelumnya akan dilakukan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Analisis data tersebut meliputi:

a. Identifikasi Masalah dalam Proses Implementasi Program

Proses implementasi, menurut Wibawa (1994:16) mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Proses implementasi program terjadi ketika RPJMD Kabupaten Malang disahkan dan dilakukan penyusunan program yang lebih detail oleh masing-masing SKPD. Proses implementasi program, tidak berhenti hanya di tahap penyusunan program saja, tetapi juga hingga program tersebut menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pembuatan program.

Hal-hal yang terkait dengan proses implementasi Program minapolitan budidaya, menurut Casley dan Kumar dalam Wibawa (1994: 16), salah satunya adalah tahap identifikasi masalah. Proses pertama yang perlu untuk dilakukan sebelum melaksanakan program adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait permasalahan yang menjadi perhatian khusus bagi

pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki potensi unggul dalam segi kualitas air untuk pengembangan dan pengimplementasian program minapolitan budidaya.

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam proses implementasi program yang dilakukan dengan cara membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola. Tahap ini kemudian dilakukan dengan memisahkan permasalahan-permasalahan tersebut dari gejala yang mendukung. Pembatasan masalah yang peneliti lakukan adalah terkait penentuan lokasi untuk pelaksanaan program.

Penentuan lokasi, di kecamatan wajak pada dasarnya dikarenakan sudah terdapat masyarakat yang terlebih dahulu dalam hal pembudidayaan ikan air tawar. Selain itu, dengan melihat potensi dari kualitas air yang berada di kecamatan wajak karena dikelilingi oleh aliran sungai yang memiliki kualitas bagus dan banyaknya sumber mata air yang tersebar di kecamatan Wajak. Potensi tersebutlah yang kemudian dilirik dan menjadi perhatian oleh pemerintah setempat untuk kemudian dikembangkan dan diupayakan menjadi suatu kawasan minapolitan budidaya pertama di kabupaten Malang. Implementasi dari arah kebijakan dan strategi dalam program peningkatan produksi perikanan budidaya berdasarkan Renstra DPK tahun 2011-2015 selanjutnya dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya: pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan, pengembangan sistem perbenihan ikan, pengembangan sistem kesehatan ikan dan

lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan, pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya, peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Casley dan Kumar dalam Wibawa (1994: 16) menyebutkan bahwa proses identifikasi masalah dilakukan dengan cara membatasi masalah yang akan dipecahkan kemudian memisahkan permasalahan tersebut dari gejala yang ada. Penentuan lokasi yang ditetapkan di kecamatan Wajak kabupaten Malang, di dukung dengan adanya potensi yaitu kualitas air dan banyaknya sumber mata air di kecamatan wajak yang cocok digunakan untuk budidaya ikan air tawar, baik budidaya tambak, kolam, mina padi, mina mendong, maupun jaring sekat. Meskipun demikian potensi yang dimiliki tersebut tidak diikuti dengan potensi sumber daya manusia di kecamatan wajak. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yaitu diantaranya kurangnya antusias sumber daya manusia di kecamatan wajak dalam menyambut program minapolitan sehingga jumlah pelaku usaha perikanan di kecamatan wajak tidak berkembang dan sebaliknya pada tahun 2015 lalu mengalami penurunan. Tidak hanya itu rendahnya kompetensi kelompok dan kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan juga menjadi permasalahan dalam implementasi program minapolitan tersebut. Sehingga pengembangan sumber daya manusia di kecamatan wajak dirasa perlu dilakukan.

Sebagaimana teori pengembangan sumberdaya manusia menurut

Werner dan DeSimone (2009:4) yang menyebutkan:

“Pengembangan sumber daya manusia (human resources development) diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang.”

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan jika suatu program atau kebijakan yang melibatkan peran serta dari sumberdaya manusia maka pengembangan sumberdaya manusia perlu di lakukan. Karena, dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul maka di hari ini dan selanjutnya program minapolitan di kecamatan Wajak akan berjalan sesuai yang diharapkan karena bisa bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan, teknologi maupun perkembangan zaman. Dengan terlaksananya program minapolitan pula, perekonomian masyarakat di sekitarnya pun akan ikut meningkat melalui hasil budidaya perikanan tersebut.

Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam pembahasan ini jika di tarik garis besar menjelaskan jika program minapolitan yang di implementasikan di kecamatan Wajak sejak tahun 2009 hingga saat ini kurang didukung oleh potensi sumber manusia yang ada. Sehingga dapat dinilai program tersebut kurang berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, peneliti berpendapat agar pelaksanaan program minapolitan di kecamatan wajak ini bisa diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga nantinya

tidak hanya sumber daya alam saja yang memiliki kualitas unggul tetapi kualitas manusianya pun juga mampu mengimbangi. Karena dalam pelaksanaan program minapolitan ini juga diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat guna bersama mengembangkan program minapolitan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan seluruhnya.

b. Strategi Implementasi Program

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan Minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. seluruh program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan mengacu pada konsep Minapolitan yang didasarkan pada prinsip-prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Pelaksanaan Konsep Minapolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Seluruh program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengarah pada sasaran dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Minapolitan.

Strategi utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor kep.18/men/2011 diantaranya:

- 1) Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terintegrasi;
- 2) Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;

- 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan
- 4) memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Sama halnya dengan kementerian perikanan dan kelautan yang memiliki strategi dalam implementasi program mina politan di Indonesia, dinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang juga mempunyai strategi dimana strategi tersebut sudah terkandung dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Malang dalam RPJMD yaitu strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang berdaya saing, aman dan lestari.

Kaitannya dengan hal tersebut maka sebagaimana strategi yang mengacu pada visi misi kabupaten Malang dan tercantum dalam rencana strategis (Renstra) kabupaten malang maka strategi implementasi program yang diharapkan sudah dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan wajak. Hal tersebut dapat terlihat dari strategi dalam mewujudkan perikanan budidaya yang berdaya saing dengan adanya berbagai kegiatan yang telah dilakukan yaitu diantaranya mencukupi pembiayaan program minapolitan budidaya, mengikuti teknologi terbaru dan mengikuti pasaran yang sedang berkembang. Sedangkan strategi dalam mewujudkan perikanan budidaya yang aman dan lestari dilakukan dengan menjaga kualitas air dengan pemberian pakan yang aman dan memperhatikan lingkungan misalnya pemberian pakan organik yang

berasal dari berbagai macam bakteri dan mikroba dimana ilmu tersebut bisa diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DPK atau BPP, pengelolaan lingkungan terkait sumber mata air dengan adanya program penyelamatan sumber mata air dengan menanam pohon di atas mata air radius 200 meter. Selain itu para pembudidaya tidak menggunakan obat-obatan dan alat listrik untuk memanen.

Peneliti berpendapat bahwa dengan strategi maka sebagai pihak yang terlibat dalam program minapolitan budidaya dikecamatan wajak diantaranya DPK, BPP dan Pembudidaya ikan air tawar bisa bekerjasama demi terwujudnya program minapolitan budidaya sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan sesuai dengan renstra ataupun keputusan menteri kelautan dan perikanan republic Indonesia. Dengan melakukan pencukupan pembiayaan, menggunakan teknologi terbaru mengikuti perkembangan pasar, menggunakan pakan organic yang memperhatikan lingkungan ataupun pengelolaan lingkungan dengan program penyelamatan mata air dengan menanam pohon merupakan strategi-strategi unggulan yang telah dipilih dan tersebut merupakan strategi yang bisa dilanjutkan dan berkesinambungan tidak hanya memikirkan perekonomian semata tetapi juga memperhitungkan kelestarian lingkungan sehingga terwujudlah program minapolitan budidaya dikecamatan wajak yang berdaya saing aman dan lestari.

c. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Implementasi Program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak kabupaten Malang yang dilakukan mulai tahun 2009 hingga saat ini, memiliki beberapa faktor yang berpengaruh. Proses implementasi program dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkuat hipotesis peneliti terkait program yang ada. Rewansyah (2010: 54) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, yaitu *understanding, communication, resources, disposition, bureucratic structure, dan problem and prospect*. Faktor yang mempengaruhi implementasi program dalam penelitian ini adalah (1) Ketersediaan sumber dana/modal; (2) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana; (3) Penguatan kelembagaan; dan (4) tingkat keamanan.

Ketersediaan sumber dana/modal yang disediakan juga sangat membantu dalam proses implementasi dari program minapolitan budidaya dan merupakan salah satu kategori faktor pendukung yang mempengaruhi program minapolitan budidaya. Ketersediaan sumber dana/modal dalam program ini dibiayai dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Pembagiannya, Pemkab Malang kebagian jatah menyiapkan lahan, pemprov kebagian membangun infrastruktur jalan, dan pemerintah pusat yang membangun kolam, serta berbagai sarana penunjang di kompleks minapolitan. Selain itu kecamatan Wajak juga menerima dana bantuan berupa dana PUMP (Pengembangan Usaha

Minapolitan Budidaya) senilai Rp 65.000.000,- yang selanjutnya dana tersebut difokuskan untuk mengembangkan budidaya perikanan air tawar. Dimana tujuan PUMP sendiri adalah mendorong peningkatan produksi, menumbuhkan wirausaha, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan.

Rewansyah (2010:54) menyebutkan adanya *Resources* sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yang termasuk dalam faktor *resources* adalah faktor adanya bantuan pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu kategori faktor pendukung yang mempengaruhi program minapolitan budidaya. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berupa disediakannya lapak untuk berjualan ikan, indukan bibit, tembok beton, dan paving jalan menuju ke kolam. Bantuan sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor-faktor penting dan berpengaruh dalam implementasi program minapolitan di kecamatan wajak. Memang bantuan tersebut turun tidak langsung semuanya diterima oleh pembudidaya ikan melalui Pokdakan, melainkan turun secara berkala dengan melihat potensi atau bantuan yang pada waktu itu dibutuhkan oleh Pokdakan tersebut.

Rewansyah (2010:54) juga menyebutkan adanya faktor *Understanding* sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi program. Faktor *understanding* tersebut yang di dapat peneliti selama penelitian yaitu adanya penguatan kelembagaan, dimana menjadi salah

satu faktor pendukung dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan dengan adanya pertemuan rutin untuk kelembagaan, kerjasama antara Pokdakan dengan bank BRI di Tajinan untuk membantu pemodalan pembudidaya ikan air tawar, serta adanya badan hukum dan sertifikat untuk pembudidaya ikan air tawar.

Faktor terakhir yang berpengaruh dalam implementasi program disini adalah adanya *Problem and Prospect* yang merupakan faktor lain terkait permasalahan di lapangan dan prospek yang dapat diperhitungkan. Faktor *Problem and Prospect* yang diperoleh peneliti selama dilapangan yaitu lemahnya tingkat keamanan di lokasi budidaya ikan yang lokasi kolamnya berada di pinggir hutan dan jauh dari rumah penduduk. Sehingga faktor keamanan disini masuk menjadi faktor penghambat dalam implementasi program minapolitan ini. Lemahnya tingkat keamanan terbukti dari banyaknya pencurian ikan di kolam-kolam pembudidaya dalam jumlah banyak ataupun sedikit dengan target utama ikan yang siap panen. Selanjutnya, selain faktor keamanan, faktor anggaran juga menjadi faktor yang berpengaruh dan menghambat implementasi program. Karena semua itu tidak akan terwujud jika anggaran dana tersebut tidak ada.

Keempat faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang berpengaruh dalam implementasi Program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak. Adanya faktor pendukung seperti ketersediaan

dana/modal, bantuan pembangunan sarana dan prasarana, dan penguatan kelembagaan yang terus di tingkatkan akan menjadikan program minapolitan budidaya di kecamatan wajak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu untuk faktor penghambat seperti lemahnya tingkat keamanan dan kurangnya dana yang turun untuk program inapolitan budidaya ini dapat dicari jalan keluar. Sehingga masalah seperti itu tidak akan berlarut-larut dan tambah berkembang serta pihak pelaksana program juga harus mempertimbangkan keempat faktor untuk mendapat hasil yang optimal.

Peneliti berpendapat dengan anggaran dana yang direncanakan oleh pihak DPK Kabupaten Malang, dapat diwujudkan dalam bentuk penggunaan peralatan yang bagus dan memadai serta mendukung pembudidayaan ikan air tawar. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana si jaga sebaik mungkin oleh masyarakat sekitar dan sudah saatnya masyarakat berfikir maju kedepan supaya tidak terus bergantung dengan bantuan yang diterima dari pemerintah. Untuk penguatan kelembagaan dapat ditingkatkan dengan misalnya bekerjasama dengan lebih banyak bank dan juga sosialisasi terkait budidaya ikan air tawar mulai dari pembibitan hingga pendistribusian ikan ke pasar maupun sehingga tujuan dari program dapat segera terlaksana. Sementara itu faktor kewanamanan terkait banyaknya pencurian di lokasi budidaya dapat diminimalisir dan diantisipasi dengan semakin diperketatnya penjagaan dolokasi budidaya dengan adanya penjagaan dari antar pemilik kolam

secara bergantian dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar subjek (pelaksana program) dan objek (pembudidaya ikan) dari program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan dan strategi yang digunakan.

2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan kelautan Periode 2011-2015 terkait Program Budidaya Minapolitan dilihat dari 8 tahapan Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis (Bryson : 2007)

Program budidaya minapolitan di kecamatan Wajak merupakan wujud dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian pembudidaya ikan air tawar dengan mengelola sumberdaya perikanan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Program ini menjadi salah satu program yang dikelola oleh DPK kabupaten Malang sebagai SKPD Kabupaten Malang yang menangani wilayah perikanan dan kelautan di kabupaten Malang. Sementara itu, BPP kecamatan wajak yang selanjutnya bertugas untuk menangani dan membina langsung para pembudidaya ikan di kecamatan Wajak yang notabene telah ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar sejak tahun 2009 yang berlokasi di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang membuat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan karena sudah adanya penetapan kawasan Minapolitan secara nasional pada Tahun Anggaran berjalan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan

Lokasi Minapolitan. Selain itu dasar normatif perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Kemudian Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar.

Konsep minapolitan ini ditata sebagai sebuah kawasan bisnis terpadu. Selain pengembangan produksi ikan konsumsi dan benih, juga membidik bidang pengembangan dan pemasaran. Sehingga pelaksanaan bisnis ini memang dari hulu ke hilir yang disebut sebagai minabisnis. Hal ini terlihat pula dari rancang bangun fasilitas minapolitan yang didalamnya terdapat kolam budidaya, pembenihan, laboratorium dan tempat transaksi pemasaran ikan. Sentra pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang dipilih Kecamatan Wajak, dengan beberapa alasan yaitu disamping merupakan lokasi di tengah-tengah daerah Kabupaten Malang juga karena merupakan daerah agraris yang areal persawahannya banyak mempergunakan aliran air sungai. Dikarenakan juga banyak mempunyai sumber air dari dua sungai besar yaitu Sungai Kajaran dan Sungai Pawon, selain itu Kecamatan Wajak banyak memiliki Rumah Tangga yang mempunyai usaha budidaya ikan. Kemudian dipilih sentranya Desa Sukoanyar karena lokasi berada di pinggir jalan besar yang memudahkan akses transportasi. Selanjutnya kecamatan lain sekitar Kecamatan Wajak sebagai kecamatan pendukung (*hinterland*).

Tujuan dari pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah pengendalian urbanisasi dari desa ke kota, penanggulangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah daerah Kabupaten Malang yang ingin meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malang yang berada di tahap pra sejahtera dengan berbagai cara dalam hal ini mengolah potensi di beberapa wilayah kecamatan sesuai kondisi potensinya. Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagai program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro-job*) dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*).

Rencana strategis (Renstra) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menentukan arah yang akan dituju selama 5 tahun, cara menuju arah tersebut dan bagaimana cara mengetahui capaiannya. Renstra berfungsi untuk merencanakan perubahan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memberikan arah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan, memberikan orientasi pada masa yang akan datang dan pelayanan

kepada masyarakat serta mengevaluasi kebijakan atau program yang sedang berjalan atau sudah berakhir.

Cronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2014: 5) menyebutkan tentang evaluasi program yang merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Upaya menyediakan informasi tersebut dilakukan oleh pihak DPK Kabupaten Malang sebagai SKPD yang bertanggungjawab secara legal terkait program minapolitan di kecamatan Wajak. Informasi yang dihasilkan oleh pihak DPK Kabupaten Malang dan BPP kecamatan Wajak dalam pembudidayaan ikan air tawar tersebut dapat berupa data terkait kerapatan dan jumlah luas lahan yang digunakan dan jenis ikan budidaya air tawar. Data lain dapat berupa data jenis bantuan yang diterima oleh pembudidaya, jumlah ikan hasil budidaya serta program-program yang berkaitan dengan minapolitan budidaya di kecamatan Wajak. Data-data yang sudah dihasilkan akan diteruskan dan dimanfaatkan oleh pengambil keputusan supaya dapat diambil langkah selanjutnya untuk menyikapi dan memutuskan sikap menangani permasalahan yang ada.

Tahun 2009 kecamatan Wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di kabupaten Malang. Kunarjo (2002: 268) mengatakan tentang program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan program. Ketepatan pelaksanaan program dalam penelitian ini, peneliti kaji dengan teori evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan saat program tersebut masih dijalankan. Alasan penggunaan

evaluasi ini adalah, peneliti akan mengevaluasi program dari sudut pandang saat program tersebut dilaksanakan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program diperlukan perencanaan strategis supaya program atau kebijakan tersebut ketika di laksanakan tidak mengalami hambatan dan tantangan yang berarti. Perencanaan Strategis merupakan bagian daripada proses perencanaan. Oleh karena itu lebih ditekankan kepada pemilihan strategi yang akan digunakan dalam suatu organisasi baik organisasi Publik maupun organisasi Bisnis. Ketepatan dalam memilih strategi yang digunakan turut menentukan keberhasilan dari organisasi dan tujuan yang akan dicapai. Menurut Olsen dan Eadge dalam Bryson (2007:4-5), mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu, bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.

Melalui perencanaan strategi maka, suatu organisasi dapat memperoleh strategi-strategi baru yang akan digunakan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, peniliti mengambil langkah untuk menganalisis terkait evaluasi berdasarkan kesepakatan dan negoisasi perencanaan strategis, evaluasi berdasarkan visi/tujuan dan misi organisasi/perusahaan, evaluasi berdasarkan perumusan, pengelompokan dan pengelolaan isu-isu strategis, serta evaluasi berdasarkan

rumusan strategi untuk mengelola isu. Pemaparan peneliti mengenai analisis terhadap data yang sesuai dengan fokus yang ditentukan adalah sebagai berikut:

a. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Implementasi dari RPJMD Kabupaten Malang salah satunya adalah dengan Program budidaya ikan air tawar Kawasan minapolitan kecamatan Wajak. Program yang telah dilaksanakan memerlukan tahapan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan realisasi program. Program yang di buat menggambarkan adanya kerjasama antara DPK kabupaten Malang, BPP kecamatan wajak dan masyarakat pelaku usaha budidaya ikan air tawar. Ketiga aktor tersebut bekerjasama dengan mengadakan pertemuan rutin dan berkala untuk memberikan arahan, sosialisasi dan masukan-masukan tentang ilmu perikanan.

Sebagaimana Olsen dan Eadge dalam Bryson (2007:4-5) yang menafsirkan bahwa memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis merupakan langkah menegosiasikan kesepakatan untuk menyelenggarakan perencanaan strategis dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinions leaders) dan para stakeholder baik internal maupun eksternal. Dukungan dan komitmen mereka merupakan hal yang sangat penting jika perencanaan strategis ingin berhasil. Keterlibatan orang-orang penting di

luar organisasi adakalanya sangat krusial jika dalam implementasinya melibatkan banyak pihak di luar organisasi. Orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tersebut berperan sebagai stakeholder yang membuat keputusan. Setiap stakeholder dalam melaksanakan kegiatan strategisnya mempunyai posisi dan tugas masing-masing. Semua itu sebagai tahapan evaluasi berdasarkan kesepakatan dan negosiasi perencanaan. Hal yang menjadi tolak ukur bagaimana alurnya dan apakah sudah terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* dan melihat sejauh mana kerjasama antar masing-masing stakeholder terlibat.

Kaitannya dengan hal tersebut maka, ketiga *stakeholder* (DPK, BPP dan pembudidaya ikan) memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan program minapolitan dikecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini DPK kabupaten malang bertugas sebagai pelaksana program minapolitan yang mengawasi dan menjalankan perannya dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional. Sedangkan BPP bertugas untuk memberikan sosialisasi, arahan, bimbingan langsung di lapangan kepada pembudidaya ikan di kecamatan wajak. Selanjutnya, masyarakat pelaku usaha perikanan bertugas untuk melaksanakan pembudidayaan yang langsung di implementasikan pada objek tersebut

dengan memperhatikan arahan-arahan dan binaan dari DPK ataupun dari BPP.

b. Memperjelas atau mengidentifikasi mandate Organisasi

Kabupaten Malang membuat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan karena sudah adanya penetapan kawasan Minapolitan secara nasional pada Tahun Anggaran berjalan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan. Selain itu dasar normatif perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Selanjutnya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/407/Kep/421.013/2008 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan tahun 2008. Kemudian Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar.

Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang dengan surat keputusan tersebut membuat program minapolitan budidaya ikan air tawar secara terperinci dan berkelanjutan didalam Rencana strategis (Renstra) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menentukan arah yang akan dituju selama 5 tahun, cara menuju

arah tersebut dan bagaimana cara mengetahui capaiannya. Renstra berfungsi untuk merencanakan perubahan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memberikan arah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan, memberikan orientasi pada masa yang akan datang dan pelayanan kepada masyarakat serta mengevaluasi kebijakan atau program yang sedang berjalan atau sudah berakhir.

Sebagaimana Bryson (2007;3-4) yang menafsirkan memperjelas atau mengidentifikasi mandate organisasi merupakan Elemen yang harus di evaluasi adalah mandate organisasi baik mandate forml maupun informal. Mandat formal dan mandat informal yang berada pada suatu organisasi merupakan keharusan yang dihadapi. Mandat formal adalah tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan, piagam, pasal-pasal ataupun perjanjian-perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan. Mandat informal adalah norma-norma yang menjadi pegangan beroperasinya organisasi yang tidak kalah mengikatnya. Untuk menjalankan system dan kegiatan operasionalnya sebuah organisasi pastilah punya dasar dan landasan khusus. Landasan tersebut yang sering dinamakan mandate. Mandate yang juga berasal dari pemerintah atau dari bidang atau organisasi yang tingkatannya lebih tinggi. Dasar yang dijadikan adalah bagaimana suatu organisasi menerima dan melaksanakan mandate tersebut dan sejauh mana sebuah organisasi dapat mengidentifikasi mandate yang ada sebagai tolak ukurnya.

Kaitannya dengan hal tersebut bahwasanya surat keputusan menteri dan penetapan kawasan minapolitan di kecamatan wajak yang berada di kabupaten malang menjadi landasan hukum formal dan informal bagi dinas perikanan dan kelautan kabupaten malang dalam upayanya untuk melaksanakan dan membuat program yang baik dan terarah untuk program minapolitan budidaya ikan air tawar .

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai Organisasi

Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki misi atau tujuan berbeda-beda sesuai dengan spresialisasi organisasi tersebut. Begitu pula dinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang. Misi tersebut pulalah yang nantinya menjadi pedoman atau langkah DPK kabupaten malang dalam mengimplementasikan program-program ataupun kebijakannya. Misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

Realisasi misi tersebut dalam budidaya ikan air tawar di kecamatan Wajak untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya saing, aman dan lestari serta meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu dilakukan pada panen tiba tidak menggunakan obat-obatan kimia, menjaga kualitas pakan dengan memberikan pakan organik

dan juga menjaga kualitas sumber mata air dengan menanam pohon di atas sumber mata air radius 200m. Sementara itu, untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berdaya saing para semua *stakeholder* menjaga kualitas ikan, mengikusi pasaran dengan beralih ke ikan hias, serta pada saat pembibitan menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir. Selain itu para pembudidaya juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa universitas-universitas terkemuka di malang dalam hal riset dan ilmu pengetahuan, sehingga para pembudidaya tersebut bisa menerima ilmu-ilmu terbaru dan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari pihak perguruan tinggi yang di ajak bekerjasama. Mengingat evaluasi sangat perlu dilakukan jika tidak ingin organisasi yang berkaitan tidak bila mempertahankan eksistensinya seiring dengan perubahan zaman.

Evaluasi berdasarkan misi/ tujuan organisasi/ perusahaan menurut Olsen dan Eadge dalam Bryson (2007:4-5) dimana misi yang dibentuk oleh stakeholder oleh suatu organisasi Misi harus dirumuskan melalui diskusi yang panjang dengan melibatkan para stakeholder, sehingga diperoleh rumusan yang komprehensif. Nilai-nilai dimaksud dalam hal ini adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara yang menjadi spirit organisasi dalam

melaksanakan fungsinya, misal kejujuran, demokratis, keterbukaan/transparansi, tanggung jawab, dsb.

Mempertimbangkan teori memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Olsen dan Eadje dalam Bryson maka tujuan DPK kabupaten Malang untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya saing, aman, lestari dan meningkatkan ketersediaan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu akan mudah tercapai apabila program-program tersebut terus dilakukan. Misi tersebut akan berjalan secara maksimal apabila antar *stakeholder* yang terlibat mampu berkomitmen dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengingat untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya saing, aman, lestari dan meningkatkan ketersediaan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu memerlukan kontribusi semua pihak untuk terus menjaga lingkungan sekitar termasuk lingkungan air dan pakan sehingga kualitas ikan yang dihasilkan tetap terjaga. Apabila semua hal tersebut terus dilakukan maka tidak mustahil jika Misi DPK sebagaimana yang telah di rancang sedemikian rupa akan terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan.

d. Menilai lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman)

Implementasi Program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak kabupaten Malang yang dilakukan mulai tahun 2009 hingga

saat ini, memiliki beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah faktor lingkungan eksternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bryson (2007:15-17) Menilai lingkungan eksternal adalah tindakan mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang diluar kontrol organisasi, meliputi kecenderungan politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi (PEST), kelompok masyarakat yang harus dilayani, dan pesaing (competitor). Anggota-anggota majelis sekolah yang berasal dari luar sekolah, misal asosiasi profesi, praktisi industri pada umumnya lebih tajam dalam menilai faktor eksternal.

Lebih lanjut Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyanto (2007:10-26) Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari tiga perangkat pertama faktor lingkungan jauh yang bersumber dari faktor ekonomi, sosial-budaya, teknologi, demografi, politik-hukum, dan ekologi. Kedua faktor lingkungan industry yang terdiri dari persaingan diantara anggota industry, hambatan masuk, produk substitusi, daya tawar pembeli dan daya tawar pemasok. Ketiga faktor lingkungan operasional meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi persaingan perusahaan, yaitu posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor, dan tenaga kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan

minapolitan ini adalah (1) permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat; (2) kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha perikanan dan kelautan memiliki keterbatasan dalam akses modal; serta 3) adanya program nasional bidang kelautan dan perikanan.

Permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat merupakan peluang daripada faktor eksternal dalam program minapolitan budidaya di kecamatan wajak. Peneliti berpendapat dilihat dari permintaan pasar terhadap produk perikanan budidaya belum bisa terlihat sepenuhnya meningkat. Hal tersebut di pengaruhi oleh daya dukung para pembudidaya yang menghasilkan perikanan budidaya keterbatasan pasokan ikan dari pembudidaya di kecamatan Wajak. Meningkatnya permintaan pasar belum di imbangi dengan meningkatnya jumlah pembudidaya, sehingga peluang yang ada belum sepenuhnya di manfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program minapolitan di kecamatan Wajak.

Peluang eksternal dari program minapolitan budidaya dikecamatan Wajak adalah adanya program nasional bidang kelautan dan perikanan. Dalah hal ini Wajak sangatlah cocok di tunjuk sebagai kawasan pengembangan program minapolitan di kabupaten Malang. Hal tersebut karena bagusnya potensi air dari sekian banyak sumber mata air di kecamatan Wajak sehingga

menjadikan Wajak memiliki nilai plus di banding kecamatan lain di kabupaten Malang.

Selanjutnya faktor eksternal dalam program minapolitan budidaya yang merupakan sebagai ancaman yaitu terkait dengan kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha perikanan dan kelautan memiliki keterbatasan dalam akses modal. Modal merupakan hal penting didalam program minapolitan budidaya. Ketersedian sumber dana sangat membantu dalam peningkatan kualitas dan kuantitas ikan para pembudidaya. Peneliti berpendapat berkaitan dengan hal itu bahwa para pembudidaya ikan air tawar dkecamatan wajak masih belum secara sepenuhnya dapat akses modal di semua perbankan.

e. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

Implementasi Program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak kabupaten Malang yang dilakukan mulai tahun 2009 hingga saat ini, memiliki beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah faktor lingkungan internal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bryson (2007:16-17) Menilai lingkungan internal adalah upaya mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Kita dapat mengenalinya dari sumber daya (inputs), strategi yang dijalankan sekarang (process), dan kinerja (outputs).

Lebih lanjut Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyanto (2007:10-26) Analisis internal perusahaan dikenal dengan nama analisis

profil perusahaan. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis ini menggambarkan kekuatan perusahaan, baik segi kuantitas maupun kualitas pemasaran, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, operasi, keuangan, manajemen dan organisasi. Kekuatan dan kelemahan organisasi dan manajemen dapat diperoleh dari struktur organisasi, citra dan prestasi perusahaan, cacatan perusahaan dalam mencapai sasaran, komunikasi dalam organisasi, system pengendalian organisasi keseluruhan, budaya dan iklim organisasi, penggunaan system efektif dalam pengambilan keputusan, system perencanaan strategis, sinergi dalam organisasi, system informasi yang baik dan manajemen kualitas yang baik. Faktor lingkungan internal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dalam program minapolitan budidaya ikan air tawar sesuai dengan data hasil wawancara, adalah, (1) Eksistensi kelembagaan DPK; (2) Tersedianya potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar; (3) Tersedia pengusaha yang bergerak di bidang perikanan; (4) kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi.

Eksistensi kelembagaan DPK dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Wajak terlihat dari banyaknya bantuan yang diterima dari DPK, peduli terhadap keluhan pembudidaya jika terjadi hambatan/masalah dalam proses budidaya maupun adanya pelatihan terkait budidaya kepada para pelaku usaha budidaya ikan air tawar.

Beberapa bentuk perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan dari DPK kepada pembudidaya merupakan bentuk dukungan dalam proses pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Wajak. Sehingga para pelaku usaha perikanan merasa sangat terbantu dan diperhatikan, tidak merasa berjuang sendirian dalam melaksanakan program nasional di bidang kelautan dan perikanan tersebut.

Tersedianya potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar merupakan kekuatan daripada faktor internal dalam program minapolitan budidaya di kecamatan wajak. Peneliti berpendapat dilihat dari potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan di kecamatan wajak kabupaten malang sangat besar. Khususnya dikecamatan wajak yang sebagai sentra minapolitan memiliki 30 sumber mata air. Kondisi air yang tidak terdapat residu kimia dan masih alami. Sehingga sangat baik untuk kualitas ikan air tawar yang dibudidaya.

Faktor internal yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tersedianya pengusaha yang bergerak di bidang perikanan. Tanpa adanya kerjasama antara pengusaha yang bergerak di bidang perikanan dan pelaku usaha perikanan dalam hal ini adalah pembudidaya maka budidaya yang dilakukan akan sia-sia. Sehingga pengusaha perikanan tersebut sangatlah mendukung program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak. Pengusaha yang bergerak di bdiang perikanan disini adalah pelaku usaha restoran, tempat pemancingan ataupun pengusaha pasar

yang siap menampung hasil panen dari para pembudidaya di kecamatan Wajak yang datang dari dalam ataupun luar area kecamatan Wajak.

Selanjutnya faktor internal dalam program minapolitan budidaya yang merupakan sebagai kelemahan yaitu kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi. Kebutuhan akan benih dan ikan induk ikan merupakan hal yang sangat penting bagi para pembudidaya ikan air tawar dikecamatan wajak ini. Tanpa terpenuhinya dengan baik maka akan mempengaruhi tingkat produksi ikan maupun kualitas dan kuantitas ikan yang dihasilkan. Peneliti berpendapat berkaitan dengan hal itu bahwa kebutuhan akan benih dan induk ikan unggul bagi para pembudidaya ikan air tawar masih belum cukup atau masih kurang.

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Implementasi atas suatu program atau kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari isu-isu sebelumnya yang berkembang di masyarakat. Sehingga dari isu-isu tersebutlah nantinya di cari alternatif jalan keluar atas masalah tersebut. Begitu pula atas implementasi program minapolitan budidaya air tawar di kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Berbagai isu di kumpulkan melalui aspirasi masyarakat ataupun evaluasi terhadap Renstra pada periode sebelumnya. Sehingga evaluasi atas isu tersebut sangat dibutuhkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

Mengidentifikasi isu merupakan langkah yang sangat penting guna mengetahui persoalan kritis yang sesungguhnya dihadapi

organisasi. Dengan mempertimbangkan mandat, misi dan nilai, kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal akan dapat kita identifikasi persoalan kritis organisasi. Pernyataan isu strategis harus mengandung tiga unsur: Pertama, isu harus disajikan dengan ringkas, cukup satu paragraf dan disajikan dalam kalimat tanya. Kedua, faktor yang menyebabkan sesuatu isu menjadi persoalan kebijakan penting harus didaftar, yang mencakup aspek mandat, misi, nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Ketiga, konsekuensi kegagalan dalam menghadapi isu harus merupakan taruhan hidup dan matinya organisasi. (Olsen dan Eadge dalam Bryson, 2007:4-5).

Kaitannya dengan hal tersebut maka, dalam implementasi program minapolitan air tawar isu-isu yang telah berkembang sebelumnya di kelompokkan sebagai berikut: 1) Peningkatan ketersediaan benih dan ikan unggul; 2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan; 4) Pemantapan kelembagaan, sumber daya aparatu dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Secara rinci maka isu strategis pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang sebagai berikut:

1) Peningkatan ketersediaan benih dan ikan unggul

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan bibit dan induk yang unggul akan meningkatkan produksi dan keuntungan budidaya ikan air tawar. Karena jenis bibit selanjutnya juga mempengaruhi kualitas ikan yang nantinya di panen. Berdasarkan Renstra Kabupaten Malang 2011-

2015 peningkatan ketersediaan benih dan ikan unggul menjadi salah satu isu strategis dari DPK kabupaten Malang mengingat kabupaten Malang mempunyai program yang berkaitan dengan budidaya perikanan yaitu program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak.

Peningkatan ketersediaan benih dan ikan unggul pada saat awal kecamatan Wajak di tetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar, para pembudidaya melalui pemerintah setempat mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah. Sedangkan untuk saat ini pembudidaya ikan sudah mampu menghasilkan bibit sendiri dan bahkan jika kelebihan stok bibit maka akan di pasarkan ke pembudidaya lokal (kecamatan Wajak). Tetapi sebaliknya, jika stok bibit di kecamatan Wajak kurang mencukupi kebutuhan pembudidaya maka membeli bibit di luar kecamatan wajak.

Sebagaimana keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No. Kep.18/Men/2011 maka sasaran atas adanya minapolitan budidaya merupakan lahan-lahan budidaya potensial menjadi sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi pro pembudidaya melalui sistem Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Sehingga dengan adanya sasaran akan diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengadaan induk berkualitas serta revitalisasi pusat-pusat pembenihan dan sistem distribusi benih murah seperti UPT/UPTD.

Apabila di tinjau dari hal tersebut dan melihat kembali ketersediaan bibit unggul di kecamatan Wajak maka dirasa kurang dan sasaran ini sulit tercapai apabila ketersediaan jumlah bibit yang berasal dari indukan ikan terbatas. Berarti pembudidaya diharuskan untuk mencari bibit ke luar area Wajak dan hal ini berarti kurang efektif mengingat Wajak sudah ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di kabupaten Malang.

2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki oleh kecamatan Wajak dalam hak budidaya ikan air tawar dipengaruhi oleh kualitas air. Potensi tersebut sejatinya dapat digunakan sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Wajak. Untuk itu dengan potensi tersebut harus diimbangi dengan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra DPK kabupaten Malang tahun 2011-2015 salah satu isu strategis yang dikembangkan berdasar evaluasi renstra sebelumnya adalah Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” maka Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan di kecamatan Wajak dan berkaitan dengan program minapolitan budidaya dilakukan dengan bekerjasama antar *stakeholder* (DKP, BPP, pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan penguatan kelembagaan. Kegiatan tersebut dilakukan pada kurun waktu yang tidak tentu sesuai dengan jadwal masing-masing instansi yang melakukan kegiatan. Sehingga jika di tinjau dari teori sebelumnya maka kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di kecamatan wajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan sudah bisa dikategorikan baik. Tingga

keberlanjutan kegiatan tersebut supaya kualitas SDM masyarakat perikanan wajak bisa terus berkembang.

3) Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan

Setelah bibit ikan yang dibidayakan sudah cukup usia untuk dipanen, maka tahap selanjutnya yaitu di pasarkan. Tujuan akhir dari setiap usaha ekonomi adalah penmasaran. Tentunya sebelum di pasarkan tetap melihat keamanan pangan karena keamanan pangan merupakan isu sangat penting dalam pemasaran produk. Keamanan pangan berdasarkan peraturan merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksinya. Untuk perikanan, rantai produksi tersebut bisa sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Untuk produk ikan budidaya, potensi gangguan keamanan pangan dapat terjadi selama budidaya, pada perbenihan (benih dan induk), pakan, obat atau perairan. Meskipun lebih mudah teridentifikasi lokasinya, namun pelacakan penyebabnya tetap saja membutuhkan upaya ekstra.

Isu keamanan pangan yang dihasilkan dari usaha perikanan juga di jelaskan dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No. Kep.18/Men/2011 yang berisi pengadaan dan distribusi pakan murah berkualitas, pabrik pakan penyangga produksi. Sehingga dari sini diharapkan meskipun harga pakan yang digunakan oleh pembudidaya murah tetapi tetap berkualitas sehingga menghasilkan ikan yang mempunyai kualitas unggul pula.

Sedangkan isu strategis pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang yang tercantum dalam Renstra DPK kabupaten Malang 2011-2015 yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan.

Begitu pentingnya keamaan pangan sehingga banyak peraturan yang mengatur menyebabkan ketelitian dan kehati-hatian pembudidaya dalam melakukan kegiatan budidaya ikan air tawar di kecamatan Wajak. Hasil perikanan dari kegiatan budidaya tersebut kemudian di pasarkan melalui pengepul dan terorganisir. Untuk di kecamatan Wajak sendiri biasanya dipasarkan ke pelaku usaha pemancingan dan rumah makan. Tetapi ada juga yang diorganisir oleh 1 kelompok. Lokasi pemasaran hasil budidaya ikan tersebut hanya mencakup satu kecamatan wajak, bahkan terkadang malah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat kecamatan Wajak saja.

4) Pemantapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung

Suatu program akan menghasilkan keluaran yang baik dan maksimal apabila didukung dengan fasilitas maupun sumberdaya manusia yang berkaitan dengannya. Begitu pula dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak. Keberadaan kelembagaan, SDM dan sarana dan prasarana sangat diperhatikan untuk mendukung program yang sedang dijalankan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra DPK 2011-2015 pemantapan kelembagaan, sumberdaya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung juga tercantum dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No. Kep.18/Men/2011 yang didalamnya menjelaskan meningkatkan aksesibilitas pembudidaya terhadap sumberdaya alam, sarana produksi dan prasarana pendukung produksi, revitalisasi sarana produksi seperti kolam/tambak dan membuka lahan budidaya baru, serta revitalisasi prasarana pendukung produksi, seperti pengairan, listrik, dan jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perhatian pemerintah setempat dalam implementasi program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak sangat diperhatikan. Selain bantuan dana yang diterima, masyarakat pembudidaya juga mendapatkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana melalui adanya bantuan bibit, kolam beton, lapak untuk penjualan ikan dan sebagainya. Tidak hanya itu, wujud kepedulian dan perhatian dari pemerintah setempat juga diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan arahan-arahan terkait dengan ilmu-ilmu perikanan.

Untuk itu analisis penulis dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara teori dan praktek terkait pemantapan kelembagaan, sumber daya aparatur, dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga dengan begitu banyak bentuk

dukungan dari pemerintah setempat harus diimbangi dengan semangat berbudidaya oleh masyarakat di kecamatan Wajak untuk mengembangkan program minapolitan budidaya hingga mencapai prestasi yang dapat dibanggakan oleh kabupaten Malang.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

Tahapan setelah isu-isu yang berkembang muncul dan telah diklasifikasikan maka selanjutnya yaitu mencari jalan keluar atas isu tersebut. Begitu pula isu-isu yang berkembang di kabupaten Malang dan berkaitan dengan perikanan dan kelautan. DPK kabupaten Malang mengidentifikasi isu yang didasarkan atas masalah dan hasil evaluasi dari implementasi program sebelumnya yang tertuang dalam Renstra DPK kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Dari renstra sebelumnya pulalah akhirnya muncul strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan.

Menurut Olsen dan Eadje dalam Bryson (2007:4-5) dimana Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut. Strategi dapat berbeda-beda karena kerangka tingkat, fungsi dan waktu. Pengembangan strategi dimulai dengan identifikasi alternatif praktis, dan impian atau visi untuk memecahkan isu strategis. Selanjutnya, kita memerinci hambatan yang kemungkinan dihadapi untuk mencapai alternatif, impian atau visi tersebut.

Setelah identifikasi alternatif, impian atau visi bersama-sama dengan hambatan tersusun, langkah berikutnya kita mengembangkan usulan pokok untuk mencapai alternatif, impian atau visi secara langsung atau tidak langsung dengan cara mengatasi hambatan. Setelah usulan utama diajukan, kemudian kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam dua hingga tiga atau empat/lima tahun mendatang. Terakhir kita menyusun program kerja yang terperinci untuk setiap tahunnya. Strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, secara teknis strategi harus dapat bekerja (dilaksanakan) untuk menghadapi isu strategis; kedua, secara politis dapat diterima oleh para stakeholder kunci; dan ketiga, strategi harus menjadi etika, moral dan hukum organisasi.

Maka dari itu, isu-isu yang berkembang di kecamatan Wajak kabupaten Malang terkait budidaya ikan air tawar telah dikelompokkan dan akhirnya muncul strategi untuk mengelola isu tersebut, yang diantaranya: 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, 2) Pengembangan kawasan minapolitan budidaya, 3) Peningkatan daya saing produk perikanan, 4) Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dengan didukung oleh data dan informasi terbaru. Secara rinci strategi untuk mengelola isu tersebut sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten malang bersama pembudi daya ikan air tawar di kecamatan wajak untuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara adanya sistem pengendalian dan pengawasan untuk pengelolaan perikanan budidaya di kecamatan Wajak. Diwujudkan dengan adanya tim Pokja dari tingkat kecamatan, kabupaten, balai penyuluhan, kepolisian, koramil dan puskesmas. Selain itu sistem pengendalian dan pengawasan juga dilakukan oleh antar kelompok pembudidaya maupun masyarakat sekitar.

Sebagaimana strategi atas isu tersebut dikelola maka berdasarkan Renstra DPK Kabupaten Malang tahun 2011-2015 sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelutan dan perikanan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Malang bebas dari illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui pendekatan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu masyarakat diarahkan sebagai pengelola dan pengguna sumberdaya yang bertanggung jawab dan bijaksana untuk menjamin kelestarian lingkungan.

Meninjau dari strategi untuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan temuan di lapangan dan di sinkronkan dengan dokumen Renstra DKP kabupaten Malang maka menurut pendapat penulis strategi tersebut berusaha di lakukan oleh semua *strakeholder* yang terlibat dalam program minapolitan. Hanya saja jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal maka proses pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sudah berjalan selayaknya terus dilakukan dan dikembangkan. Sehingga tujuan minapolitan yang sesungguhnya berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No. Kep.18/Men/2011 untuk: 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; 2) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan 3) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah akan segera tercapai.

2) Pengembangan kawasan minapolitan budidaya

Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis

komoditas unggulan tertentu. Pengembangan kawasan minapolitan didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu wilayah tersebut. Di kecamatan Wajak kabupaten Malang sendiri yang menjadi potensi unggulan hingga ditetapkan sebagai kawasan minapolitan adalah kualitas air yang berasal dari banyak sumber mata air di kecamatan wajak.

Pengembangan kawasan minapolitan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya melalui pengembangan wilayah pada sentra-sentra produksi perikanan yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penggerak ekonomi masyarakat. Tujuan pengembangan kawasan minapolitan antara lain untuk meningkatkan produksi, produktivitas usaha dan kualitas perikanan serta pendapatan pelaku usaha perikanan.

Untuk lokasi pengembangan kawasan minapolitan di wajak sendiri, mulai dengan adanya potensi air yang cocok digunakan untuk budidaya ikan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber mata air di kecamatan Wajak dan mata air yang tidak pernah kering pada saat musim kemarau. Setelah potensi tersebut maka baru dikembangkan dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan cara membudidayakan ikan air tawar baik di kolam beton, terpal, dan sebagainya. Sehingga banyak masyarakat di kecamatan Wajak yang

memanfaatkan peluang tersebut sehingga menjadi lahan mata pencaharian tetap masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani.

Dari sini peneliti menganalisis antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan jika pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Wajak dilakukan dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih profesi sebagai pembudidaya ikan air tawar yang sebelumnya bekerja sebagai petani. Sehingga strategi untuk mengelola isu tersebut terkait pengembangan kawasan minapolitan budidaya sudah dilakukan oleh kecamatan Wajak.

3) Peningkatan daya saing produk perikanan

Produk perikanan budidaya dari kecamatan Wajak kabupaten Malang yang selanjutnya di pasarkan merupakan produk perikanan budidaya terbaik. Hal tersebut karena para pembudidaya mendapatkan air untuk budidaya langsung dari aliran sumber mata air. Selain itu juga menggunakan pakan organik yang dibuat sendiri oleh beberapa masyarakat di kecamatan Wajak yang ilmunya didapatkan ketika ada sosialisasi atau penyuluhan terkait ilmu-ilmu perikanan. Hal tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pembudidaya supaya produk perikanannya mampu bersaing di pasaran.

Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik

Indonesia No. Kep.18/Men/2011 yang berisi meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan dan juga Renstra DPK kabupaten Malang tahun 2011-2015 yang berisi strategi peningkatan daya saing produk perikanan. Peningkatan daya saing produk perikanan dimaksudkan untuk menumbuhkan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha kelautan dan perikanan, baik pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan dan pemasar ikan. Selain itu dengan meningkatkan kualitas dan higienitas produk unggulan perikanan dan pasca panen. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembinaan usaha dan pemanfaatan fasilitas modal usaha guna meningkatkan dan memperlancar pengelolaan usaha serta penciptaan lapangan usaha bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mampu bersaing di pasaran strategi yang digunakan oleh pembudidaya ikan di kecamatan Wajak yaitu dengan melihat peluang permintaan pasar yang sebagian masyarakat pembudidaya beralih ke budidaya ikan hias demi memenuhi permintaan pasar. Selain itu pembudidaya juga menjaga kualitas air dan pakan sehingga mampu menghasilkan ikan yang sehat dan memiliki kualitas bagus. Para pembeli atau pemborong ikan budidaya di kecamatan Wajak langsung mendatangi pemilik kolam budidaya untuk melakukan negosiasi jual beli hingga mencapai harga yang disepakati. Sehingga menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti

selama di lapangan strategi untuk mengelola isu terkait peningkatan daya saing produk perikanan telah dilakukan di kecamatan Wajak.

- 4) Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dengan didukung oleh data dan informasi terbaru

Sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam budidaya ikan air tawar. Tanpa ada SDM yang menggerakkan makan semua kegiatan di seluruh dunia ini tidak akan berjalan. Untuk itu hanyalah SDM yang memiliki kualitas unggul yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan juga. Tidak terkecuali dalam budidaya ikan air tawar di kecamatan Wajak. Mengingat Wajak merupakan wilayah pilihan dari kabupaten Malang untuk lokasi pelaksanaan program minapolitan budidaya di kabupaten Malang maka diperlukan pula SDM-SDM yang mampu memberikan inofai dan kontribusi lebih dalam hal budidaya perikanan.

Berdasarkan Renstra DKP tahun 2011-2015 kelembagaan kelompok merupakan wadah para anggota untuk berinteraksi, tukar menukar informasi yang berguna bagi anggota dan memudahkan dalam pembinaan. Keberadaan kelompok perlu ditumbuhkan serta ditingkatkan eksistensinya dan kapasitasnya, demikian pula dengan data dan informasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam meningkatkan konsumsi ikan diperlukan informasi dan promosi kepada masyarakat, salah satu upaya yang

telah dilaksanakan adalah dengan membentuk organisasi forikan (forum peningkatan konsumsi ikan).

Bentuk dari penguatan kelembagaan kelompok masyarakat di kecamatan Wajak dilakukan dengan pemberian pembinaan kepada pembudidaya ikan oleh DPK, dan BPP melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait ilmu-ilmu perikanan. Tidak hanya itu antar pembudidaya juga saling bertukar informasi perikanan baik dalam keadaan formal ataupun non formal. Untuk itu, analisa penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan kelembagaan kelompok masyarakat telah dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan dengan program minapolitan budidaya.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki visi atau tujuan berbeda-beda sesuai dengan spresialisasi organisasi tersebut. Begitu puladinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang. Visi tersebut pulalah yang nantinya menjadi pedoman DPK kabupaten malang dalam mengimplementasikan program-program ataupun kebijakannya. Visi DPK kabupaten Malang tersebut adalah “Terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing”. Sehingga untuk mewujudkan visi tersebut akan diupayakan melalui misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

Realisasi dari visi dan misi tersebut dalam budidaya ikan air tawar di kecamatan Wajak untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Malang yang sejahtera melalui sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari dilakukan pada panen tiba tidak menggunakan obat-obatan kimia, menjaga kualitas pakan dengan memberikan pakan organik dan juga menjaga kualitas sumber mata air dengan menanam pohon di atas sumber mata air radius 200m. Sementara itu, untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berdaya saing para semua *stakeholder* menjaga kualitas ikan, mengikusi pasaran dengan beralih ke ikan hias, serta pada saat pembibitan menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir. Selain itu para pembudidaya juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa universitas-universitas terkemuka di malang dalam hal riset dan ilmu pengetahuan, sehingga para pembudidaya tersebut bisa menerima ilmu-ilmu terbaru dan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari pihak perguruan tinggi yang di ajak bekerjasama. Mengingat evaluasi sangat perlu dilakukan jika tidak ingin organisasi yang berkaitan tidak bila mempertahankan eksistensinya seiring dengan perubahan zaman.

Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan menurut Olsen dan Eadje dalam Bryson (2007:4-5) dimana menjadi Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Deskripsi inilah yang disebut “Visi Keberhasilan” organisasi.

Mempertimbangkan teori evaluasi Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan sebagaimana yang dijelaskan oleh Olsen dan Eadje dalam Bryson maka tujuan DPK kabupaten Malang untuk mewujudkan masyarakat kabupaten malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing akan mudah tercapai apabila program-program tersebut terus dilakukan. Visi tersebut akan berjalan secara maksimal apabila antar *stakeholder* yang terlibat mampu berkomitmen dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengingat untuk menjaga sumberdaya perikanan yang aman dan lestari memerlukan kontribusi semua pihak untuk terus menjaga lingkungan sekitar termasuk lingkungan air dan pakan sehingga kualitas ikan yang dihasilkan tetap terjaga. Apabila semua hal tersebut terus dilakukan maka tidak mustahil jika visi/tujuan DPK sebagaimana yang telah di rancang sedemikian rupa akan terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dari bab sebelumnya terkait implementasi program budidaya minapolitan serta evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan terkait Program Budidaya Minapolitan periode 2011-2015 di lihat dari evaluasi berdasarkan perspektif perencanaan strategis

1. Implementasi Program Budidaya Minapolitan di Kecamatan Wajak

- a. Sumber kualitas air yang mendukung Program budidaya minapolitan di kecamatan Wajak kabupaten Malang tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, tingkat keamanan yang rendah serta belum adanya system pemasaran yang belum terorganisir sehingga kurang berjalan maksimal.
- b. Strategi dalam mewujudkan perikanan yang berdaya saing, aman dan lestari dilakukan dengan mencukupi pembiayaan modal, penggunaan teknologi terbaru, mengikuti perkembangan pasar, menjaga kualitas air dan pakan, serta pengelolaan sumber mata air.
- c. Ketersediaan sumber dana/modal, bantuan pembangunan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan tingkat kewanterampilan lokasi budidaya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi program minapolitan budidaya.

2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan kelautan Periode 2011-2015 terkait program budidaya minapolitan dilihat dari Evaluasi berdasarkan Perspektif Perencanaan Strategis Menurut (Bryson :2007)

- a. Antar *stakeholder* (DPK, BPP dan masyarakat pelaku usaha perikanan) yang terlibat dalam pelaksanaan program minapolitan budidaya ikan air tawar di kecamatan wajak saling bekerjasama terlihat dengan adanya pertemuan, dan sosialisasi tentang ilmu perikanan.
- b. Surat keputusan menteri dan penetapan kawasan minapolitan di kecamatan wajak menjadi landasan hukum dan menjadi mandate formal bagi DPK kabupaten malang dalam upaya melaksanakan dan membuat program yang baik dan terarah untuk program minapolitan budidaya ikan air tawar.
- c. Untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Malang yang sejahtera sebagaimana visi misi DPK kabupaten Malang yaitu melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing diperlukan kerjasama semua *stakeholder* untuk menjaga kualitas air dan pakan serta mampu mengikuti perkembangan pasar.
- d. Faktor lingkungan internal dan eksternal dalam program minapolitan budidaya ikan air tawar yaitu karena permintaan pasar terhadap produk perikanan yang semakin meningkat, kebijakan perbankan yang kurang berpihak kepada pelaku usaha perikanan, Tersedianya potensi sumber

daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar dan kebutuhan benih dan induk ikan yang belum tercukupi.

- e. identifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi dilakukan melalui peningkatan ketersediaan benih dan ikan unggul, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM, keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan, serta pemantapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi yang digunakan untuk mengelola isu dilakukan dengan cara membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan minapolitan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan serta penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk evaluasi program budidaya minapolitan berdasarkan rencana strategis dinas perikanan dan kelautan kabupaten Malang antara lain:

1. Adanya potensi di kecamatan Wajak untuk melakukan budidaya ikan air tawar seharusnya di imbangi dengan kualitas SDM dengan cara dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat pebudidaya, pelatihan secara berkala serta pembinaan tentang ilmu perikanan budidaya. Dengan semakin seringnya diadakan sosialisasi dan pengarahan terkait ilmu-ilmu

perikanan. pihak pemerintah juga harus melakukan langkah operasional seperti menjadikan sedikit lahan tidur milik desa yang ada didesa sebagai lahan untuk melakukan praktek pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar secara berkelanjutan bagi para pembudidaya ikan air tawar agar para pembudidaya dapat mendapatkan pakan dari hasil olahan sendiri.

2. Peneliti merekomendasikan untuk memberikan pengarahan dan motivasi khususnya bagi para pemula dan pembudidaya ikan air tawar yang pernah gagal sehingga mampu membangun semangat untuk terus berwirausaha dengan budidaya ikan air tawar.
3. Keamanan lokasi budidaya di area pinggir hutan dan jauh dari perumahan penduduk maka seharusnya keamanan lebih di tingkatkan dengan memberlakukan sistem sift penjagaan antar pemilik kolam.
4. Lebih ditingkatkannya kerjasama dan kesolidan antar masyarakat budidaya, petugas BPP maupun DPK kabupaten Malang supaya program minapolitan budidaya di kecamatan Wajak bisa mendapatkan prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.

Amirullah, dan Budi sri. 2002. *Manajemen Strategik*. Malang : Graha ilmu

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Berita Moneter .2015. Kontribusi PDRB ke PDB Jatim dan DKI Diakses pada Tanggal 18 Maret 2016 dari <http://www.beritamoneter.com/kontribusi-pdrb-ke-pdb-jatim-dan-dki>

BPS. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/brs/view/id/1143> tanggal 27 November 2015

BPS. 2013. *Perikanan Budidaya*. Diakses dari <http://www.bps.jatim.go.id> tanggal 28 November 2015

Bryson, Jhon. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Creswell, John W. 2012. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

_____. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

David. Fred R. 2002. *Manajemen strategis, konsep, edisi ketujuh. Reason Education Asia*. Jakarta : PT Prehalindo

Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya. 2014. *Minapolitan Budidaya Kabupaten Malang* .Diakses dari <http://128.199.144.134/> tanggal 13 Februari 2016

- Dirgantoro, Crown. 2001. *Management strategic, konsep alam dan lingkungan*. Jakarta : PT Grasindo Anggota Ikapi
- Dunn, William. N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan.1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam dimensi strategis Administrasi Publik konsep, teori dan isu* .Gramedia, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, (EdisiRevisi). Bandung: Rosadakarya
- Nirmala. 2003. *Ikan Air Tawar Kaya Protein dan Vitamin*. Diaksesdari<http://cyberjob.cbn.net.id> tanggal 12 Februari 2016
- Praditya, Ilyas. 2015. *Meski Melambat Ekonomi RI Lebih Berkualitas di Mata Asing*. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2228400/meski-melambat-ekonomi-ri-lebih-berkualitas-di-mata-asing> Tanggal 30 November 2015
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima.
- Sjamsuddin Indradi, Sjamsiar. 2010. *Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :BumiAksara.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Subagyo, Ahmad. 2006. *Studi kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung :Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Jakarta :Alfabeta
- Sukarelawati, Endang. 2015. *Pemkab Malang Perluas Budi Daya Ikan*. Diakses dari [http://www.antarajatim.com/lihat/berita/165284/pemkab-malang-perluas-area-budi-daya-ikantanggal 9 Oktober 2015](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/165284/pemkab-malang-perluas-area-budi-daya-ikantanggal%209%20Oktober%202015)
- Suyanto, M. 2007. *Strategik Manajemen*. Yogyakarta :Andi Yogyakarta
- Setiadi, Nugroho J. 2003, *Perilaku Konsumen*. Kencana. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2002. *Perilaku Organisasi*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta
- _____. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana : Jakarta.
- Trias. 2012. *Perlunya Pola Pikir Modern dalam Perikanan Tradisional*. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2016 dari <http://www.pusattoko.com/perlunya-pola-pikir-modern-dalam-perikanan-tradisional.html>
- Wahyuni, Kukuh Dwi. 2012. *Evaluasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kota Batu*. [skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service.

Wibawa, Samodra, et al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zauhar, soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang :Ikip Malang

Undang-undang:

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.18/MEN/2011 “Pedoman Umum Minapolitan”

Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/2013“ Penetapan Kawasan Minapolitan”

Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 perihal penetapan Kabupaten Malang sebagai pengembangan kawasan minapolitan di Jawa Timur.

Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 yang memuat tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

Keputusan Bupati Nomor 180/399/KEP/421.013/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI

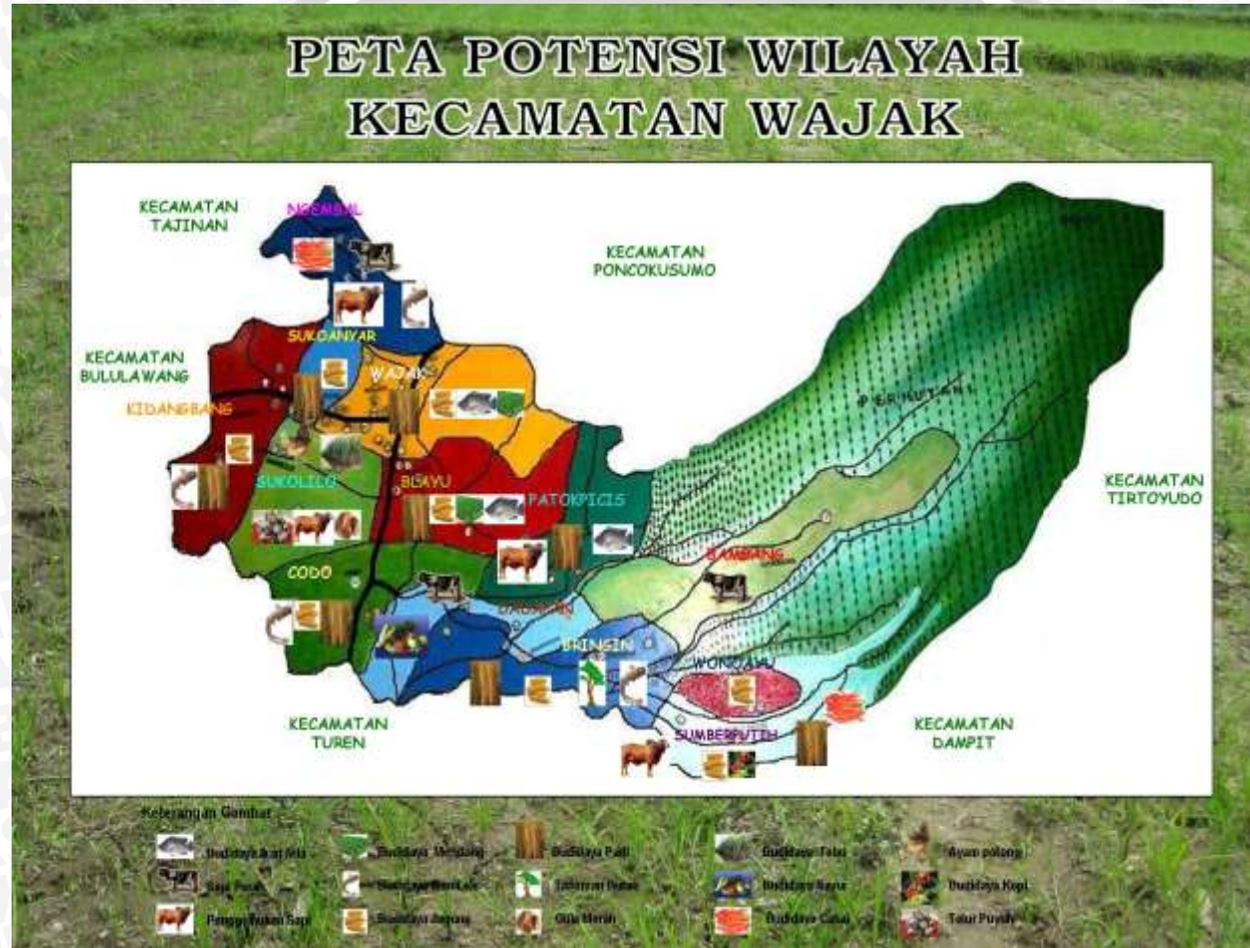


Bentuk Bantuan Kolam Beton dari Pemerintah Setempat



Wawancara dengan Masyarakat Pelaku Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3**INTERVIEW GUIDE****Wawancara Dengan Kepala Bidang Bagian Budidaya (Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Malang)****RENSTRA**

1. Dalam pembuatan Renstra Diskanla Mengacu pada apa?
2. Adakah hambatan dalam pembuatan Renstra?
3. Dalam pembuatan Renstra dan pelaksanaan renstra tersebut Diskanla bekerjasama dengan siapa ?
4. Apakah ada pengawasan khusus dari Diskanla terhadap pengimplementasiannya di lapangan terkait budi daya ikan air tawar ?
5. Menurut bapak apakah pengaruh adanya renstra di diskanla terhadap perekonomian para petani ikan air tawar ?
6. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan Renstra?
7. Bagaimana konsep minapolitan yang diterapkan di kecamatan wajak ? apakah ada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan renstra ?

Budidaya Ikan Air Tawar

1. Apakah ada peraturan yang menjadi acuan dalam pengembangan pembudidayaan ikan air tawar ?
2. Sejauh mana perhatian diskanla terhadap pembudidayaan ikan air tawar ?
3. Bagaimana strategi diskanla dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing ?
4. Apakah Strategi diskanla dalam meningkatkan perekonomian petani ikan air tawar?
5. Bagaimana cara mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari ?
6. Darimana para petani tersebut mendapatkan bibit ikan yang memiliki kualitas unggul ? apakah ada keterlibatan dari pemerintah setempat ?
7. Apakah ada pelatihan – pelatihan dan sosialisasi bagi para petani ikan ? kapan ? berapa hari sekali ? dimana ?
8. Bagaimana sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar?
9. Bagaimana system pengendalian dan pengawasan pengelolaan Sumber daya perikanan dari pemerintah setempat ?
10. Bagaimana model penguatan kelembangan kepada petani ikan yang ada dikab Malang?

Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Wajak

1. Apa benar kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di kabupaten Malang ?
2. Apa saja yang menjadi potensi unggulan kecamatan wajak ?
3. Pada tahun berapa kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?

4. Apa yang menjadi pertimbangan ketika wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?
5. Apa yang menjadi keunggulan / Prestasi kecamatan wajak terhadap hasil budidaya ikan air tawar dibanding daerah yang lain?
6. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak dari sebelum ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar hingga saat ini ?
7. Dimana biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya ?
8. Apakah dari hasil pembudidayaan tersebut ada yang diolah menjadi barang jadi siap jual ?
9. Setelah para petani ikan panen apakah ada keterlibatan pemerintah setempat dalam pemasaran ataupun pengolahan lanjutan hasil budidaya tersebut ?
10. Apa yang menjadi kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar?
11. Apakah ada bantuan berupa dana atau modal kepada para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak?, jika ada darimana ?
12. Darimana para petani tersebut mendapatkan bibit ikan yang memiliki kualitas unggul ? apakah ada keterlibatan dari pemerintah setempat ?
13. Bagaimana kerjasama antara diskanla dengan BPP kecamatan wajak ,pemerintah /pegawai pemerintah kec. wajak dan masyarakat setempat dalam pembudidayaan ikan air tawar ? Bagaimana hasil dari kerjasama tersebut?
14. Bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat dan masyarakat ketika terjadi suatu kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar ?

Minapolitan

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan atau kebijakan minapolitan budidaya di kecamatan wajak ini ?
2. Bagaimana kawasan Minapolitan budidaya yang sudah ada ?
3. Siapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan minapolitan di kecamatan wajak?
4. Bagaimana evaluasi program Minapolitan di kecamatan wajak ?, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum ?
5. Apakah ada semacam study banding ke kawasan minapolitan lain di Jawa Timur atau bahkan kebagian Indonesia yang lain?
6. Bagaimana prestasi kecamatan wajak dalam hal Minapolitan Budidaya?
7. Bagaimana kawasan minapolitan budidaya yang sudah ada ? (di kecamatan wajak) apakah sudah layak dijadikan kawasan percontohan ?
8. Tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh semua stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan wajak?

INTERVIEW GUIDE

Wawancara Dengan Pejabat Bidang Bagian Budidaya di Badan Penyuluh Pertanian “BPP” Kec. Wajak Kab. Malang

RENSTRA

1. Apakah ada pengawasan khusus dari Diskanla terhadap pengimplementasiannya di lapangan terkait budi daya ikan air tawar ?
2. Menurut bapak apakah pengaruh adanya renstra di diskanla terhadap perekonomian para petani ikan air tawar ?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan Renstra?
4. Bagaimana konsep minapolitan yang diterapkan di kecamatan wajak ? apakah ada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan renstra ?

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

1. Apa benar kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di kabupaten Malang ?
2. Apa saja yang menjadi potensi unggulan kecamatan wajak ?
3. Pada tahun berapa kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?
4. Apa yang menjadi pertimbangan ketika wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?
5. Apa yang menjadi keunggulan / Prestasi kecamatan wajak terhadap hasil budidaya ikan air tawar dibanding daerah yang lain?
6. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak dari sebelum ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar hingga saat ini ?
7. Dimana biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya ?
8. Apakah dari hasil pembudidayaan tersebut ada yang diolah menjadi barang jadi siap jual ?
9. Setelah para petani ikan panen apakah ada keterlibatan pemerintah setempat dalam pemasaran ataupun pengolahan lanjutan hasil budidaya tersebut ?
10. Apa yang menjadi kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar?
11. Apakah ada bantuan berupa dana atau modal kepada para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak?, jika ada darimana ?
12. Darimana para petani tersebut mendapatkan bibit ikan yang memiliki kualitas unggul ? apakah ada keterlibatan dari pemerintah setempat ?
13. Sejauh mana perhatian Dinas kelautan dan perikanan terhadap pembudidayaan ikan air tawar?
14. Bagaimana strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing ?
15. Bagaimana strategi dalam meningkatkan perekonomian petani ikan air tawar ?
16. Bagaimana cara mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari ?

17. Apakah ada pelatihan – pelatihan dan sosialisasi bagi para petani ikan ? kapan ? berapa hari sekali ? dimana ?
18. Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tersebut?
19. Bagaimana sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar?
20. Bagaimana system pengendalian dan pengawasan pengelolaan Sumber daya perikanan dari pemerintah setempat ?
21. Bagaimana model penguatan kelembagan kepada petani ikan yang ada di Kecamatan Wajak?
22. Adakah lembaga keuangan yang bekerja sama dengan kelompok tani ikan air tawar sehingga memungkinkan jika petani tersebut kekurangan modal , para petani dapat pinjaman modal?
23. Sebelum melakukan budidaya ikan air tawar masyarakat setempat bekerja sebagai apa?
24. Bagaimana kerjasama antara diskanla dengan BPP kecamatan wajak , pemerintah /pegawai pemerintah kec. wajak dan masyarakat setempat dalam pembudidayaan ikan air tawar ? Bagaimana hasil dari kerjasama tersebut?
25. Bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat dan masyarakat ketika terjadi suatu kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar ?

MINAPOLITAN

9. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan atau kebijakan minapolitan budidaya di kecamatan wajak ini ?
10. Bagaimana kawasan Minapolitan budidaya yang sudah ada ?
11. Siapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan minapolitan d kecamatan wajak?
12. Bagaimana evaluasi program Minapolitan di kecamatan wajak ?
13. Apakah ada semacam study banding ke kawasan minapolitan lain di Jawa Timur atau bahkan kebagian Indonesia yang lain?
14. Bagaiman prestasi kecamatan wajak dalam hal Minapolitan Budidaya?
15. Bagaimana kawasan minapolitan budidaya yang sudah ada ? (wajak) apakah sudah layak dijadikan kawasan percontohan ?
16. Tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh semua stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan wajak?

INTERVIEW GUIDE

Wawancara Dengan Masyarakat Setempat di Kec. Wajak Kab. Malang

RENSTRA

1. Apakah ada pengawasan khusus dari Diskanla terhadap pengimplementasiannya di lapangan terkait budi daya ikan air tawar ?
2. Menurut bapak apakah pengaruh adanya renstra di diskanla terhadap perekonomian para petani ikan air tawar ?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan Renstra?
4. Bagaimana konsep minapolitan yang diterapkan di kecamatan wajak ? apakah ada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan renstra ?

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

1. Apa benar kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar di kabupaten Malang ?
2. Apa saja yang menjadi potensi unggulan kecamatan wajak ?
3. Pada tahun berapa kecamatan wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?
4. Apa yang menjadi pertimbangan ketika wajak ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar?
5. Apa yang menjadi keunggulan / Prestasi kecamatan wajak terhadap hasil budidaya ikan air tawar dibanding daerah yang lain?
6. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak dari sebelum ditetapkan sebagai sentra budidaya ikan air tawar hingga saat ini ?
7. Dimana biasanya para pembudidaya memasarkan hasil perikanannya ?
8. Apakah dari hasil pembudidayaan tersebut ada yang diolah menjadi barang jadi siap jual ?
9. Setelah para petani ikan panen apakah ada keterlibatan pemerintah setempat dalam pemasaran ataupun pengolahan lanjutan hasil budidaya tersebut ?
10. Apa yang menjadi kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar?
11. Apakah ada bantuan berupa dana atau modal kepada para pembudidaya ikan air tawar di kecamatan wajak?, jika ada darimana ?
12. Darimana para petani tersebut mendapatkan bibit ikan yang memiliki kualitas unggul ? apakah ada keterlibatan dari pemerintah setempat ?
13. Sejauh mana perhatian Dinas kelautan dan perikanan terhadap pembudidayaan ikan air tawar?
14. Bagaimana strategi dalam mewujudkan hasil perikanan budidaya yang memiliki daya saing ?
15. Bagaimana strategi dalam meningkatkan perekonomian petani ikan air tawar ?
16. Bagaimana cara mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang aman dan lestari ?
17. Apakah ada pelatihan – pelatihan dan sosialisasi bagi para petani ikan ? kapan ? berapa hari sekali ? dimana ?

18. Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tersebut?
19. Bagaimana sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada dalam pembudidayaan ikan air tawar?
20. Bagaimana system pengendalian dan pengawasan pengelolaan Sumber daya perikanan dari pemerintah setempat ?
21. Bagaimana model penguatan kelembagan kepada petani ikan yang ada di Kecamatan Wajak?
22. Adakah lembaga keuangan yang bekerja sama dengan kelompok tani ikan air tawar sehingga memungkinkan jika petani tersebut kekurangan modal , para petani dapat pinjaman modal?
23. Sebelum melakukan budidaya ikan air tawar masyarakat setempat bekerja sebagai apa?
24. Bagaimana kerjasama antara diskanla dengan BPP kecamatan wajak ,pemerintah /pegawai pemerintah kec. wajak dan masyarakat setempat dalam pembudidayaan ikan air tawar ? Bagaimana hasil dari kerjasama tersebut?
25. Bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat dan masyarakat ketika terjadi suatu kendala dalam pembudidayaan ikan air tawar ?

MINAPOLITAN

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan atau kebijakan minapolitan budidaya di kecamatan wajak ini ?
2. Bagaimana kawasan Minapolitan budidaya yang sudah ada ?
3. Siapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan minapolitan d kecamatan wajak?
4. Bagaimana evaluasi program Minapolitan di kecamatan wajak ?
5. Apakah ada semacam study banding ke kawasan minapolitan lain di Jawa Timur atau bahkan kebagian Indonesia yang lain?
6. Bagaiman prestasi kecamatan wajak dalam hal Minapolitan Budidaya?
7. Bagaimana kawasan minapolitan budidaya yang sudah ada ? (wajak) apakah sudah layak dijadikan kawasan percontohan ?
8. Tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh semua stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan wajak?

LAMPIRAN 4

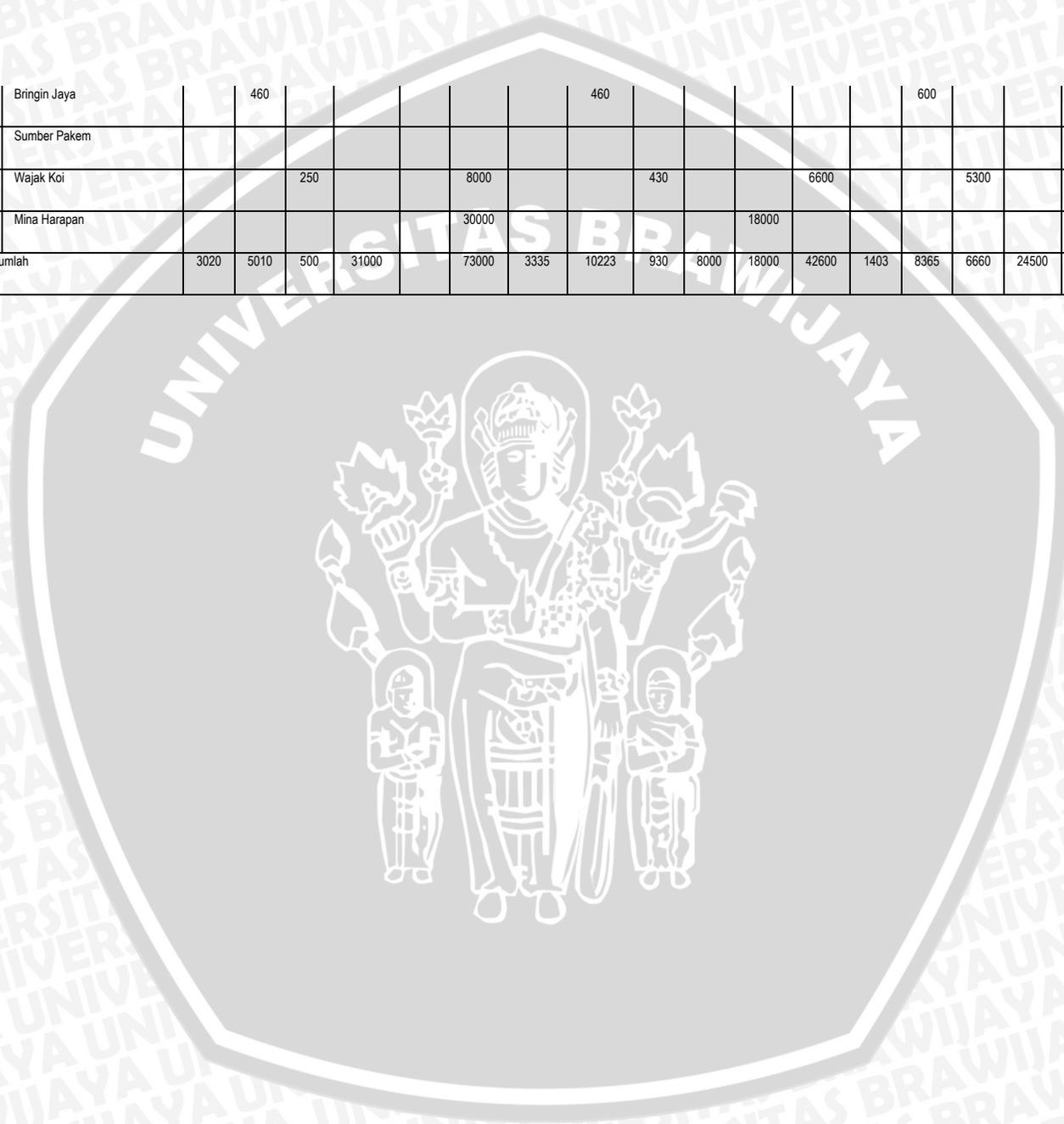
Tabel Data Produksi Perikanan Pokdakan Di Kecamatan Wajak Tahun 2015

No	Desa	Nama Kelompok	Juni						Juli						Agustus						September					
			Jenis Ikan			Benih			Jenis Ikan			Benih			Jenis Ikan			Benih			Jenis Ikan			Benih		
			Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi	Nilai	Lele	Koi
1.	Kidangbang	Mina Jaya	—	830						780						1390						780				
2.	Sukoanyar	Mina Makmur		1420						1320						2670						1360				
3.	Ngembal	Tirta mina mulyo		740																						
4.	Wajak	Sumber Niksur	2675	780					562		8000				560		20000				560	380		22000		
5.	Wajak	Mina Makaryo		877						673					390							570				
6.	Blayu	Ngudimulyo III	1600	865	300	88000		12000	384		16800		9800	875							880					
7.	Blayu	Mina Mulyo Lestari	857	960					256	380				228							670					
8.	Blayu	Sumber Cilung	650						240		12000										220					
9.	Patok Pisis	Mina Barokah	1350	3260						1780				480	1870						770	1480				
10.	Patokpisis	Al Huda	1580			36000								360		18000					210			8000		
11.	Patokpisis	Al Azhar	460																		200					
12.	Sukolilo	Bangun Karyo III							892					765							450					
13.	Codo	Kube Sangkuriang		800					670					370							780					
14.	Dadapan	Mina Sari Alam		973					675					560							200					
15.	Dadapan	Sumber Ringin							350												280					

16.	Bringin	Dewi Sri II		765						245					260					210				
17.	Bringin	Sumber Rejeki						780	450				840							670	320			
18.	Bringin	Bringin Jaya		600																				
19.	Bambang	Sumber Pakem		230																				
20.	Wajak	Wajak Koi			300			65000		170			22000		600				25000		1500			28000
21.	Codo	Mina Harapan						26000					12000						18000					12000
Jumlah				9172	13100	600	124000	103000	2572	8035		36800	12000	31800	3343	8275	600	38000	43000	4180	6810	1500	30000	40000



18.	Bringin	Bringin Jaya		460						460					600					
19.	Bambang	Sumber Pakem																		
20.	Wajak	Wajak Koi		250			8000			430			6600		5300				65000	
21	Codo	Mina Harapan					30000					18000							18000	
Jumlah			3020	5010	500	31000		73000	3335	10223	930	8000	18000	42600	1403	8365	6660	24500	44000	77000



LAMPIRAN 5

SURAT REKOMENDASI RISET/PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
 MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/452/421.205/2016

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Ilmu Administrasi UB Malang Nomor :
 6839/UN10.3/PG/2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Ari Hardiansyah/ Mhs. FIA UB Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Evaluasi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan
 dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Ikan Air Tawar

Daerah/tempat kegiatan : Kecamatan Wajak Kab. Malang

Lamanya : 3 Bulan

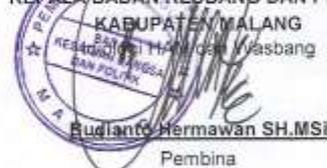
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
 Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 09 Mei 2016

An KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Budiarto Hermawan SH,MSi

Pembina

NIP : 19671203 199303 1007

TEMBUSAN :

Yth,

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi UB Malang
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Malang
4. Sdr. Camat Wajak Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Kantor BPPP Kec. Wajak Kab. Malang
6. Sdr. Kepala Kelompok Tani Ikan Air Tawar Kec. Wajak Kab. Malang
7. Sdr. Mhs/ Ybs
8. Arsip

LAMPIRAN 6**CURRICULUM VITAE**

Nama : ARI HARDIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 125030107111015

Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Desember 1993

Email : hardiansyahari88@gmail.com

No. HP : 085706000094

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri Bagorwetan 1 (2000-2006)
2. SMP Negeri 4 Nganjuk (2007-2009)
3. SMA Negeri 1 Gondang (2009-2012)
4. Universitas Brawijaya (2012-2016)

Pendidikan Non Formal : Magang di Kecamatan Klojen Kota Malang

Pengalaman Organisasi : 1. 2013 – 2014 Lembaga Kesenian SSM
(Staff PKA)
2. 2014 – 2015 Lembaga Kesenian SSM
(Kepala Bidang PSDM)